



**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR
TAHUN 2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk mengetahui capaian dan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal capaian kinerja indikator makro, capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan (IKK), capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), evaluasi pelaksanaan program prioritas, dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Harapan kami, dengan tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 dapat memberikan manfaat dan masukan untuk penyusunan RPJMD tahun berikutnya serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Bogor serta dapat digunakan untuk penentuan kebijakan perencanaan selanjutnya.

Bogor, Januari 2019

Kepala Bappeda
Kota Bogor

Ir. Hj. Erna Hernawati, MM, MBA

Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	TUJUAN DAN SASARAN	1
1.3.	MANFAAT	1
BAB II	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO KOTA BOGOR	2
2.1.	ANALISIS POLA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR	3
2.1.1.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA BOGOR	3
2.1.2.	PENDAPATAN PER KAPITA	3
2.1.3.	ANALISIS SEKTOR BASIS	10
2.2.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	11
2.2.1.	INDEKS KESEHATAN	17
2.2.2.	INDEKS PENDIDIKAN	21
2.2.3.	INDEKS HIDUP LAYAK	34
2.3.	KEMISKINAN DAN GINI RASIO	45
2.4.	PENGANGGURAN	48
BAB III	CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019	63
3.1.	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	67
3.2.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR	68
3.3.	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	71
3.4.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	73
3.5.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI	74
3.6.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	75
3.7.	EVALUASI SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018	77
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	79
BAB V	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (IKK)	130
BAB VI	CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	143
6.1.	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016	143
6.1.1.	LINGKUNGAN HIDUP	143
6.2.	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017	146
6.2.1.	PENDIDIKAN	146
6.2.2.	KESEHATAN	147
6.2.3.	PEKERJAAN UMUM	147
6.2.4.	PERUMAHAN RAKYAT	150
6.2.5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	150

6.2.6.	SOSIAL	152
6.3.	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2018	153
6.3.1.	PENDIDIKAN	153
6.3.2.	KESEHATAN	154
6.3.3.	PEKERJAAN UMUM	156
6.3.4.	PERUMAHAN RAKYAT	157
6.3.5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	158
6.3.6.	SOSIAL	160
BAB VII CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		161
7.1.	CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR SOSIAL	161
7.2.	CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR EKONOMI	162
7.3.	CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR LINGKUNGAN	163
7.4.	CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	163
BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BOGOR		197
8.1.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	197
8.2.	PENATAAN TRANSPORTASI	202
8.3.	PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	208
8.4.	PENATAAN RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU	210
8.5.	PENATAAN PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA	212
8.6.	TRANSFORMASI BUDAYA DAN REFORMASI BIROKRASI	212
BAB IX EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)		214
9.1.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR	216
9.2.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR	220
9.3.	PD. PASAR PAKUAN JAYA	224
9.4.	PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI (PDJT)	227
BAB X PENUTUP		231

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor, Tahun 2013-2017	3
Tabel 2.2. Kontribusi atau Share PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor, Tahun 2013-2017	4
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2011-2016 (Persen)	6
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2013-2017	6
Tabel 2.5 Penduduk Kota Bogor yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2017	9
Tabel 2.6 PDRB per Kapita Kota Bogor dan Pertumbuhannya, 2013-2017	11
Tabel 2.7 Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi di Kota Bogor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 pada Tahun 2013-2017	12
Tabel 2.8 Nilai Ra, Ri dan ri Kota Bogor	14
Tabel 2.9 Komponen Pertumbuhan Regional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	15
Tabel 2.10 Komponen Pertumbuhan Proporsional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	16
Tabel 2.11 Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	17
Tabel 2.12 Perkembangan Derajat Kesehatan Kota Bogor Periode 2010-2017	24
Tabel 2.13 Perkembangan Bayi Lahir Hidup dan Angka Kematian Bayi Kota Bogor, Bekasi, dan Kota Depok Periode 2010-2017.	27
Tabel 2.14 Pencapaian Upaya Imunasi Bayi Kota Bogor Periode 2008-2017	31
Tabel 2.15 Inflasi Kota Bogor Menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2013-2017	48
Tabel 2.16. Hasil Pengolahan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Orang Miskin di Kota Bogor	63
Tabel 2.17 Penganggur Terbuka (Mencari Pekerjaan) Menurut Golongan Umur di Kota Bogor, Tahun 2013 – 2017	64
Tabel 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2013 – 2017	65
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 1 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019	67
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019	68
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 –	71

2019

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 4 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019	73
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 5 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019	74
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 6 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019	75
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran 2018	77
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Proram	80
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (IKK)	130
Tabel 6.1 Target dan Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air	143
Tabel 6.2 Target dan Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak	144
Tabel 6.3 Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak	144
Tabel 6.4 Target dan Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	145
Tabel 6.5 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	146
Tabel 6.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	146
Tabel 6.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	147
Tabel 6.8 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum	147
Tabel 6.9 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat	150
Tabel 6.10 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	151
Tabel 6.11 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial	152
Tabel 6.12 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	154
Tabel 6.13 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	155
Tabel 6.14 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum	157
Tabel 6.15 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat	158
Tabel 6.16 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	159
Tabel 6.17 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial	160
Tabel 7.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Sosial	162
Tabel 7.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi	162
Tabel 7.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan	163

Tabel 7.4 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola	164
Tabel 7.5 Matriks Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs Kota Bogor	165
Tabel 8.1 Skenario Target Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2015-2019	197
Tabel 8.2 Jumlah Kunjungan dan Pembiayaan Pengguna Jaminan SKTM / Jamkesda di Rumah Sakit	199
Tabel 8.3 Pengujian Kendaraan Bermotor	207
Tabel 9.1 Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor	217
Tabel 9.2 Tingkat Kesehatan Bank	218
Tabel 9.3 Realisasi Penyaluran Dana CSR Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2018	219
Tabel 9.4 Target dan Realisasi Pemenuhan Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2018	220
Tabel 9.5 Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2018	221
Tabel 9.6 Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan	222
Tabel 9.7 Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif	222
Tabel 9.8 Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2018	223
Tabel 9.9 Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak	224
Tabel 9.10 Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018	224
Tabel 9.11 Jumlah Kios dan Los	225
Tabel 9.12 Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Sampai dengan Tahun 2018	227
Tabel 9.13 Rekapitulasi Pendapatan Operasional Transpakuan Koridor Baranangsiang – Bellanova (Sentul City) Periode Tahun 2018	229
Tabel 9.14 Rekapitulasi Pendapatan Operasional Transpakuan Koridor Bubulak – Baranangsiang Periode Tahun 2018	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Laju Pertumbuhan dan Jumlah Pekerja di Sektor Tertinggi, serta Inflasi di Kota Bogor Tahun 2013-2017	9
Gambar 2.2. Perkembangan IPM Kota Bogor Periode 2010-2017	18
Gambar 2.3. Capaian IPM Tertinggi Kab/Kota di Provinsi Jabar Tahun 2017	19
Gambar 2.4. Perbandingan IPM Kota Bogor, Bekasi dan Depok Periode 2010-2017	20
Gambar 2.5. Perkembangan UHH Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Jawa Barat Periode 2010-2017	21
Gambar 2.6. Perkembangan UHH, Orang Miskin dan PPP Kota Bogor Periode 2010-2017	22
Gambar 2.7. Perkembangan UHH, AKI, AKB dan AKBA Kota Bogor Tahun 2010-2017	23
Gambar 2.8. Perkembangan Kematian Ibu di Kota Bogor periode 2010-2017	25
Gambar 2.9. Perkembangan Kematian Balita Menurut Pendidikan Ibu Dan Kelas Ekonomi/Kekayaan Keluarga (2007-2017)	29
Gambar 2.10. Persentase Usia Pernikahan dan Kehamilan Pertama Perempuan berusia > 10 Tahun di Kota Bogor Tahun 2016	30
Gambar 2.11. Persentase Rumah Tangga / Keluarga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Bogor dan Depok Periode 2010-2017	33
Gambar 2.12. Capaian Indeks Pendidikan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2017	34
Gambar 2.13. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017	35
Gambar 2.14. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RSL) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017	36
Gambar 2.15. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017	37
Gambar 2.16. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017	38
Gambar 2.17. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2015-2017	39
Gambar 2.18. Cakupan Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa dan Jumlah anak sekolah tepat waktu (APM) dan Populasi Penduduk Usia Sekolah (7-18 tahun) Kota Bogor Tahun 2017	41
Gambar 2.19. Sebaran Penduduk dan Sekolah (Dasar dan Menengah) berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017	42
Gambar 2.20. Perkembangan Sekolah Negeri dan Swasta Berbagai Jenjang di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017	43

Gambar 2.21. Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan dan Pendidikan dalam APBD Realisasi tahun 2010-2017	45
Gambar 2.22. Grafik <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP) di Kota Bogor Tahun 2010-2017	46
Gambar 2.23. Hubungan Tingkat PPP, Inflasi dan UMK Kota Bogor 2013 -2017	46
Gambar 2.24. Hubungan Tingkat PPP dan Jumlah Orang Miskin di Kota Bogor 2013 - 2017	47
Gambar 2.25. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2010-2017	47
Gambar 2.26. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor 2013 - 2017	48
Gambar 2.27. Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bogor Tahun 2010 – 2017	49
Gambar 2.28. Rasio Kemiskinan di Beberapa Wilayah Sekitar Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017	49
Gambar 2.29. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor Tahun 2010 - 2017	50
Gambar 2.30. Perkembangan Jumlah ASN, Orang Miskin, Wirausaha, Nilai PDRB dan Dana Bantuan Sosial di Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017	51
Gambar 2.31. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi	51
Gambar 2.32. Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi	52
Gambar 2.33. Perbandingan UMR/UMK di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi	52
Gambar 2.34. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kota Bogor Tahun 2013-2017	53
Gambar 2.35. Perbandingan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di KecamatanKecamatan di Kota Bogor	54
Gambar 2.36. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan-Kecamatan di Kota Bogor Taun 2014-2017	54
Gambar 2.37. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor 2013 -2017	55
Gambar 2.38. Tingkat Inflasi per Bulan di Kota Bogor pada Tahun 2017	56
Gambar 2.39. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kegiatan Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bogor, 2017	56
Gambar 2.40. Nilai Gini Ratio di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2017	57
Gambar 2.41. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017	57
Gambar 2.42. Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan IT selama Tiga Bulan Terakhir, 2017	58
Gambar 2.43. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status	

Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2017	59
Gambar 2.44. Rata-Rata Pengeluaran (%) terhadap Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017	59
Gambar 2.45. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017	60
Gambar 2.46 Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017	61
Gambar 2.47. Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kcal) per Kapita Sehari menurut Kuintil Pengeluaran, 2017	62
Gambar 2.48. Tingkat PPP, Jumlah Orang Miskin dan Pengangguran di Kota Bogor 2013 -2017	65
Gambar 2.49. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Jawa Barat per Agustus 2017	66
Gambar 3.1. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bogor	76
Gambar 3.2. Evaluasi Serapan Anggaran Tahun 2018	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan proses teknokratik, partisipatif dan politik antara pemerintah, legislatif dan masyarakat. Dokumen RPJMD diperoleh dari hasil kajian para perencana di daerah sekaligus pengejawantahan dari kebijakan dan program pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan isu strategis wilayah, analisis potensi dan kebutuhan wilayah, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kota Bogor. Hasil perencanaan dalam RPJMD akan berdampak sangat luas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar program pembangunan serta alokasi anggaran pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya.

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka diperlukan upaya berkesinambungan untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang cermat, tepat, aspiratif dan akuntabel. Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bogor, dengan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2015-2019, berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 Peraturan Daerah ini telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan dan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Periode Tahun 2015-2019.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Bila hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/peyimpangan, kepala Bappeda berkewajiban untuk melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan. Hasil dari pengendalian evaluasi tersebut dilaporkan kepada Walikota Bogor.

Pengendalian mencakup rumusan visi misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor. Atas dasar itu maka Bappeda Kota Bogor membuat laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan pengendalian dan evaluasi capaian RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing agenda pembangunan termasuk evaluasi pendanaan untuk menghasilkan rekomendasi terhadap capaian indikator.

Sasaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: menganalisis capaian pembangunan RPJMD sampai dengan pelaksanaan tahun ke-4; mengetahui hasil capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor sampai dengan tahun ke-4, secara makro untuk masing-masing agenda Pembangunan Daerah; melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing agenda pembangunan termasuk evaluasi pendanaan; melakukan evaluasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM); melakukan evaluasi capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan melakukan evaluasi capaian kinerja BUMD.

1.3. MANFAAT

Manfaat yang bisa diperoleh melalui pengendalian dan evaluasi Capaian RPJMD ini antara lain: 1. Sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya; 2. Sebagai bahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya; 3. Mengoptimalkan program pembangunan sesuai agenda daerah yang terukur dan rasional; dan 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran sehingga lebih bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

BAB II

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO KOTA BOGOR

2.1. Analisis Pola dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Bogor setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada 2017 mencapai Rp 38.506,60 juta, meningkat 8,77% dibanding Rp 35.400,80 juta pada tahun 2016. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017 mencapai Rp 28.864,33 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 27.221,21 juta. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 menunjukkan trend percepatan bila dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 0.63 persen. Pertumbuhan PDRB Kota Bogor tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 6,74 persen.

Tabel 2.1.

PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor, Tahun 2013-2017

Kode Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	216.320,33	220.689,88	225.137,69	230.145,03	233.030,00
B Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C Industri Pengolahan	4.325.575,49	4.564.569,82	4.843.786,77	5.109.363,13	5.351.640,00
D Pengadaan Listrik dan Gas	980.512,23	1.025.049,18	898.231,83	903.130,58	831.950,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.920,45	25.940,03	27.361,22	28.518,60	29.200,00
F Konstruksi	2.555.955,98	2.696.289,52	2.848.754,78	3.011.149,21	3.237.680,00
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.114.427,17	5.367.108,86	5.650.090,63	5.972.855,53	6.306.050,00
H Transportasi dan Pergudangan	2.496.952,36	2.637.721,22	2.893.357,49	3.133.215,64	3.366.500,00
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.002.846,67	1.059.403,07	1.119.753,25	1.209.844,24	1.304.030,00
J Informasi dan Komunikasi	1.070.494,44	1.270.614,21	1.506.674,81	1.692.958,81	1.919.820,00

Kode Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.549.250,42	1.606.764,74	1.676.548,86	1.847.070,71	1.951.350,00
L	Real Estate	490.879,30	525.977,17	555.976,80	601.018,99	639.840,00
M,N	Jasa Perusahaan	456.796,50	477.357,37	516.834,82	560.209,59	590.800,00
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626.872,86	643.234,24	660.730,22	675.927,01	683.610,00
P	Jasa Pendidikan	587.388,87	656.814,29	718.858,00	772.597,46	826.600,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246.968,00	279.823,32	313.143,35	341.269,24	381.440,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	739.506,47	777.953,83	843.363,78	912.977,72	1.001.430,00
	Produk Domestik Bruto	22.484.667,54	23.835.310,77	25.298.604,31	27.002.251,51	28.654.970,00

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2019

Kontribusi dari setiap sektor dalam perekonomian Kota Bogor merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Berikut pada Tabel 2.2, disajikan data kontribusi setiap sektor dalam perekonomian Kota Bogor.

Tabel 2.2.
Kontribusi atau Share PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor, Tahun 2013-2017

Kode	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,93	0,89	0,85	0,81
B	Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,24	19,15	19,15	18,92	18,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,36	4,30	3,55	3,34	2,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	11,37	11,31	11,26	11,15	11,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,75	22,52	22,33	22,12	22,01
H	Transportasi dan Pergudangan	11,11	11,07	11,44	11,60	11,75

Kode	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,46	4,44	4,43	4,48	4,55
J	Informasi dan Komunikasi	4,76	5,33	5,96	6,27	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	6,74	6,63	6,84	6,81
L	Real Estate	2,18	2,21	2,20	2,23	2,23
M,N	Jasa Perusahaan	2,03	2,00	2,04	2,07	2,06
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,79	2,70	2,61	2,50	2,39
P	Jasa Pendidikan	2,61	2,76	2,84	2,86	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,17	1,24	1,26	1,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,29	3,26	3,33	3,38	3,49
	Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2019 (Diolah)

Berdasarkan data share atau pangsa PDRB Berdasarkan Harga Tahun Dasar 2010 Kota Bogor pada tabel di atas, diketahui bahwa di Kota Bogor selama 5 tahun terakhir **sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**. Sebagai kota perdagangan maka kontribusi sektor ini memang menjadi sangat dominan di Kota Bogor. Letak Kota Bogor yang strategis yaitu merupakan hinterland Kota Jakarta menjadikan Kota Bogor sebagai lokasi yang strategis untuk kegiatan perdagangan. Meskipun demikian kontribusi sektor ini juga terus mengalami penurunan. Hal ini juga menjadi pendorong rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Sebaliknya sektor yang memiliki **kontribusi terkecil selama 5 tahun terakhir di Kota Bogor adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**. Hal ini dikarena semakin berkurangnya potensi sektor tersebut di Kota Bogor. Berkurangnya luas lahan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diduga menjadi salah satu penyebab semakin rendahnya kontribusi sektor ini dalam perekonomian Kota Bogor.

Perubahan pada kondisi PDRB mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. PDRB berdasarkan harga konstan mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak dipengaruhi oleh kondisi inflasi. Pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah sekitar Kota Bogor, maka diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Jawa Barat, meskipun masih berada di bawah Kota Depok yang terus berkembang dengan sektor industrinya. Data laju pertumbuhan PDRB wilayah sekitar Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2011-2016 (Persen)**

Wilayah Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Bogor	5,86	6,01	6,14	6,01	6,09	6,35
Kota Bogor	6,22	6,31	6,04	6,01	6,13	6,73
Kota Bekasi	6,45	6,74	6,04	5,61	5,57	6,08
Kota Depok	6,81	8,06	6,85	7,28	6,64	7,28
Provinsi Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67

Sumber: BPS masing-masing wilayah Tahun 2019

Catatan : Tahun 2010 ada pergantian harga konstan dari 2000 menjadi 2010

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berdasarkan PDRB ADHK 2010 menunjukkan pertumbuhan yang menurun yaitu antara tahun 2016 ke tahun 2017. Data laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya diketahui bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor adalah sebesar 6,12 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,37 persen. Ekonomi nasional yang belum stabil juga berimbas dengan perekonomian masyarakat Kota Bogor.

Tabel 2.4.**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2013-2017**

Ket.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,13	2,02	2,02	2,22	1,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4,69	5,53	6,12	5,48	4,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,44	4,54	- 12,37	0,55	-7,88
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	7,41	8,44	5,48	4,23	2,4
F	Konstruksi	5,45	5,49	5,65	5,7	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	4,94	5,27	5,71	5,58
H	Transportasi dan Pergudangan	5,05	5,64	9,69	8,29	7,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6	5,64	5,7	8,05	7,78
J	Informasi dan Komunikasi	9,41	18,69	18,58	12,36	13,4
K	Jasa Keuagandan Asuransi	10,97	3,71	4,34	10,17	5,65
L	Real Estate	7,19	7,15	5,7	8,1	6,46
M, N	Jasa Perusahaan	9,47	4,5	8,27	8,39	5,46
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	2,61	2,72	2,3	1,14

Ket.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
P	Jasa Pendidikan	12,06	11,82	9,45	7,48	6,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,88	13,3	11,91	8,98	11,77
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,52	5,2	8,41	8,25	9,69
	PDRB TOTAL	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12
<i>Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2018</i>						

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.** Sementara itu, **penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan serta Pengadaan Listrik dan Gas** juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017.

Semakin rendahnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Bogor memang merupakan imbas dari semakin rendahnya lahan pertanian di Kota Bogor dikarenakan konversi lahan pertanian (dalam arti luas) ke sektor non pertanian. Luas lahan produktif di Kota Hujan setiap tahun terus menyusut. **Semakin berkembangnya Kota Bogor sebagai tempat tinggal, maka semakin memicu terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian ke lahan perumahan (non pertanian). tidak hanya perumahan tetapi juga konversi ke sektor industri (pabrik pengolahan, kantor-kantor usaha dan sebagainya). Tanah untuk tanaman padi tersebut digunakan sebagai perumahan. Dari total luas wilayah 11.850 hektare, lahan yang digunakan untuk pertanian hanya 2,7 persen atau 321 hektare pada tahun 2017.**

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor terdapat lapangan usaha mengalami **pertumbuhan negatif** yaitu **Pengadaan Listrik dan Gas.** Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan listrik dan gas terus meningkat namun titik pertumbuhannya sektor ini menurun. Hal ini akan menjadi masalah bagi masyarakat. Selama ini diduga terjadi pemenuhan kebutuhan terutama untuk gas dari wilayah-wilayah sekitar Kota Bogor. Meskipun berdasarkan aturan hal tersebut tidak diperbolehkan. Terkait listrik adanya tindakan pemadaman bergilir bukan lagi menjadi hal aneh di Kota Bogor. Kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan pasokan listrik dan gas di wilayah Kota Bogor.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh **lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,85 persen.** Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sementara lima lapangan usaha

lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

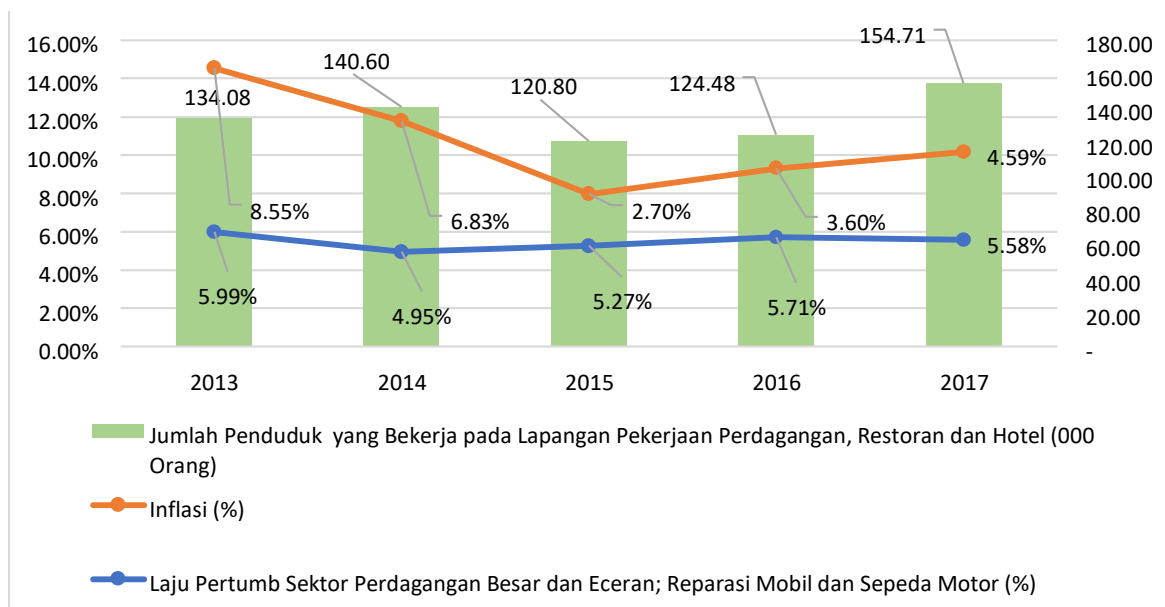
Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,85 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 9,78 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 9,31 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,67 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,42 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,38 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,37 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,24 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,13 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen.

Sedangkan lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,83 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,58 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,48 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,88 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,19 persen.

Sebagai sektor yang memiliki kontribusi tertinggi di Kota Bogor, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi dan cenderung turun pada tahun 2017. Di sisi lain jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mengalami peningkatan. Hal ini diduga karena adanya dorongan untuk memproduksi lebih banyak saat kondisi inflasi tinggi.

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan sektor perdagangan besar ini mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,71%. Peningkatan laju pertumbuhan sektor ini sejalan juga dengan peningkatan inflasi di Kota Bogor. Hal ini diduga karena adanya dorongan untuk memproduksi lebih banyak saat kondisi inflasi tinggi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Bogor, hal ini sejalan dengan kondisi dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan pekerjaan perdagangan, restoran dan hotel di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Bogor 2019 (diolah)

Gambar 2.1. Hubungan Laju Pertumbuhan dan Jumlah Pekerja di Sektor Tertinggi, serta Inflasi di Kota Bogor Tahun 2013-2017

PDRB menunjukkan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sehingga terkait dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha yang tersedia. Sejalan dengan hal tersebut, tinggi rendahnya kontribusi sektor-sektor perekonomian di Kota Bogor juga dapat tergambar pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam lapangan usaha sector sector tersebut.

Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga diduga dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja di lapangan usaha ini yang terus mengalami penurunan. Menurunnya jumlah lahan pertanian di Kota Bogor menjadi salah satu penyebab rendahnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Sebaliknya Kota Bogor sebagai kota perdagangan dan jasa, maka tenaga kerja banyak terserap di sektor tersebut. Jumlah penduduk Kota Bogor yang bekerja menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Penduduk Kota Bogor yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2017

Lapangan Kerja	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	8.325	6.606	4.981	5.278	3.219
Industri Pengolahan	62.147	54.485	58.416	58.521	71.825
Perdagangan, Restoran dan Hotel	134.076	140.595	120.802	124.479	154.706
Jasa Kemasyarakatan	100.559	105.681	119.126	121.824	105.381
Lainnya (Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Angkutan, Pergudangan & Komunikasi)	98.521	107.795	97.658	96.876	113.255
Jumlah	403.628	415.162	400.983	406.978	448.386

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Berdasarkan data diketahui bahwa, pada tahun 2013-2017, jumlah penduduk yang bekerja paling banyak terdapat di sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel,

dengan proporsi yang cenderung berfluktuasi sepanjang kurun waktu tersebut. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut adalah sebanyak 134.076 atau sebesar 33,21 persen, kemudian pada tahun 2014 jumlahnya meningkat lagi menjadi 140.595 dengan proporsi menjadi 33,87 persen. Pada Tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan juga sebesar 3,88 persen, dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 154.706 jiwa dengan proporsi sebesar 34,50 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak setelah sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel adalah sektor Jasa Kemasyarakatan berturut-turut diikuti oleh sektor Lainnya, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor jasa kemasyarakatan dengan jumlah mengalami fluktuatif selama tahun 2013-2016 mengalami turun-naik, kemudian sampai tahun 2017 sebanyak 105.381 jiwa dengan proporsi menjadi 23,50 persen, tetapi tetap menjadi peringkat kedua. Sektor Lainnya sebagai sektor yang jumlah penduduk bekerjanya terbanyak ketiga, proporsinya terus meningkat selama tahun 2013- 2017, yakni dari 24,40 persen pada tahun 2013 menjadi 25,26 persen pada tahun 2017.

Sektor Industri Pengolahan menduduki posisi keempat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah sebanyak 62.147 jiwa dengan *share* sebesar 15,40 persen, kemudian pada tahun 2017 menjadi 71.825 jiwa dengan *share* menjadi sebesar 16,02 persen, terjadi kenaikan sebesar 0.62 persen. Sedangkan pada pertanian mengalami penurunan yang dratis selama tahun 2013-2017 dari jumlah 8.325 jiwa menjadi 3.219 jiwa.

2.1.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Tabel 2.6.
PDRB per Kapita Kota Bogor dan Pertumbuhannya, 2013-2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2013	25.750	10,35	22.200	4,16
2014	29.148	11,75	22.695	5,90
2015	32.365	11,04	24.033	6,11
2016	35.401	9,38	25.502	6,74
2017	38.507	8,77	27.221	6,04

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, Tahun 2018

PDRB per kapita Kota Bogor terus mengalami peningkatan selama periode 2013–2017, rata-rata mencapai lebih dari 10% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp 35.401 juta kemudian naik menjadi Rp 38.507 juta pada tahun 2017, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,77% (Tabel 4.6).

Berdasarkan data di atas, juga diketahui bahwa pendapatan per kapita berdasarkan PDRB harga berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan laju pendapatan per kapita menurun pada 2016-2017. Hal ini juga dikarenakan berbagai kondisi penurunan berbagai sektor penyusun lapangan usaha di Kota Bogor. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya PDRB per kapita mengalami pertumbuhan yang meningkat, peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Bogor secara umum.

Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mencapai Rp 22.695 juta, pada tahun 2015 menjadi Rp 24.033 juta dan pada tahun 2016 mencapai Rp 25.502 juta. Sedangkan pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Bogor mencapai Rp 27.221 juta. Dari dua kondisi di atas memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar 6,04% pada tahun 2016.

2.1.3 Analisis Sektor Basis

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor baik sektor utama maupun bukan, nantinya akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan

Pengembangan Kawasan di Kota Bogor berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga konstan tahun 2010 lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017.

a) Analisis Sektor Basis dalam Perekonomian Kota Bogor

Analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kota Bogor digunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan 2000 untuk periode 2013-2017. Pada penelitian ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kota (wilayah bawah) terhadap Provinsi (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kota Bogor dengan peran sektor-sektor tersebut di Indonesia. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi di Kota Bogor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 pada Tahun 2013-2017

Kode	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Kriteria Tahun 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,11	0,11	0,22	0,11	0,10	Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,44	0,44	0,85	0,44	0,44	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,91	7,75	13,88	6,95	4,78	Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	1,40	2,65	1,34	1,15	Basis
F	Konstruksi	1,42	1,40	2,65	1,37	1,37	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,40	1,41	2,72	1,42	1,46	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,47	4,73	2,42	2,03	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,88	1,85	3,45	1,76	1,68	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,70	3,30	1,67	2,31	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,86	2,82	5,21	2,64	2,43	Basis
L	Real Estate	1,90	1,93	3,69	1,93	2,14	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	5,21	5,05	9,61	4,96	5,02	Basis
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,31	2,43	1,24	0,99	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	1,11	1,08	2,03	1,05	1,00	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,73	3,24	1,66	1,77	Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,77	1,69	3,21	1,64	1,70	Basis

Sumber : BPS Pusat dan Kota Bogor (diolah)

Hasil perhitungan nilai LQ dari Tabel 7 di atas dari seluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan wilayah dalam kurun 5 tahun, yaitu tahun 2013-2017. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya merupakan sektor basis utama di Kota Bogor pada tahun 2013-2017.

Sektor basis adalah sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya suatu sektor telah mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Sebaliknya jika nilai LQ kurang dari satu berarti daerah yang bersangkutan termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sektor basis terbesar adalah sektor Jasa Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Jasa Perusahaan memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perekonomian Kota Bogor, serta layak untuk dikembangkan di Kota Bogor. Jika dilihat di Kota Bogor maka dapat diketahui bahwa jasa perusahaan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan berkembang sangat pesat di Kota Bogor.

Berdasarkan nilai LQ tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor telah mampu berswasembada atau setidaknya telah mampu mencukupi kebutuhannya terkait sektor basis yang ada untuk Kota Bogor sendiri dan bahkan dapat memasarkan surplus produksinya ke wilayah lain. Ekspansi yang dilakukan ke luar wilayah tersebut akan memperbesar arus pendapatan ke dalam wilayah sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan volume kegiatan sektor lainnya dan akan memperluas pendapatan wilayah secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, prioritas pembangunan sudah saatnya diberikan pada sektor sebagai sektor basis, karena telah terbukti mempunyai keuntungan lokasi berupa keadaan geografis dan agroklimat, sumberdaya alam dan faktor pendukung lainnya yang tidak dimiliki oleh sektor lainnya.

b) Analisis Shift Share Kota Bogor Analisis indeks Rasio Pertumbuhan

Rasio PDRB Kota Bogor dan PDRB Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan dalam bentuk nilai R_a , R_i , dan r_i . Jika nilai PDRB Kota Bogor dan PDRB Provinsi Jawa Barat tiap sektor diperbandingkan antara dua titik waktu, yaitu tahun 2017 sebagai tahun akhir analisis dan tahun 2013 sebagai tahun dasar analisis, maka setiap sektor mempunyai rasio yang berbeda-beda.

Nilai Ra diperoleh dari selisih antara total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dengan total PDRB Provinsi pada tahun 2013. nilai Ra tiap sektor untuk setiap daerah pada tingkat provinsi memiliki besaran yang sama, karena merupakan pembagian total PDRB, yaitu sebesar 1,64.

Nilai Ri diperoleh dari selisih antara PDRB Indonesia sektor i pada tahun 2017 dengan PDRB Indonesia sektor i pada tahun 2013 dibagi PDRB Provinsi Jawa Barat sektor i pada tahun 2013. Nilai Ri setiap sektor di Kota Bogor bernilai positif, ini berarti bahwa setiap sektor-sektor perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.8.
Nilai Ra, Ri dan ri Kota Bogor

No.	Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,64	1,66	1,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1,64	0,95	0,00
3	Industri Pengolahan	1,64	1,58	1,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	1,80	0,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,64	1,88	1,22
6	Konstruksi	1,64	1,68	1,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,64	1,52	1,23
8	Transportasi dan Pergudangan	1,64	2,16	1,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,86	1,30
10	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,69	1,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,90	1,26
12	Real Estate	1,64	1,49	1,30
13	Jasa Perusahaan	1,64	1,72	1,29
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64	1,84	1,09
15	Jasa Pendidikan	1,64	2,00	1,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	2,00	1,54
17	Jasa Lainnya	1,64	1,81	1,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,64	1,64	1,27

Sumber: BPS Kota Bogor, 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki nilai Ri terbesar yaitu sebesar 2,16. Hal ini didukung oleh tingkat pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan yang merupakan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai Ri terkecil ditempati sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 0,95.

Nilai ri dihitung berdasarkan selisih antara PDRB Kota Bogor sektor i dan pada tahun 2017 dengan PDRB Kota Bogor sektor i pada tahun 2013 dibagi PDRB Provinsi Jawa Barat sektor i pada tahun 2013. Nilai ri Kota Bogor dari masing-masing sektor bernilai positif. Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki nilai ri terbesar yaitu 1,79. Sedangkan nilai ri yang terkecil dimiliki oleh sektor Informasi dan Komunikasi yaitu dimana tidak terdapat sektor tersebut di Kota Bogor sehingga nilai ri bernilai nol.

➤ **Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah**

Analisis *shift share* diasumsikan bahwa perubahan tenaga kerja/produksi disuatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan yaitu komponen pertumbuhan regional/nasional (PR), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa komponen pertumbuhan regional semua sektor-sektor perekonomian Kota Bogor bernilai positif.

Tabel 2.9.
Komponen Pertumbuhan Regional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (Juta Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	137.450
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	2.748.469
4	Pengadaan Listrik dan Gas	623.017
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.199
6	Konstruksi	1.624.053
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.249.705
8	Transportasi dan Pergudangan	1.586.562
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	637.208
10	Informasi dan Komunikasi	680.192
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	984.393
12	Real Estate	311.904
13	Jasa Perusahaan	290.248
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	398.315
15	Jasa Pendidikan	373.227
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.923
17	Jasa Lainnya	469.882
	Produk Domestik Regional Bruto	14.286.747

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada komponen pertumbuhan regional, yaitu sebesar Rp 3.249.705 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi di Kota Bogor. Sebaliknya dari sektor-sektor yang ada di Kota Bogor, maka sektor terkecil di Kota Bogor adalah Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal ini menunjukkan Jika terjadi perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia, maka sektor pertambangan dan penggalian

dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi.

Selanjutnya Tabel 2.10 menggambarkan beberapa sektor-sektor ekonomi di Kota Bogor memberikan kontribusi yang negatif terhadap PDRB. Jika nilai PP suatu sektor ($PP_i < 0$), maka dapat diidentifikasi bahwa sektor-sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan memiliki daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan sektor lain yang PP-nya positif. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi negatif terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB Kota Bogor.

Tabel 2.10.
Komponen Pertumbuhan Proporsional Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Proporsional (Juta Rupiah)	Persen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	- 4.319,01	(0,00)
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	234.210,89	0,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	- 162.990,12	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 5.784,18	(0,00)
6	Konstruksi	- 114.560,89	(0,06)
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	603.017,50	0,30
8	Transportasi dan Pergudangan	- 1.303.928,80	(0,66)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 227.651,03	(0,11)
10	Informasi dan Komunikasi	- 59.967,39	(0,03)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 413.497,14	(0,21)
12	Real Estate	73.614,13	0,04
13	Jasa Perusahaan	- 38.835,23	(0,02)
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 126.761,55	(0,06)
15	Jasa Pendidikan	- 213.326,85	(0,11)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- 91.243,75	(0,05)
17	Jasa Lainnya	- 128.624,02	(0,06)

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi yang positif dengan persentase yang lebih dari nol ($PP_i > 0$) terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 603.017,50 Juta (30 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing yang terbaik dari pada sektor-sektor lainnya yang ada di Kota Bogor.

Komponen pertumbuhan selanjutnya adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Suatu wilayah mempunyai daya saing wilayah terhadap sektor i apabila PPW-nya positif

(PPW>0). Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa sektor yang mempunyai daya saing wilayah yang tinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.11.
Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Pertumb Pangsa Wilayah (Juta Rupiah)	Persen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	- 125.059	- 1,54
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	- 1.488.193	- 18,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-934.569	- 11,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 15.704	- 0,19
6	Konstruksi	- 1.056.890	- 13,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	- 1.455.064	- 17,93
8	Transportasi dan Pergudangan	- 2.020.944	- 24,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 563.676	- 6,94
10	Informasi dan Komunikasi	109.166	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 995.791	- 12,27
12	Real Estate	- 89.330	- 1,10
13	Jasa Perusahaan	- 195.080	- 2,40
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 468.339	- 5,77
15	Jasa Pendidikan	- 347.342	- 4,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- 113.695	- 1,40
17	Jasa Lainnya	- 336.583	- 4,15
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-8.116.445	- 100,00

Sumber: BPS Kota Bogor, 2018 (diolah)

Sektor yang mempunyai daya saing wilayah yang paling **kurang baik** adalah sektor **Transportasi dan Pergudangan**. Persentase nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah dari sektor tersebut merupakan yang terendah dibandingkan sektor lain yang nilai PPW negatif.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

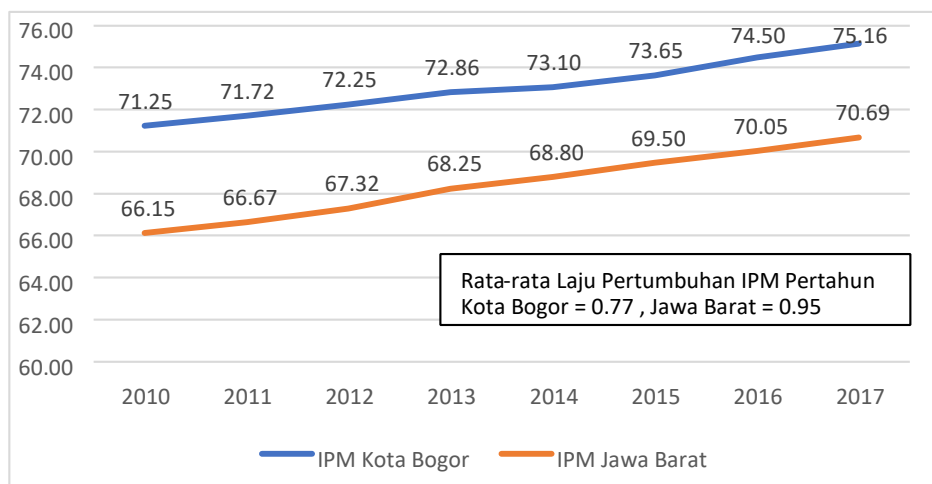
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah daerah (kabupaten/kota/Provinsi) dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Nilai IPM di Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang melambat. Hal ini dikarenakan komponen-komponen dalam menghitung IPM, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran

perkapita tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Peningkatan nilai dari tahun 2016 ke 2017, untuk AHH meningkat sebesar 0,06 persen, rata-rata lama sekolah naiknya hanya 0,01 persen, angka harapan sekolah naiknya 0,36 persen dan pengeluaran perkapita dari sebelumnya Rp10.662 di 2016 menjadi Rp 10.940 di 2017.

Nilai rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bogor pada tahun 2017 adalah 10,29. Ini berarti dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun keatas baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, rata-rata tingkat pendidikannya baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat SMA. Sedangkan angka harapan sekolah (HLS) dari sebelumnya 13,01 meningkat di angka 13,37 atau sudah tamat SMA namun tidak lanjut kuliah.

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dari 71,25 (2010) menjadi 75,16 (2017). Selama periode tersebut pencapaian nilai IPM Kota Bogor dinilai cukup baik dengan dapat meningkatkan indeks IPM sebesar 3,91 dengan rata-rata laju pertumbuhan IPM sebesar 0,77 point per tahun. Berdasarkan United Development Programme (UDP) IPM Kota Bogor masuk kategori Tinggi dengan kirsan IPM 70-80. Pencapaian IPM Kota Bogor tergolong baik bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai point 70.69 pada tahun 2017, namun bila dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata IPM nya Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bogor yaitu 0.95 pertahun (Gambar 2.2).

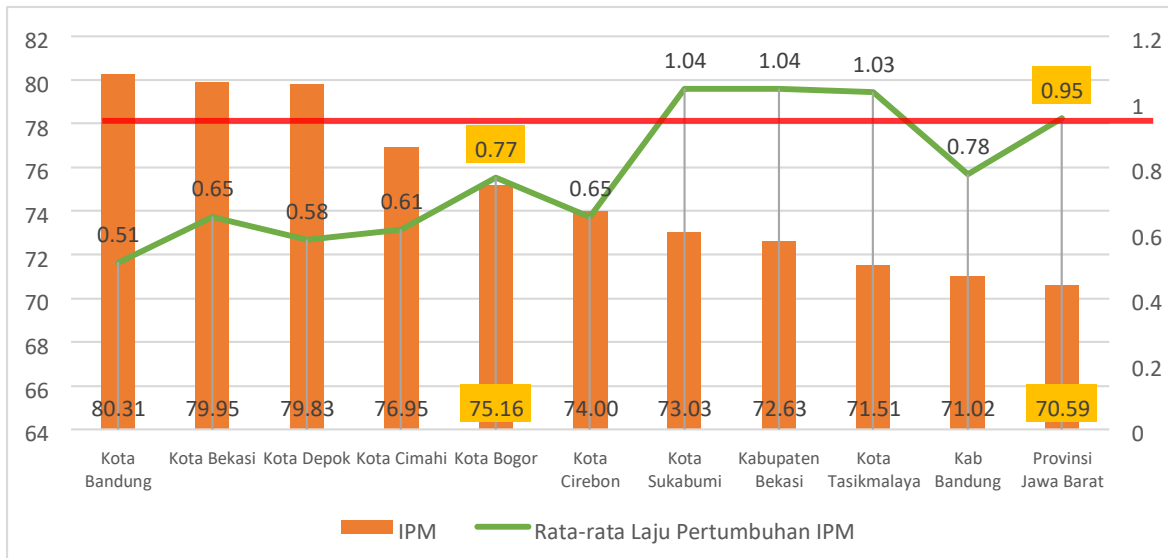


Sumber : BPS Kota Bogor dan Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.2. Perkembangan IPM Kota Bogor Periode 2010-2017

Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh Kabupaten/Kota termasuk Kota Bogor yang membantu pencapaian peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat. Peringkat IPM Kota Bogor di tahun 2013 menduduki peringkat kelima (5) se Provinsi Jawa Barat (Gambar 2.3). Akan tetapi jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Indonesia maka peringkat IPM Kota Bogor dalam periode 2014-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014, IPM Kota Bogor berada pada peringkat ke 80, kemudian meningkat menjadi peringkat 75 pada tahun 2017 dari 255 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan

perkembangan IPM di daerah lain menunjukkan perkembangan yang relatif lebih baik dibandingkan Kota Bogor. Dan ini perlu menjadi perhatian agar peringkat IPM Kota Bogor secara nasional tidak mengalami penurunan. Berdasarkan data, rata-rata laju pertumbuhan IPM Kota Bogor merupakan tinggi di atas 0.50 dibandingkan dengan 5 Kab/Kota dengan IPM tertinggi se Jawa Barat. Rata-rata laju Pertumbuhan IPM, menunjukkan jumlah peningkatan IPM pertahun dan potensi peningkatannya.

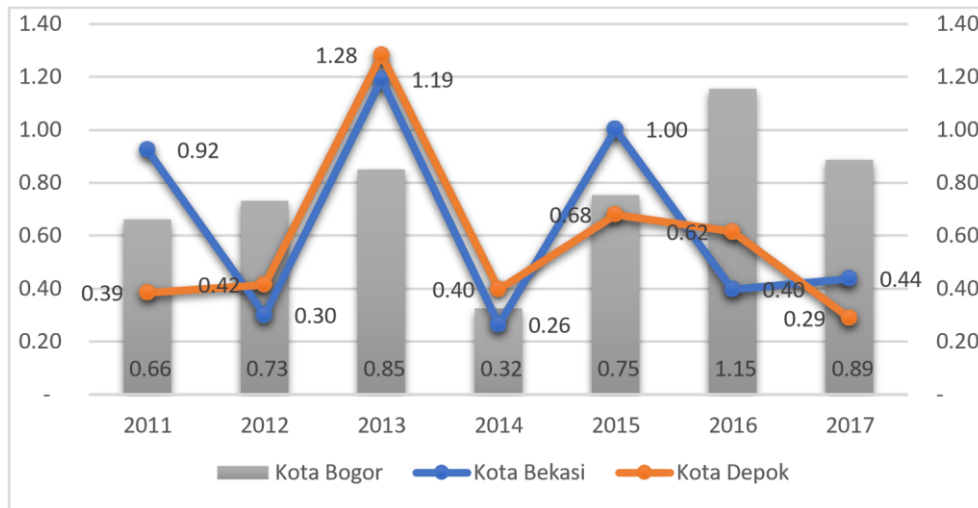


Sumber : BPS Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.3. Capaian IPM Tertinggi Kab/Kota di Provinsi Jabar Tahun 2017

Capaian angka IPM suatu daerah seperti Kota Bogor akan menentukan peringkat antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan peringkatnya akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun. Nilai reduksi *shortfall* IPM Kota Bogor memiliki percepatan yang fluktuatif dengan kecepatan peningkatan IPM tertinggi terjadi pada periode 2015-2016 sebesar 1,15. Laju pertumbuhan IPM sempat terjadi perlambatan pada tahun 2012-2014 sebesar 0.32 dibawah rata-rata percepatan 0,77 per tahun (Gambar 2.3). Hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan di Kota Bogor relatif tidak stabil dan cenderung lambat.

Bila melihat Kota Depok dan Kota Bekasi dimana memiliki kemiripan tipe kota yang serupa dengan kota Bogor yaitu kota yang berbasis jasa dan kota lingkaran luar dari Ibu Kota Negara, perbandingan IPM nya cukup jauh sekitar 5 point dimana Kota Bogor 73 point dan Kota Bekasi dan Depok berada di 78 point. Laju pertumbuhan IPM Kota Bekasi, Depok dan Bogor mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2014, kemudian meningkat hingga 2016. Tahun 2017 laju pertumbuhan IPM kembali melambat, namun Kota Bogor laju pertumbuhannya masih lebih baik (0,89) bila dibandingkan dengan kota Depok dan Bekasi yang sangat melambat sekitar 0,29 (Depok) dan 0,44 (Bekasi) (Gambar 2.4).



Sumber: BPS Kota Bogor dan Jawa Barat (diolah), 2018

Gambar 2.4. Perbandingan IPM Kota Bogor, Bekasi dan Depok Periode 2010-2017

Dengan data ini artinya dengan perkembangan kondisi perekonomian dan sosial nasional pada periode 2010-2017, Kota Bogor cenderung dapat mempertahankan percepatan pertumbuhan IPM dibandingkan Kota Depok dan Bekasi. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

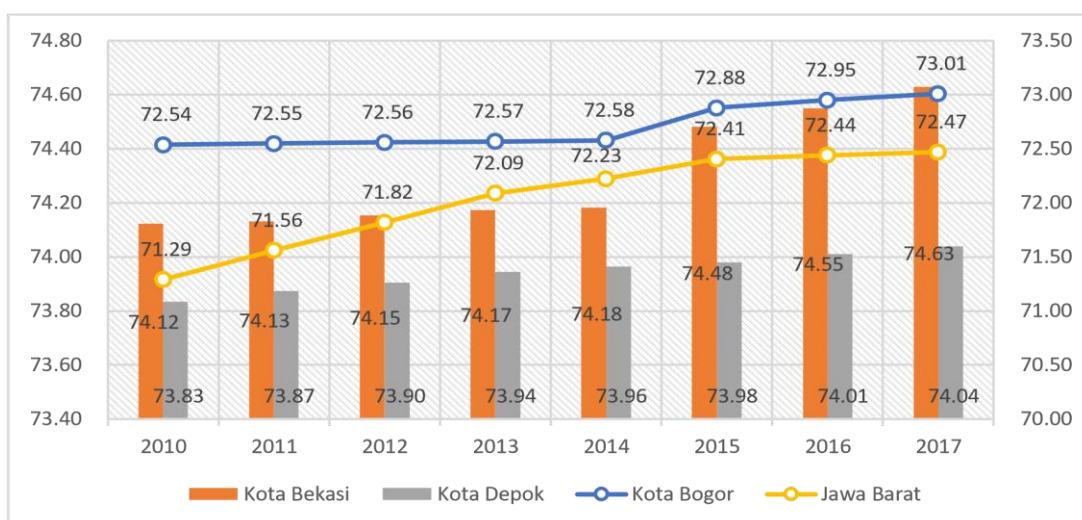
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), Pendidikan/pengetahuan, dan standar hidup layak/daya beli. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pencapaian pembangunan manusia. Lambatnya laju tingkat pertumbuhan faktor-faktor tersebut, dikarenakan adanya indikator-indikator lain yang juga membentuk faktor-faktor tersebut. Seperti usia harapan hidup masyarakat di suatu daerah, jika dalam daerah tersebut tidak memiliki tingkat sarana dan prasarana kesehatan yang baik, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa usia harapan hidup masyarakat tersebut juga akan semakin rendah dan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah. Sebagai contoh seperti dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana dan kelaparan masal.

2.2.1. Indeks Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu indikator penghitungan/pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir hingga dewasa. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu kota/kabupaten, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan suatu bangsa. Untuk dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi.

Indikator Usia Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survei atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat¹ Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor pada periode 2010-2017 mengalami peningkatan dari 72,54 (2010) menjadi 73,01 (2017), capaian kota bogor berada di atas capaian UHH Provinsi Jawa Barat sebesar 71,29 (2010) menjadi 72,47 (2017). Periode 2010-2014 UHH Kota Bogor relatif stabil di 72,54-72,58 hal ini diduga karena indikator mortalitas sebagai outcome dari indikator derajat kesehatan relatif memiliki nilai yang stabil, dimana yang sebaiknya menurun (Gambar 2.5).



Sumber : BPS Jawa Barat, 2018

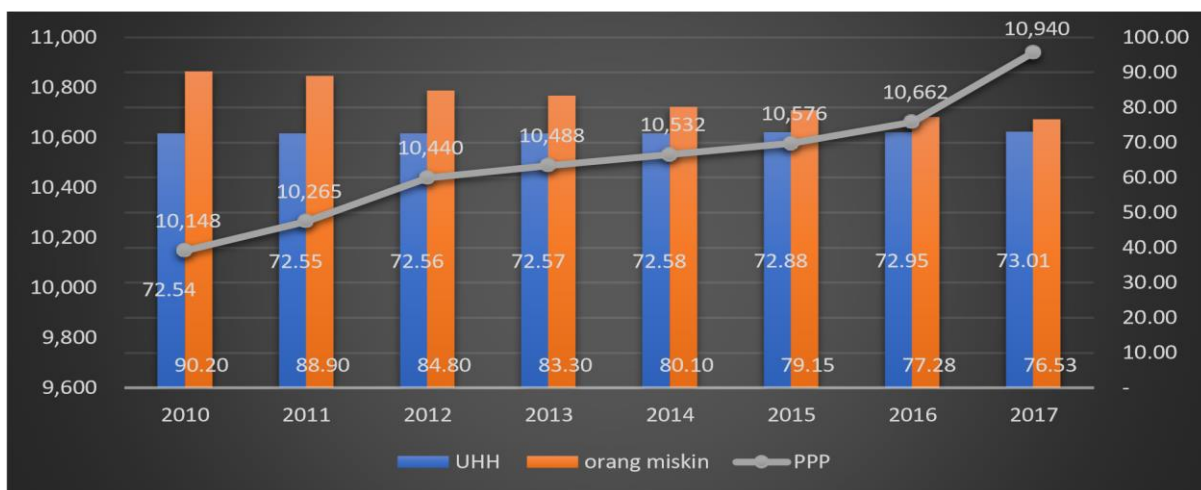
Gambar 2.5. Perkembangan UHH Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Jawa Barat Periode 2010-2017

¹ Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2010-2017

Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai UHH diatas rata rata Jawa Barat, yaitu (berurutan) Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab.Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Kuningan sebagaimana publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat². Berdasarkan data tersebut Kota Bogor menempati posisi ke 7 dari 8 Kabuaten/Kota dengan UHH tertinggi dari 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2017.

Berdasarkan Data Gambar 4.5, capaian UHH tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Bekasi 74,60 tahun dengan laju pertumbuhan 0,10 pertahun, artinya Kota Bekasi dapat menciptakan kondisi sosial dan kesehatan yang cukup baik sehingga masyarakatnya dapat memiliki peluang hidup dengan hingga usia maksimal 74-74,6 tahun.

Bila dibandingkan dengan Kota Bogor hanya terpaut 1-2 tahun yaitu 72-73 tahun. Rata-rata laju pertumbuhan UHH Kota Bogor adalah 0,09 tahun, dimana setiap tahunnya peluang hidup masyarakat Kota Bogor meningkat 0,09 tahun. Adapun demikian laju pertumbuhan UHH pertahun tingkat Provinsi Jawa Barat adalah 0,29 tahun. Pencapaian Usia Harapan Hidup, Kota Bogor selama peridoe tersebut (2010-2017), berdasarkan data turut memiliki korelasi positif oleh penurunan penduduk miskin, dan daya beli masyarakat atau *perchaing pover parity* (PPP). Gambar 4.6. Menjelaskan bahwa populasi penduduk miskin mengalami penurunan dari 90,20 ribu jiwa (2010) menjadi 76,53 ribu jiwa (2017).



Sumber : BPS Kota Bogor. 2010-2017

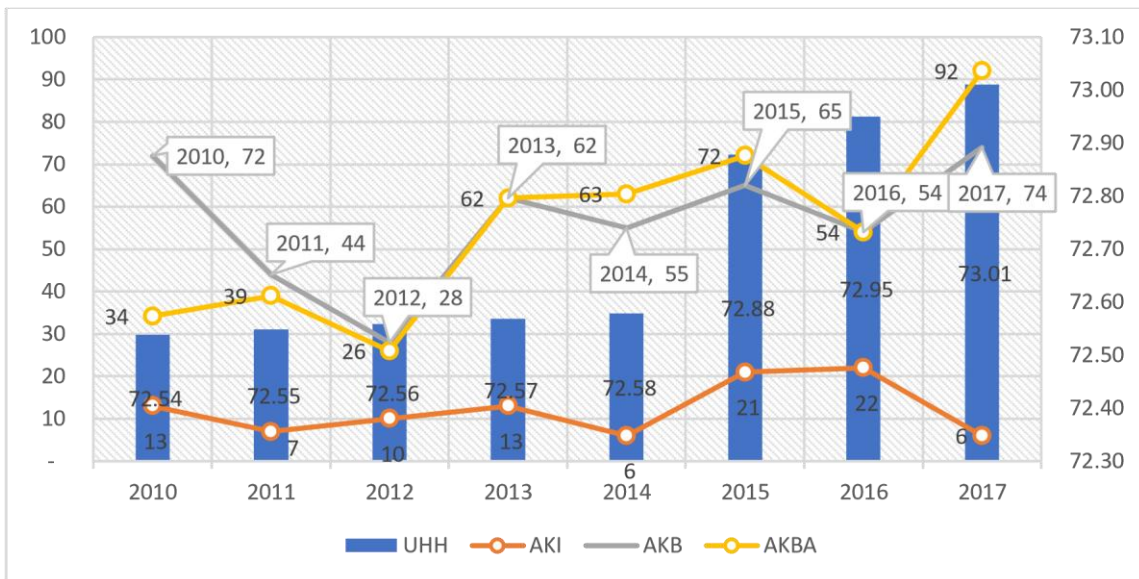
Gambar 2.6. Perkembangan UHH, Orang Miskin dan PPP Kota Bogor
Periode 2010-2017

Demikian dengan beli masyarakat atau *perchaing pover parity* (PPP), mengalami peningkatan 7.8 % dari Rp 10,148 ribu (2010) menjadi Rp 10,940 (2017). Berdasarkan data tersebut, nampaknya terdapat korelasi positif antara indikator pembangunan tersebut, dimana berkurangnya jumlah penduduk miskin dan peningkatan daya beli sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan hidup yang lebih lama. Dengan kemampuan membeli

² Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

lebih baik, masyarakat memiliki daya untuk membeli produk konsumsi dan pengobatan yang lebih baik. Hubungan yang positif antara UHH, Kemiskinan dan PPP bukan menjadikan indikator tersebut menjadi indikator pembentuk UHH, namun dalam perencanaan pembangunan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi tersebut.

Pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) tidak lepas dari Indikator Derajat Kesehatan lainnya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) suatu daerah. Indikator-indikator tersebut adalah indikator dasar pembentuk UHH individu manusia di suatu daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat² perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Bogor mengalami penurunan secara jumlah (Gambar 2.7). Selama tahun 2010 telah terjadi kasus 13 kematian ibu dari 1000 populasi Ibu Hamil/Melahirkan/Menyusui yang kemudian turun menjadi menjadi 6 kasus kematian ibu pada tahun 2017. Meskipun angka kematian ibu cenderung menurun, namun kasus kematian Bayi dan Balita masih cukup tinggi.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2010-2017

Gambar 2.7. Perkembangan UHH, AKI, AKB dan AKBA Kota Bogor Tahun 2010-2017

Kasus Kematian Bayi (AKB) Kota Bogor sebenarnya cenderung turun pada 2012 (28 kasus per 1000 kelahiran bayi) dimana pada 2010 mencapai 72 kasus, namun pada tahun 2013 langsung meroket tajam menjadi 62 kasus. Kasus kematian Balita di Kota Bogor tergolong tinggi dengan rata-rata 55 kasus kematian pada periode 2010-2017. Kasus kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2010 (72 kasus), tahun 2015 (72 Kasus) dan tertinggi tahun 2017 (92 kasus kematian). Rasio kasus kematian Balita dengan jumlah bayi di Kota Bogor adalah 0,28 % sedangkan bila dibandingkan dengan Kota Depok (0,26 %) dan Kota Bekasi (0,10%).

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian merupakan indikator *outcome* pembangunan kesehatan. Angka kematian dapat menggambarkan seberapa tinggi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pada dasarnya penyebab kematian ada yang langsung dan tidak langsung, walaupun dalam kenyataannya terdapat interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kematian di masyarakat. Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain. Di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat beberapa faktor penyebab kematian perlu mendapat perhatian khusus, diantaranya yang berhubungan dengan kematian ibu dan bayi yaitu besarnya tingkat kelahiran, umur masa paritas, jumlah anak yang dilahirkan serta penolong persalinan. Indikator kematian yang paling sering digunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (AKBA).

Tabel 2.12.
Perkembangan Derajat Kesehatan Kota Bogor Periode 2010-2017

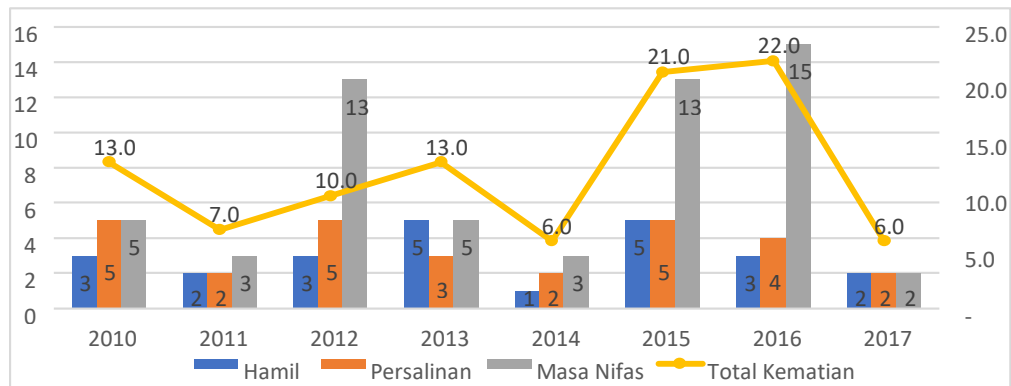
No. Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Balita (AKBA)
1 2010	72,54	13	72	34
2 2011	72,55	7	44	39
3 2012	72,56	10	28	26
4 2013	72,57	13	62	62
5 2014	72,58	6	55	63
6 2015	72,88	21	65	72
7 2016	72,95	22	54	54
8 2017	73,01	6	74	92
Min	72,54	6	28	26
Max	73,01	22	74	92
Rata-Rata	72,70	12	57	55

Sumber: Profil Kesehatan Jawa Barat 2010-2017

Rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) periode 2010-2017 adalah 12 orang pertahun, dengan rata-rata kematian bayi (AKI) 0-1 Tahun 57 kasus kematian per 100,000 kelahiran bayi di Kota Bogor. Adapun Angka Kematian Rata-rata Balita (1-5 tahun) mencapai 55 balita per tahun, dengan terjadi peningkatan signifikan sebesar 58% dari tahun 2010 (34 kasus) menjadi 92 kasus pada tahun 2017. Angka Kematian Balita sempat turun tajam pada tahun 2016 menjadi 54 kasus dimana sebelumnya 72 kasus pada tahun 2015 (Tabel 4.12). Tinggi atau rendahnya Angka Kematian Ibu mempengaruhi peluang seorang hidup bayi hidup setelah kelahirannya sebagaimana faktor pendukungnya seperti kecukupan ASI, imunisasi dan asupan gizi.

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan. Cakupan persalinan adalah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, angka cakupan ini menggambarkan tingkat penghargaan masyarakat terhadap tenaga penolong persalinan dan manajemen persalinan KIA dalam memberikan pertolongan persalinan secara professional.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2010-2017

Gambar 2.8. Perkembangan Kematian Ibu di Kota Bogor periode 2010-2017

Pada tahun 2014 kasus kematian ibu maternal sebanyak 6 kasus, dan meningkat signifikan pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus dan tahun 2016 sebanyak 22 kasus dari 20.000 kelahiran hidup yang tercatat, bila dikonversikan ke dalam angka kematian ibu setara dengan 105 per 100 ribu kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, dengan penyebab kematian sebagai berikut: perdarahan 8 kasus (36%), Hipertensi dalam kehamilan 1 kasus (5%), Penyakit jantung & peredarah darah 7 kasus (32%), penyebab lain 6 kasus (27%) (Dinas Kesehatan. 2017³). Penyebab lain ini terdiri dari TB Paru 1 kasus, Lupus 1 kasus, Ileus 1 kasus, Hepatitis 1 kasus dan asma 2 kasus. Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebab langsung yang berkaitan dengan kasus kebidanan yaitu perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan masih tinggi. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU). Penyebab lain yang merupakan penyakit penyerta pada ibu hamil juga tinggi. Hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian.

Pola kematian ibu di Kota Bogor terjadi pada saat masa nifas (60,20%), Persalinan (38,57%) dan waktu hamil (24,49%). Adapun pola kematian ibu di Jawa Barat adalah Persalinan (60,87%), Masa Nifas (30,34%) dan waktu hamil (8,70%). Cukup rendahnya tingkat kematian saat persalinan dibandingkan Jawa Barat dikarena jumlah ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh Tenaga Kesehatan Profesional (Dokter, Bidan dan

³ Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2016

Paramedis) mencapai 94% dari 20,194 persalinan. Hal ini sejalan dengan data mengenai jumlah kematian ibu dari laporan sarana pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari sudut pendidikannya, maka diduga terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan perempuan dengan besarnya Angka Kematian Ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu elemen kunci penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini penting untuk memastikan ibu melahirkan di tempat yang sesuai, di mana peralatan penyelamatan hidup dan kondisi persalinan yang higienis akan membantu ibu dan bayinya terhindar dari risiko komplikasi yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu (Kesterton et al., 2010).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup), selain itu berguna untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neo-natal Berdasarkan kesepakatan internasional AKB merupakan indikator yang menggunakan konsep *rate*, meskipun dalam kenyataannya hanya *ratio*. Angka kematian bayi dan balita juga dapat mencerminkan pola kesehatan suatu daerah, sebab propabilitas peluang hidup bayi (<1 tahun) hingga Balita (1-5 tahun) di suatu kota. Berdasarkan data angka kelahiran selamat dan angka kematian bayi periode 2010-2017, Kota Bogor dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Depok memiliki rata-rata kematian bayi (AKB) yang lebih tinggi. Rata-rata pertahun kematian bayi (<1 tahun) di kota bogor adalah 57 bayi dari 1000 bayi yang lahir selamat. Artinya setiap tahun berpeluang wafatnya 1 bayi (<1 tahun) setelah kelahiran yang disebabkan oleh beberapa hal cukup tinggi sekitar 2,91 kasus per 1000 kelahiran hidup (Tabel 2.13).

Tabel 2.13.
Perkembangan Bayi Lahir Hidup dan Angka Kematian Bayi Kota Bogor, Bekasi, dan Kota Depok Periode 2010-2017.

Tahun	Kota Bogor			Kota Bekasi			Kota Depok		
	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas	Bayi Lahir Hidup	AKB	Probalitas
2010	20.271	72	3,69	41.516	41	0,87	34.856	114,83	2,89
2011	18.552	44	2,25	45.456	43	0,90	37.130	110,33	2,77
2012	19.999	28	1,43	47.050	47	0,98	40.381	114,00	2,87
2013	18.852	62	3,17	43.809	32	0,67	42.554	113,00	2,84
2014	19.751	55	2,82	48.891	47	0,98	38.597	83,00	2,09
2015	19.012	65	3,33	58.114	76	1,59	40.186	62,00	1,56
2016	19.339	54	2,76	50.620	48	1,00	41.905	92,00	2,31
2017	20.502	74	3,79	47.065	52	1,09	42.665	72,00	1,81
Rata-rata	19.535	57	2,91	47.815	48	1,01	39.784	95,15	2,39

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2018)

Perkembangan angka kematian bayi di Kota Bogor sangat fluktuatif dan cenderung meningkat dimana tahun 2010 terjadi 72 kasus hingga tahun 2017 menjadi 74 kasus kematian. Angka kematian sempat turun tahun 2011 dan 2012 yaitu 44 dan 28 kasus, namun kembali meningkat dan cenderung konstan di angka 50-60 kasus pertahunnya. Proporsi kematian kematian bayi berasal dari bayi usia 0-28 hari (Neonatal) sebesar 84,63% atau 2,91/1000 kelahiran hidup. Distribusi penyebab kematian bayi (AKB) usia 0-28 tertinggi adalah 1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 26 kasus (40,6%), 2) Asfiksia 20 kasus (32,3%) dan 3) infeksi sebanyak 7 kasus (11,3 %), icterus 3 kasus (4,7%) dan dan lainnya seperti kelainan bawaan, diare, thalasima dan aspirasi pneumonia (12,5%) (Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2017⁴).

Berdasarkan jumlah rata-rata bayi/balita di ketiga kota tersebut, Kota bogor masih lebih tinggi tangka kemungkinan terjadinya kasus kematian bayi usia 0-28 hari (Neo-natal) dengan probalitas kematian 2,91/1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat dari jumlah bayi Kota Bogo memiliki rata-rata 20 ribuan Balita sedangkan Kota Bekasi dan Kota Depok berada 40 ribuan balita. Sehingga bila diasumsikan jumlah balita sama (40 ribuan), dengan probablitas tersebut maka jumlah kasus kematian Balita Kota Bogor akan meningkat menjadi 110 kasus kematian atau 5,61/1.000 kelahiran hidup dan ini melebihi rata-rata kematian balita di Jawa Barat yang hanya 4,88 /1.000 kelahiran hidup.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus pemerintah kota bogor sebab, anakanak ini adalah masa depan kota bogor dalam 10-25 tahun mendatang akan diketahui hasil

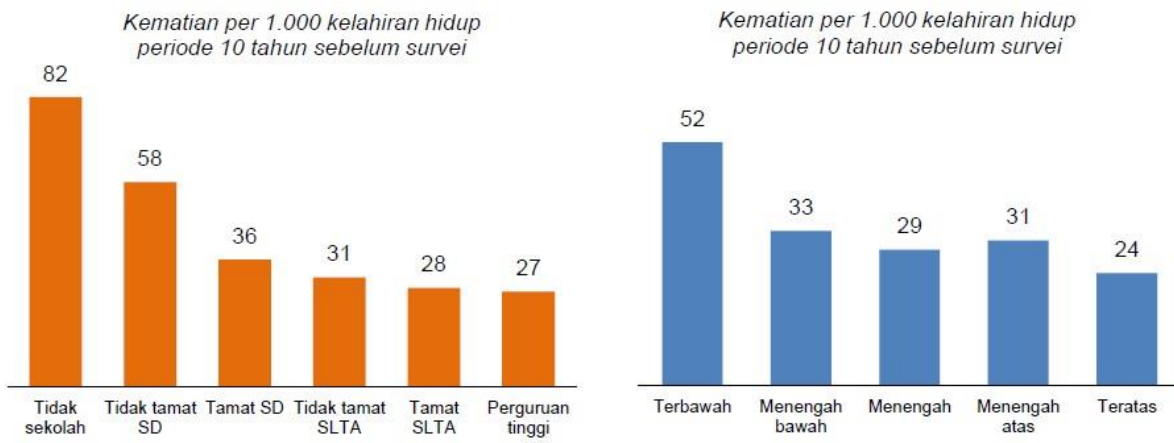
⁴ Profil Kesehatan Kota Bogor 2017

dari program pembangunan saat ini. Pemerintah Kota Bogor disarankan dalam penanganan AKB lebih difokuskan pada Bayi Baru Lahir. Walaupun demikian Angka Kematian Bayi di Kota Bogor sebesar 3,73/1.000 kelahiran hidup, sudah jauh melampaui target MDGs yang pada tahun 2015 harus sudah mencapai 17/1.000 kelahiran hidup dan target Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018 dengan target 24 per 1.000 kelahiran hidup (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014) 24 per 1.000 kelahiran hidup. Kota Bogor dan lima kabupaten/kota lainnya (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kota Depok) proporsi kematian bayi dibawah rata rata di Provinsi Jawa Barat.

Angka Kematian Balita (AKBA)

Anak balita adalah masa anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 12 sampai 59 bulan. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan kepandaian dan pertumbuhan intelektual. Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi), Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anakanak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, berdasarkan Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, semua indikator kematian anak menunjukkan bahwa kematian pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Kematian anak yang terjadi dari keluarga dengan kelas kekayaan terbawah 2 kali lebih tinggi dibanding anak dari keluarga dengan kelas kekayaan teratas, dan faktor Pendidikan ibu berperan terhadap tingkat kematian anak. AKBA paling tinggi terjadi di antara balita dari ibu yang tidak sekolah (82 per 1.000 kelahiran hidup). AKBA di antara anak dari ibu yang tidak sekolah, tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak dari ibu yang lulus perguruan tinggi (SDKI, 2017).

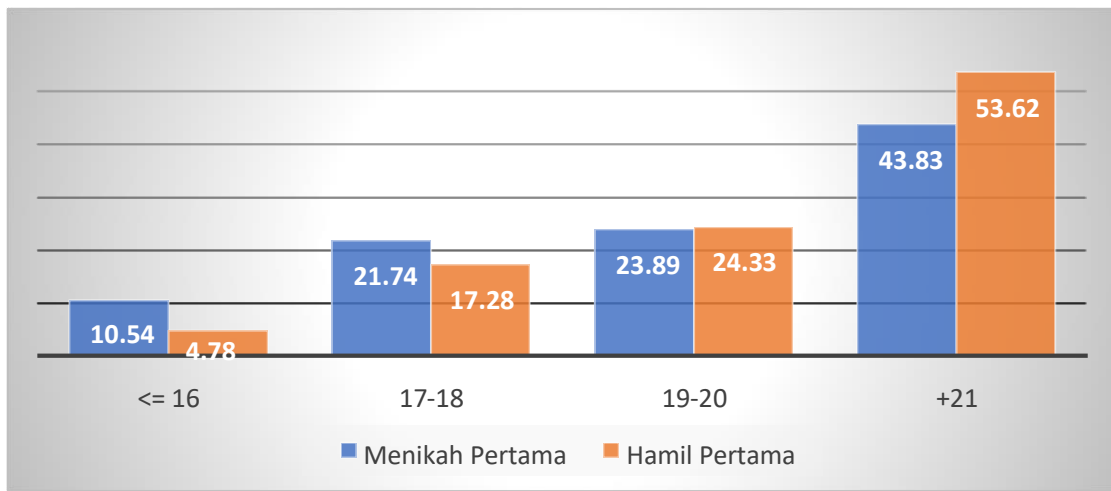


Sumber : Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017

Gambar 2.9. Perkembangan Kematian Balita Menurut Pendidikan Ibu Dan Kelas Ekonomi/Kekayaan Keluarga (2007-2017)

Berbagai faktor risiko kematian bayi dan anak dipengaruhi oleh karakteristik ibu dan anak dan keadaan kelahiran. Angka kematian anak berdasarkan faktor risiko bio-demografi, yaitu umur saat bersalin, jarak kelahiran dan urutan kelahiran. Anak yang lahir dengan jarak antar kelahiran yang lebih panjang mempunyai risiko kematian yang lebih rendah. Sebagai perbandingan, angka kematian Balita yang lahir dengan jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun adalah 67 per 1.000 kelahiran hidup, sedang untuk bayi yang lahir empat tahun atau lebih setelah kelahiran sebelumnya adalah 30 per 1.000 kelahiran hidup.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh penting dalam tinggi rendahnya kesehatan atau kematian dalam keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh ibu, maka semakin mudah seseorang tersebut akan menerima hal yang baru mengenai kesehatan dirinya dan keluarganya (anak dan suaminya). Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh ibu, maka semakin sulit orang tersebut menerima informasi baru. Berdasarkan Data SDKI 2017, ibu yang memiliki pendidikan tidak sekolah/tidak tamat cenderung memiliki anak lebih dari 4-6 dengan jarak antar kelahiran 2 dan <2 tahun. kondisi tersebut menimbulkan pengalihan fokus ibu dari yang harus diberikan kepada anak balita yang masuk usia ke 2- 3 tahun kepada anak bayinya yg baru lahir <0 tahun. Dengan fokus ibu yang beralih, di tambah faktor ekonomi keluarga yang memiliki kecenderungan menengah bawah dan terbawah menjadi indikasi penyebab semakin tinggi rentang kematian balita tinggi pada kategori tersebut.



Sumber : Susesna 2016 (BPS)

Gambar 2.10. Persentase Usia Pernikahan dan Kehamilan Pertama Perempuan berusia > 10 Tahun di Kota Bogor Tahun 2016

Bila dibandingkan dengan Kota Bogor, berdasarkan data Susenas 2016 (Gambar 4.10) rata-rata penduduk Kota Bogor yang tercatat hingga tahun 2016 melakukan pernikahan dini < 25 tahun relatif tinggi. Berdasarkan data, penduduk yang menikah pada usia aktif sekolah < 18 tahun mencapai 32,28 % (10,54 usia <= 16 dan 21,74 usia 17-18), dimana 4,78 % hamil pertama pada usia <= 16 tahun dan 17,28 % hamil pertama pada usia 17-18. Dengan demikian rata-rata Ibu yang hamil dan menyusui di Kota Bogor tercatat memiliki pendidikan min SMP/SMA (berdasarkan usia aktif sekolah) mencapai 32,28 % dari jumlah populasi wanita di Kota Bogor. Kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat usia pernikahan dini di kota Bogor masih relatif tinggi, hal ini mempengaruhi nilai/angka partisipasi sekolah maupun tingkat pendidikan pada angkatan kerja.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi rasa ingin tahu seorang ibu terkait kondisi yang sedang dialami anaknya. Dengan perkembangan teknologi, memungkinkan seorang ibu yang memiliki pendidikan lebih baik mengakses informasi kesehatan yang dilakukan pemerintah. Adapun ibu yang memiliki pendidikan rendah cenderung menunggu dan mencari informasi dari sekitar lingkungan keluarga saja dan tidak berkeinginan mencari keluar zona keluarga. Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan yang dekat dengan tingkat pendapatan atau ekonomi keluarga, semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki peluang tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun PPP Kota Bogor cenderung naik, namun nampaknya pengalihan pengeluaran untuk kesehatan masih rendah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi lainnya, yang mungkin ini menyebabkan angka kematian balita masih cukup tinggi.

Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Imunisasi Bayi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau

resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya.

Imunisasi adalah kebijakan dan program yang dapat dan perlu dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya peningkatan kesempatan hidup (UHH) bayi yang baru lahir hingga dewasa nantinya. Tujuan dari diberikannya suatu imunitas dari imunisasi adalah untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu seperti Hepatitis B, Campak, Polio, Difteri, Tetanus, Batuk Rejan, Gondongan, Cacar Air, TBC, dan lain sebagainya. Imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit berbahaya. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Tabel 2.14.
Pencapaian Upaya Imunasi Bayi Kota Bogor Periode 2008-2017

No.	Tahun	Capaian Imunisasai (%)				
		HB 0	BCG	DPT/HB III	Campak	Polio 4
1	2008	82.87	98.08	90.65	93.99	88.68
2	2009	90.19	105.74	100.12	101.44	98.43
3	2010	91.91	106.76	100.64	92.59	96.58
4	2011	96.58	100.56	96.37	95.25	93.24
5	2012	101.42	107.44	99.90	98.71	99.91
6	2013	75.90	98.03	86.00	89.21	94.98
7	2014	98.66	97.76	96.07	93.30	93.30
8	2015	96.21	97.53	95.82	95.37	96.92
9	2016	96.24	98.65	94.99	92.98	95.86
10	2017	96.17	98.77	94.49	92.63	92.42
Rata-Rata		92.62	100.93	95.51	94.55	95.03

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2017

Upaya pemerintah Kota Bogor, mendorong imunisasi bayi tergolong sangat baik dimana rata-rata capaian pemberian imunisasi bayi mencapai 95,73 % dari jumlah 19.701 bayi di Kota Bogor. Berdasarkan Tabel 4.14. Capaian tertinggi adalah Imunisasi BCG 100%, dan terendah adalah HB < 0 (92,62 %), hal ini sangat miris dan membingungkan sebab jarak pemberian HB > 0 th dan BGC berdekatan. Pemberian HB < 0 biasa diberikan maksimum 1 bulan setelah lahir bahkan beberapa rumah sakit diberikan sebelum bayi pulang atau maksimum 1 minggu setelah lahir. Berdasarkan data tersebut sebagian besar penduduk kota bogor sudah sadar terhadap pentingnya imunisasi. Namun pemerintah harus terus mendorong pemberian imunisasi kepada

anak melalui berbagai promkes di puskesmas dan posyandu, sehingga masyarakat lebih teredukasi akan penting dan manfaat imunisasi pada bayi dan masa depannya.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif.

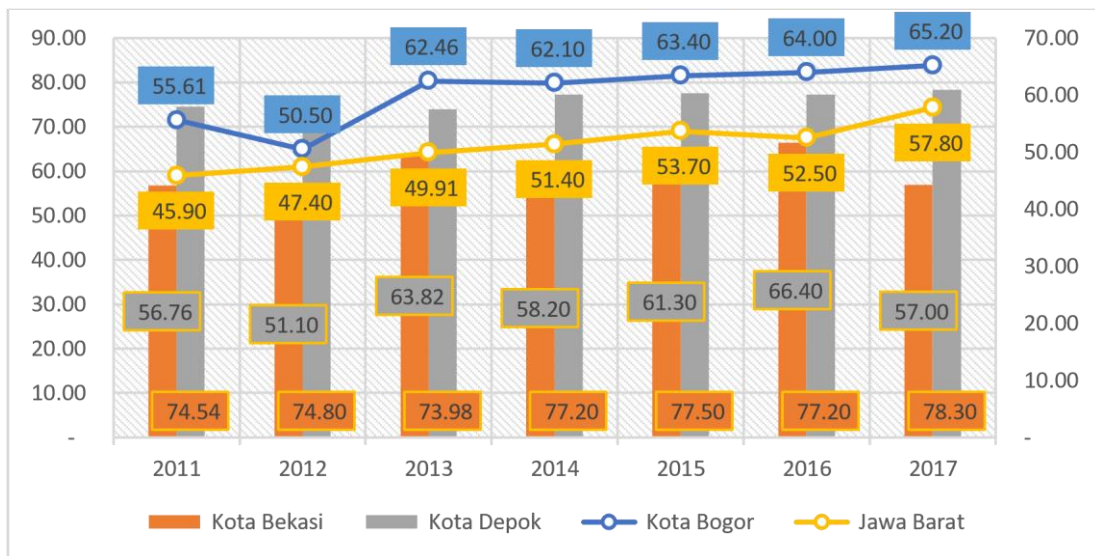
Desa/kelurahan/ siaga aktif adalah desa/kelurahan/ yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah Rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu 1) pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 2) bayi diberi ASI eksklusif, 3) balita ditimbang setiap bulan, 4) menggunakan air bersih, 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6) menggunakan jamban sehat, 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu, 8) makan sayur dan buah setiap hari, 9) melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok di dalam rumah. Apabila dalam Rumah Tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada balita, maka pengertian Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator. Kriteria rumah tangga dengan PHBS baik adalah rumah tangga yang memenuhi indikator baik, sebesar 6 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang punya balita dan 5 indikator atau lebih untuk rumah tangga yang tidak mempunyai balita

Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. Program PHBS adalah upaya untuk pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat turut menangani masalah di bidang kesehatan serta berperanaktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS mencakup tatanan Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Jawa Barat periode 2010-2017 (Gambar 2.11), Kota Depok merupakan kota dengan populasi keluarga ber-Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Adapun Kota bogor berada di peringkat 7 dari 10 Kabupaten/Kota yang memiliki populasi

keluarga ber-Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Berdasarkan cakupan jumlah keluarga yang dipantau secara rata-rata (2010-2017) di ketiga kota tersebut, populasi yang terpantau terbanyak adalah kota Bogor 60,27% keluarga, Kota Depok 78,30% dan Kota Bekasi 31,12% sedangkan se-Jawa Barat hanya 55,61 keluarga yang dipantau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat nya.



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.11. Persentase Rumah Tangga / Keluarga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Bogor dan Depok Periode 2010-2017

Sebagai perbandingan dengan yang terbaik (Kota Depok), Kota Bogor secara jumlah keluarga yg dipantau sudah mencapai 100% pada tahun 2017, namun pencapaian indikator PHBS yang mengalami peningkatan yang lambat sekitar 0,69 % pertahun. Bila berdasarkan 10 Indikator atau 7 Indikator PHBS (tanpa ibu melahirkan, bayi dan balita), nampaknya terdapat beberapa indikator sudah belum mencapai angka maksimal, sebagai contoh Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)⁵ pada tahun 2017 Kota Bogor Hanya 65,7 % dimana Kota Depok 84,2%, Kota Bekasi 97,3% dan rata-rata Jawa Barat 69,6%.

Berdasarkan tingkat pengeluaran per-kapita keluarga, semakin sejahtera tingkat sosial ekonomi keluarga semakin besar proporsi pencapaian keluarga bersih dan sehat. Penerapan PHBS di rumah tangga diharapkan mengurangi risiko terjadinya kematian bayi karena tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan ASI. Pencegahan penyakit degeneratif dengan berolah raga, mengkonsumsi makanan bergizi. Pencegahan penyakit pernafasan dengan tidak merokok dan tinggal di tempat yang tidak terlalu padat hunian. Ketersediaan air bersih, jamban dan lantai mengurangi risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan lain-lain.

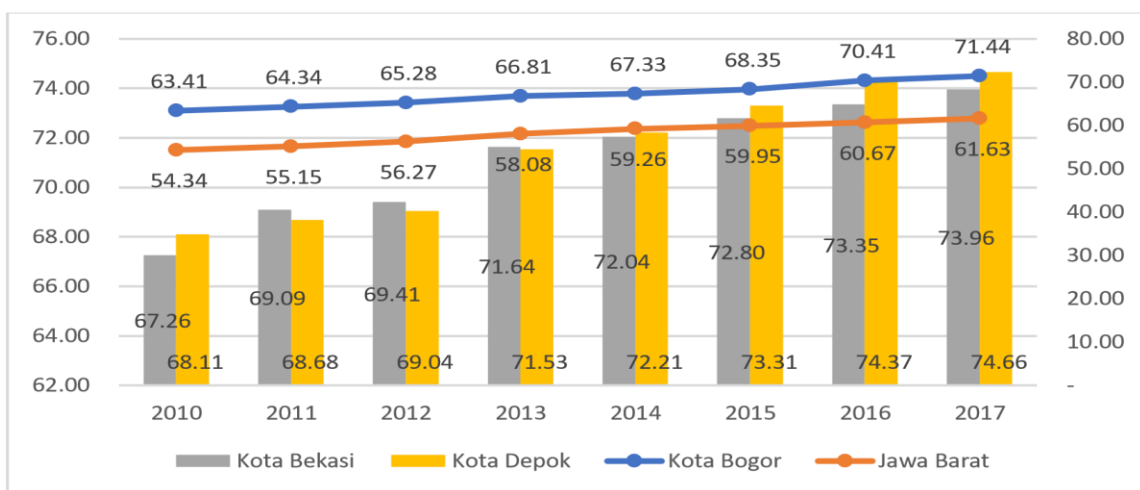
⁵ Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2018

2.2.2. Indek Pendidikan

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan yang semakin tinggi merupakan cerminan kualitas manusia yang secara langsung dapat memberikan peluang kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah khususnya pembangunan sumberdaya manusia melalui dimensi pengetahuan menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks pendidikan yang merepresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.



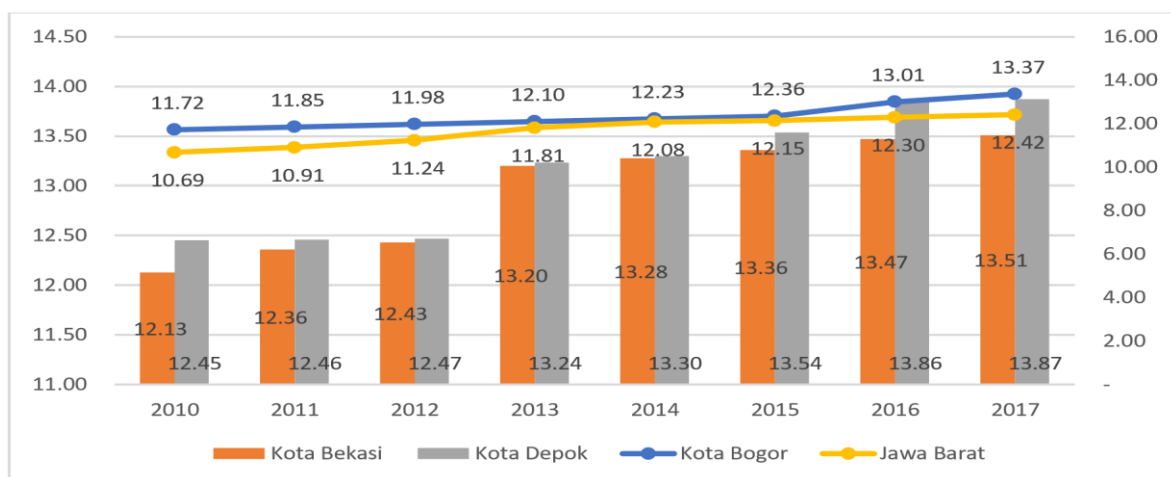
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.12. Capaian Indeks Pendidikan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2017

Berdasarkan capaian Indeks Pendidikan Kota Bogor (67,17) sudah diatas rata-rata Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu 58,17 (Gambar 2.12). Meskipun demikian capaian Kota Bogor masih dibawah capaian Kota Bekasi (71,19) dan Kota Depok (71,49). Dengan Kondisi Geografis dan Demografis yang serupa bahkan dengan model kota yang sama (kota berbasis jasa), menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menggenjot Indeks Pendidikan menjadi setara di level 70 an.

Capaian Indeks Pendidikan sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa, Indeks Pendidikan merepresenstasikan dimensi Pendidikan Dasar hingga Menengah yang disediakan

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat usia sekolah. Sebagaimana upaya pemerintah pusat mendorong indeks Pendidikan dengan meningkatkan program belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).



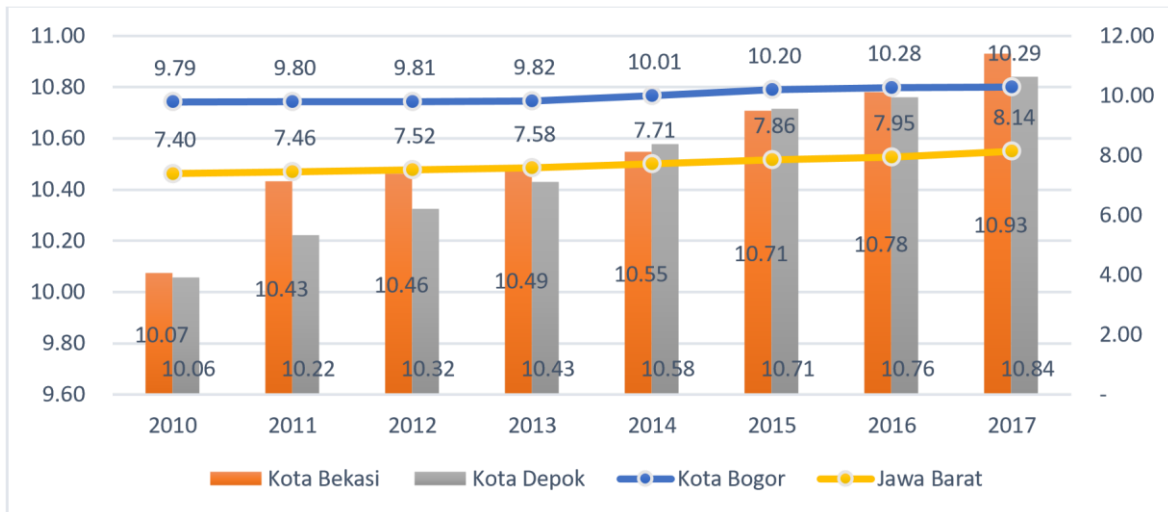
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.13. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan RataRata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah sebagaimana tersedia dan memungkinkan untuk diikuti. Berdasarkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama periode 2010-2017 mengalami peningkatan yang cukup baik dari 11,72 tahun (2010) menjadi 13,37 (2017) (Gambar 2.13). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan capaian HLS 12,33 tahun, menggambarkan pembangunan secara sistem pendidikan di Kota Bogor sudah mengarahkan dan memungkinkan anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur yang sama dengan waktu yang sesuai untuk menempuh jejang pendidikan.

Capaian HLS Kota Bogor pada periode 2010-2017 sudah berada diatas Provinsi Jawa Barat, namun masih berada di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Bekasi dan Kota Depok sudah mencapai 13 tahun sejak 2013, adapun Kota Bogor baru mencapai 12,10 pada tahun tersebut. Meskipun demikian laju pertumbuhan HLS Kota Bogor relatif lebih baik (0,24 tahun) dibandingkan dengan Kota Bekasi (0,20 tahun) dan Kota Depok (0,20 tahun), sehingga Kota Bogor dapat mengejar hingga 13,37 (2017).

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat (berbagai usia) di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani oleh penduduk Kota Bogor. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. (Tobing dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Gambar 2.14. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RSL) di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

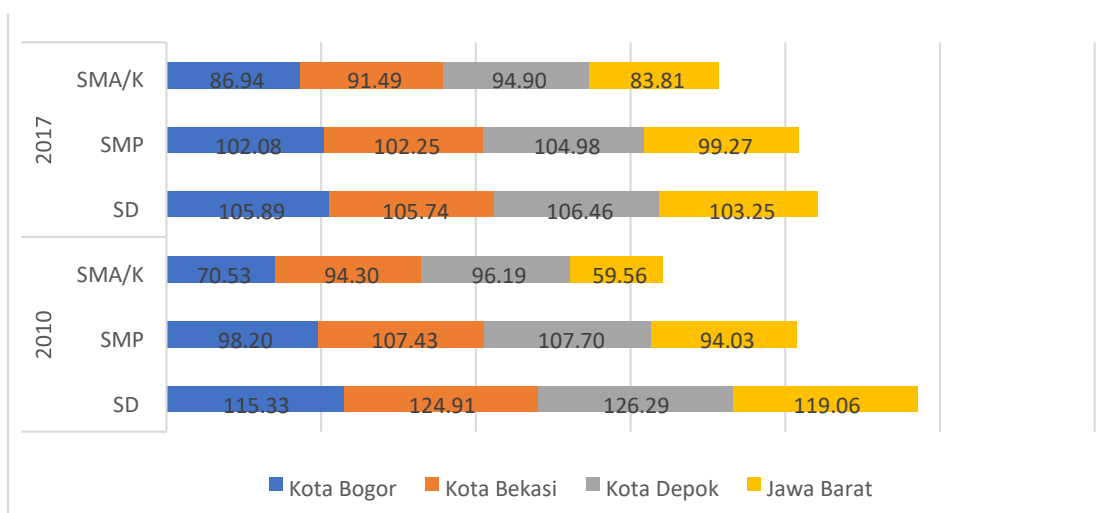
Secara sistem (HLS) sudah mengarah pada pencapaian wajib belajar 12 tahun, namun Rata-rata Lama Sekolah (RSL) penduduk Kota Bogor masih belum mencapai waktu wajib belajar tersebut. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) periode 2010-2017 penduduk Kota Bogor selama rentang usia 7 - 18 tahun (usia sekolah) masih dibawah wajib belajar 12 tahun sekolah atau 10 tahun (Gambar 4.14). Dengan angka capaian RLS ini rata-rata Pendidikan masyarakat Kota Bogor hanya sampai tamat Sekolah Menengah Pertama atau *Drop Out* Sekolah Menengah Atas (kelas 11). Meskipun demikian capaian RLS Kota Bogor masih diatas rata-rata provinsi Jawa Barat (7,70 tahun), namun masih sedikit lebih rendah dari Kota Depok (10,45) dan Kota Bekasi (10,55).

Bila dibandingkan dengan Kota Depok (HLS = 13,15 tahun, RLS = 10,49) dan Bekasi (HSL = 12,97 tahun, RSL = 10,45), Kota Bogor masih harus mengejar ketertinggalan ini, meskipun di tataran jawa barat sudah diatas rata-rata. Kota Bogor juga harus mendorong pencapaian wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warganya sebab atas capain tersebut, Kota Bogor masih belum dapat memberikan peluang yang lebih kepada warganya untuk mengenyam pendidikan, meskipun cukup banyak program-program yang mendorong terciptanya kesempatan itu seperti BOS, dan Beasiswa lainnya.

Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah adalah ukuran daya serap **lembaga pendidikan** terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator berikutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi prosentasi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang penduduknya (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tersebut.

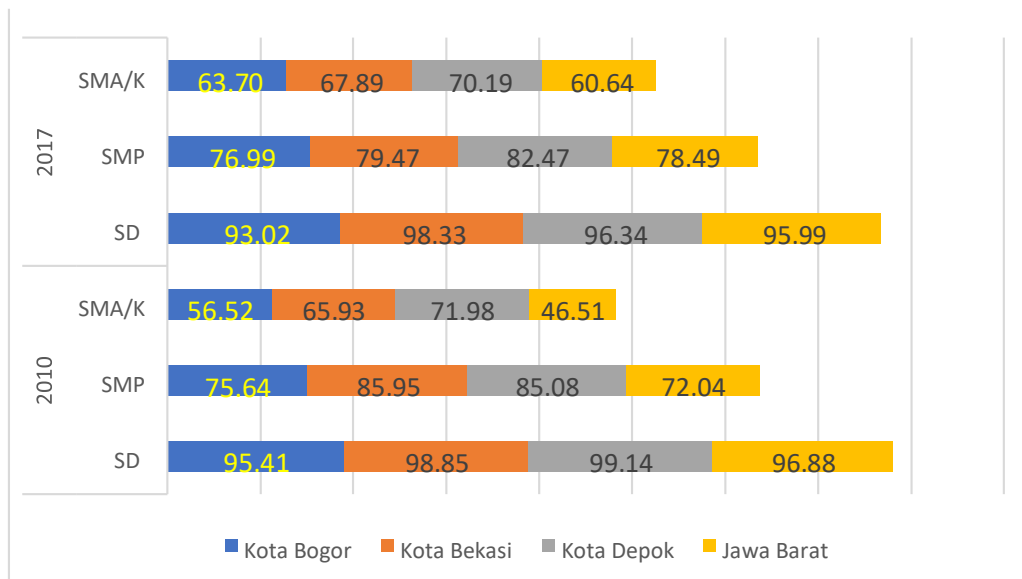


Sumber : Kemedikbud. 2019

Gambar 2.15. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Perbandingan capaian APK Kota Bogor pada tahun 2010 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian Kota Bogor sudah lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, namun bila dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Depok, Kota Bogor masih relatif tertinggal (Gambar 4.15). Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar secara umum (Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat) mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2017. Capaian APK Pendidikan Dasar pada tahun 2017 Kota Bogor relatif lebih baik (105,89) dibandingkan dengan Kota Bekasi (105,74) dan masih sedikit lebih rendah dari Kota Depok (106,46). Adapun capaian APK pendidikan Menengah (Pertama dan Atas), Kota Bogor (102,08 (SMP), 86,94 (SMA)) masih lebih rendah dari Kota Depok (102,25 (SMP), 91,45 (SMA)) dan Bekasi (104,98 (SMP), 94,90 (SMA)).

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tersebut. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat rentang usia, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai 100.



Sumber : Kemedikbud. 2019

Gambar 2.16. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Jawa Barat Periode 2010-2017

Secara umum capaian Angka Partisipasi Murni (APM) berbagai jenjang (pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat belum mencapai 100%. Senada dengan APK, berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.16, terdapat penurunan nilai/angka APM khususnya pada jejang Pendidikan Dasar di Kota Bogor yaitu dari 95,41 (2010) menjadi 93,02 (2017), namun untuk pendidikan menengah cenderung meningkat sekitar 1 hingga 5 persen selama 2010-2017. Meskipun capaian nilai APM Kota Bogor (2017) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama berada di bawah APM Jawa Barat, namun APM Menengah Atas/Kejuruan relatif lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

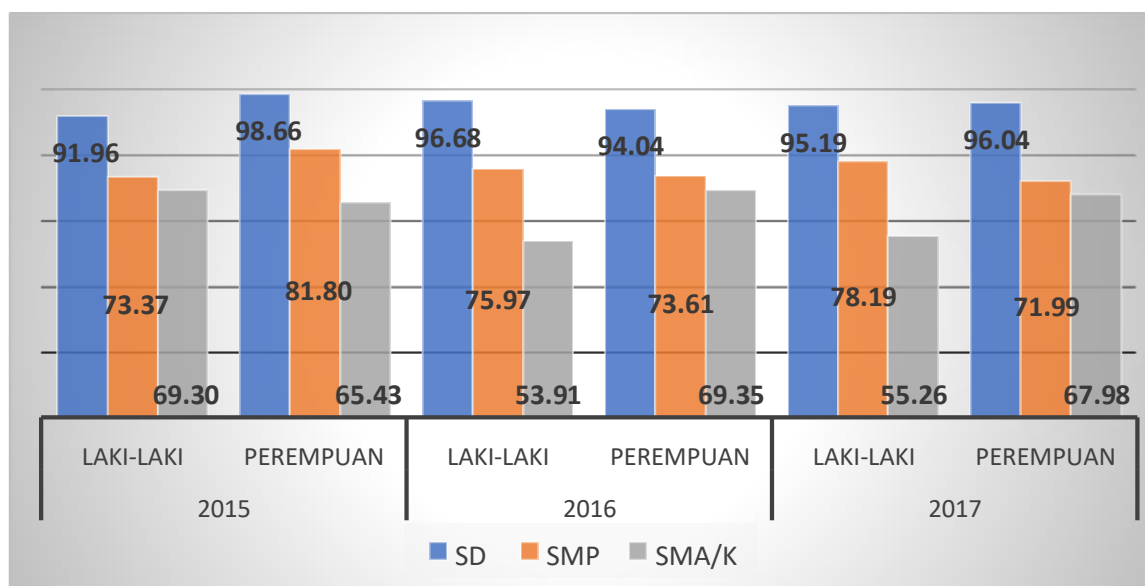
Capaian APM pendidikan dasar Kota Bogor yang cenderung menurun dapat diakibatkan berbagai sebab seperti, faktor ekonomi keluarga, anak yang masuk sekolah tahun pertama masih dibawah usia <7 tahun (6-6.5 tahun), kuota (kapasitas) sekolah dasar yang belum dapat menampung, persaingan dengan penduduk luar Kota Bogor. Faktor kapasitas dan persaingan antar penduduk sekitar Bogor nampaknya lebih mengemuka, sebab beberapa Sekolah Dasar (negeri atau swasta) di Kota Bogor menjadi primadona seperti SD Aliya, Polisi, Regina Pacis, Umul Quuro, Insan Kamil dan lainnya, meskipun demikian diperlukan kajian lebih mendalam terkait kondisi tersebut. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bogor

sebab, pemerintah harus menghadirkan Pendidikan Dasar yang baik dan terjangkau (lokasi dan keterterimaan) bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kota Bogor.

Senada dengan APM Pendidikan Dasar, Capaian APM Menengah Pertama meskipun mengalami peningkatan 1,35 dari 75,64 (2010) menjadi 76,99 (2017), tetap masih berada dibawah capaian APM Provinsi Jabar yaitu 78,49 (2017). Sedangkan Capaian APM Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan Kota Bogor pada tahun 2017 (63,70) sudah berada diatas Provinsi Jawa Barat (60,64). Meskipun demikian kembali bila dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi capaian APM menengah (pertama dan atas), capaian Kota Bogor masih lebih kurang dapat berasing (relatif lebih rendah). Rendahnya capaian APM ini diindikasikan dipengaruhi oleh berbagai sebab diantaranya, **faktor ekonomi keluarga** (prioritas pengeluaran dan bekerja), **pernikahan dini** (usia sekolah menengah), ataupun **faktor ketersediaan dan keterterimaan** pada sekolah menengah (negeri dan swasta) yang ada di Kota Bogor.

Berdasarkan capaian APM kota bogor berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015-2017 (Gambar 4.17) didapati bahwa populasi anak perempuan pada jenjang Pendidikan Dasar (SD) lebih didominasi anak perempuan (96,25) dibandingkan anak laki-laki (95,19).

Sedangkan untuk capaian APM Gender pada jenjang menengah sedikit berbeda, dimana pada capaian APM laki-laki pada jenjang menengah pertama memiliki tren meningkat ((73,37 % (2015), menjadi 78,19% (2017)), sedangkan capaian APM perempuan cenderung menurun ((81,80 % (2015), menjadi 71,99% (2017)). Adapun Capaian APM menurut gender pada jenjang pendidikan menengah atas memiliki tren berbanding terbalik dengan APM SMP, dimana APM laki-laki cenderung menurun (69,30 % (2015), menjadi 55,26% (2017)), sedangkan APM perempuan cenderung meningkat (65,43 % (2015), menjadi 67,98% (2017)).



Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Bogor. 2018

Gambar 2.17. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2015-2017

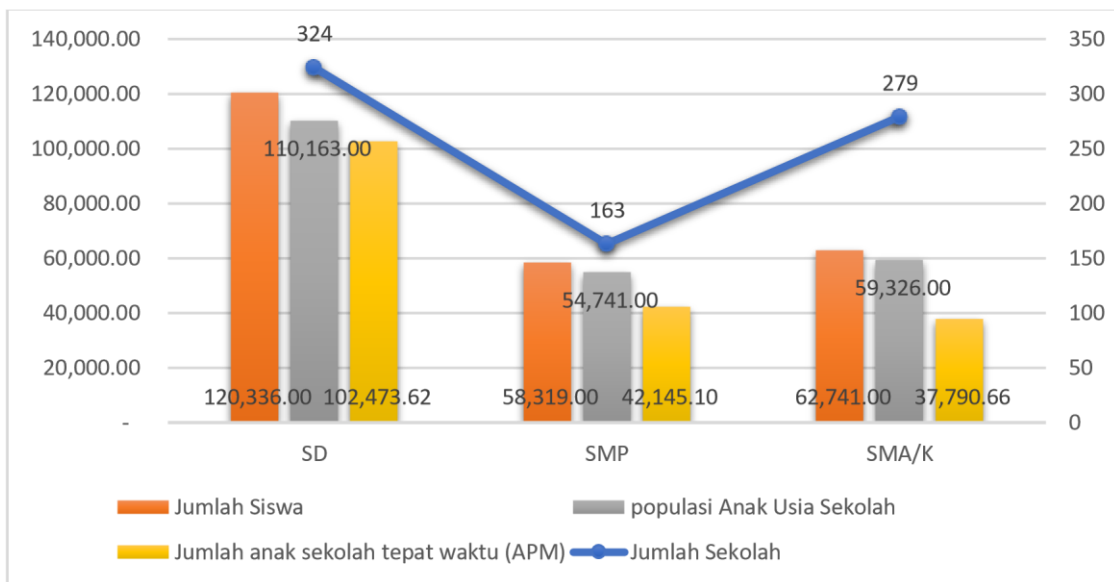
Menjadi perhatian khusus adalah tingkat partisipasi murni (APM) laki-laki cenderung menurun, di setiap jenjang pendidikan 94,61 (SD), 75,84 (SMP), dan 59,49 (SMA). Bila

dibandingkan dengan APM perempuan yang sedikit lebih tinggi 96,25 (SD), 75,80 (SMP), 67,59 (SMA/K). Patut diduga bahwa 40% penduduk laki-laki usia sekolah SMA/K (15-18) lebih memilih bekerja atau berusaha dibanding melanjutkan sekolah, sebaliknya lebih dari 33% penduduk perempuan lebih memilih bekerja atau menikah (ibu rumah tangga). Bila dihubungkan dengan Persentase Usia Pernikahan dan Kehamilan Pertama Perempuan berusia > 10 Tahun di Kota Bogor (Gambar 4.10), bahwa didapatkan usia sekolah 10-18 (SMP dan SMA/K) telah terjadi pernikahan dini sekitar 32,28 persen dari jumlah populasi perempuan, yang mendorong sang ibu untuk berhenti sekolah dan hamil (22,06 %). Adapun penurunan populasi anak laki-laki yang bersekolah cenderung menurun pada pendidikan menengah, diduga karena faktor ekonomi (membantu orang tua bekerja).

Capaian dan kondisi APK dan APM Kota Bogor tersebut mungkin disebabkan dari beberapa kendala, seperti faktor ekonomi keluarga, sarana pendidikan baik secara jumlah atau lokasi sekolah. APK dan APM dapat menjadi landasan yang cukup kuat bagi pemerintah Kota Bogor dalam melakukan evaluasi program dan infrastruktur pendidikan di Kota Bogor. Sebagaimana pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kota Bogor meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya mendorong peningkatan pencapaian program wajib belajar 9 dan 12 tahun khususnya pada jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA/K).

Sarana Pendidikan

Dalam menciptakan sumberdaya manusia dalam bidang Pendidikan, investasi dan sarana yang terpenting untuk disiapkan oleh pemerintah daerah adalah Sekolah dan Guru. Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. Kebanyakan dalam sebuah negara mempunyai model sistem pendidikan formal yang mana hal ini sifatnya wajib. Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.17 bahwa jumlah Sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK pada tahun 2017 cenderung menurun. Dimana jumlah sekolah SD di Kota Bogor dengan Status Negeri dan Swasta adalah 324, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 163, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan adalah 279 (SMA, 174 sekolah dan SMK, 105 sekolah).



Sumber : BPS 2018 dan Kemendikbud 2018 (diolah)

Gambar 2.18. Cakupan Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa dan Jumlah anak sekolah tepat waktu (APM) dan Populasi Penduduk Usia Sekolah (7-18 tahun) Kota Bogor Tahun 2017

Berdasarkan sebaran populasi siswa seluruh jenjang (SD, SMP dan SMA/K) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan populasi anak usia sekolah dan jumlah anak sekolah tepat waktu (APM). Namun bila dilihat lebih mendalam terdapat ketimpangan antara jumlah siswa dan populasi penduduk usia sekolah dan jumlah anak yang sekolah tepat waktu (APM). Berdasarkan jenjang pendidikan Dasar (SD), dengan jumlah anak yang masuk sekolah tepat waktu hanya 105 ribu jiwa sedangkan populasi siswa SD di Kota Bogor adalah 120 ribu, artinya ada 17,8 ribuan anak di luar Kota Bogor yang bersekolah di Kota Bogor, sedangkan 7,7 ribu lainnya (jumlah siswa penduduk usia sekolah SD) tidak bersekolah atau telat (menunda sekolah pada tahun selanjutnya) karena kurangnya kursi (kapasitas) di sekolah SD.

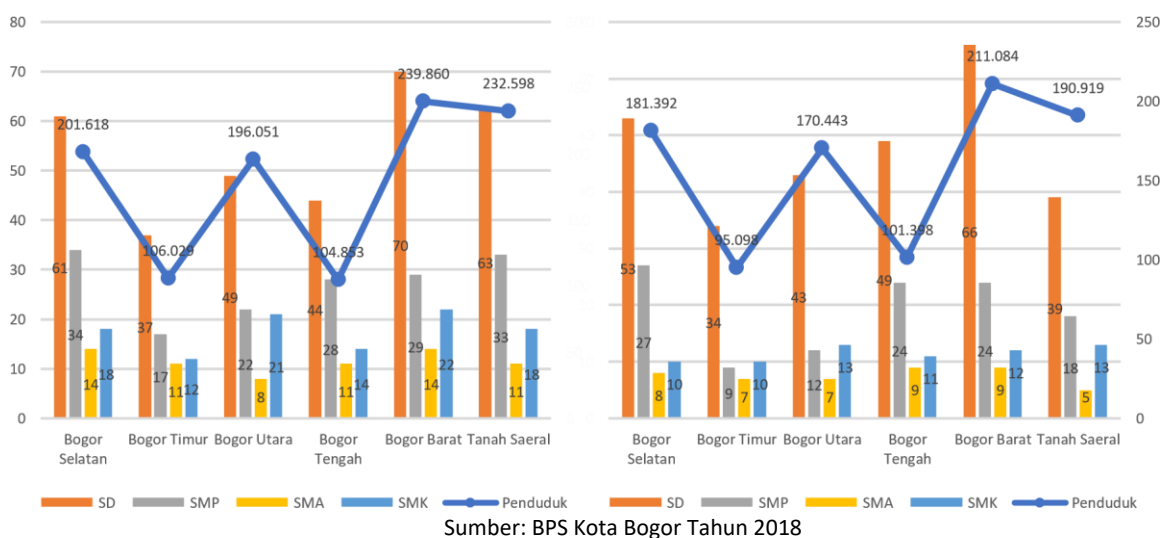
Senada pada jenjang pendidikan menengah (pertama dan atas) terdapat ketimpangan antara jumlah siswa yang bersekolah dengan jumlah anak yang bersekolah tepat waktu di Kota Bogor. Bila dilihat dari data pada jenjang menengah pertama, jumlah populasi anak usia sekolah berjumlah 54,7 ribu dimana jumlah siswa aktif 58.3 ribu, sedangkan jumlah anak yang tepat waktu bersekolah hanya 42,1 ribu artinya pertama ada kelebihan jumlah anak yang bersekolah di Kota Bogor sejumlah 3,5 ribu bila dibandingkan dengan populasi anak usia sekolah, kedua dari 58,3 ribu siswa tersebut hanya 42,1 ribu yang merupakan anak sekolah Kota Bogor sedangkan 16,2 ribu lainnya kemungkinan adalah anak diluar Kota Bogor yang bersekolah di Kota Bogor.

Pola yang sama terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas, dimana berdasarkan jumlah siswa yang aktif sekolah di Kota Bogor (62,7 ribu siswa) hanya 58% (37,8 ribu) anak Kota Bogor yang bersekolah tepat di sekolah Kota Bogor, sedangkan 42% (24,9 ribu lainnya) diduga adalah penduduk usia sekolah kota lain yang bersekolah di Kota Bogor. Sehingga terdapat 21,5 ribu dari sisa populasi usia sekolah menengah atas (15-18 tahun) di kota bogor tidak bersekolah

yang dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah kapasitas/cakupan keterterimaan di sekolah SMA/K di Kota Bogor.

Kondisi ketimpangan tersebut menjadi harus perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bogor, hal ini berhubungan langsung dan tidak langsung pada pencapaian RLS, HLS, APK dan APM. Secara perhitungan RSL dan HLS memang didasari oleh capaian/perolehan ijazah terakhir penduduk suatu daerah, namun apabila ketimpangan antara keterterimaan penduduk usia sekolah dengan jumlah sekolah dan jumlah penduduk sekolah tepat waktu di sekolah dimasa depan akan menyisakan pekerjaan yang tidak ada habisnya dalam mencapai nilai RSL, karena adanya selisih jumlah penduduk yang tidak tamat belajar 12 tahun pada usia seharusnya. Artinya dengan meningkat nilai APM yang dipengeruhi oleh keterterimaan penduduk usia sekolah tepat waktu, secara bertahap akan mengurangi jumlah penduduk yang dimasa depan harus mengejar ijazah nya pada usai produktif bekerja atau lanjut.

Melihat sebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan sebaran sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) disetiap kecamatan pada tahun 2017 hampir merata, namun polarisasi populasi penduduk masih terkonsentrasi di Bogor Barat (239,86 ribu jiwa) dan Tanah Sareal (231,60 ribu jiwa) sedangkan sekolah terkonsentrasi di Bogor Barat (135 sekolah) dan Bogor Selatan (127 sekolah) (Gambar 4.19). Jumlah Sekolah Dasar tahun 2017 terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat (70 sekolah) dan Tanah Sareal (63 sekolah). Bila dibandingkan dengan tahun 2010, Kecamatan Hanya memiliki 39 Sekolah Dasar (Segeri dan Swasta), artinya dalam 7 tahun (2010-2017) Pemerintah Kota Bogor berupaya mendorong peningkatan jumlah sekolah dengan harapan dapat dapat menampung populasi penduduk usia sekolah wajib belajar 12 tahun.



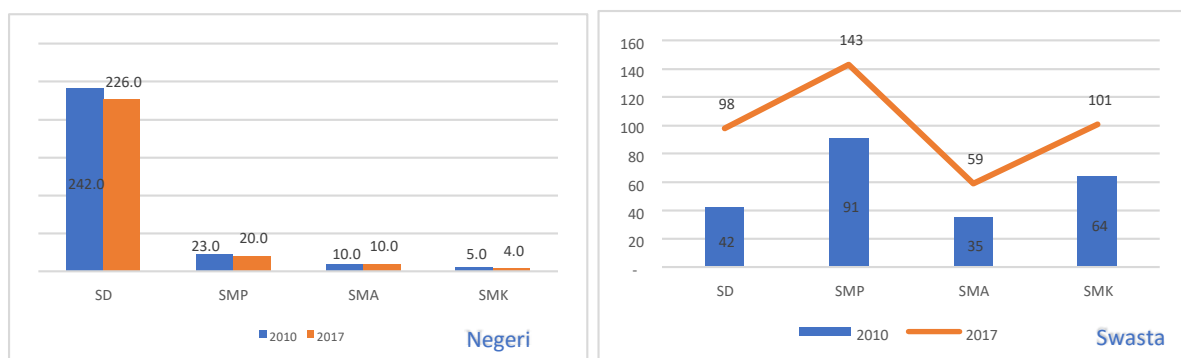
Gambar 2.19. Sebaran Penduduk dan Sekolah (Dasar dan Menengah) berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017

Berdasarkan data pada Gambar 4.19, konsentrasi Sekolah (berbagai jenjang) tertinggi berada di Kec. Bogor Barat dengan 135 Sekolah, Kecamatan Bogor Selatan dengan 127 Sekolah dan Kecamatan Tanah Sareal dengan 125 Sekolah. Pertumbuhan tersebut nampaknya

dilakukan untuk memenuhi peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor periode 2010-2017 terutama di Kecamatan Bogor Barat (239.860 jiwa), Kecamatan Tanah Sareal (232.598 Jiwa) dan Kecamatan Bogor Selatan (201.618 jiwa).

Jumlah Sekolah di semua jenjang pendidikan (Dasar, Menengah Pertama, Atas dan Kejuruan) mengalami peningkatan yang cukup baik dan menyebar di setiap Kecamatan. Peningkatan Sekolah Menengah Pertama meningkat 43% dari 114 sekolah menjadi 163 sekolah, Sekolah Menengah Atas meningkat 53% dari 45 sekolah menjadi 69 sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan meningkat 52% dari 69 Sekolah menjadi 105 sekolah. Berbanding antara tahun 2010 dan 2017, konsentrasi Sekolah Menengah Pertama berpindah dari Kecamatan Bogor Barat dan Tengah (masing-masing 14 sekolah) pada tahun 2010, menjadi Kecamatan Bogor Selatan (34 sekolah) dan Tanah Saeral (33 sekolah).

Peningkatan jumlah sekolah pada jenjang SMA dan SMK merupakan yang tertinggi dai antara jenjang lainnya yaitu > 50%, konsentrasi sekolah tidak berbeda jauh. Konsentrasi SMA pada tahun 2010 ada di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah (masing-masing 9 sekolah) menjadi terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan (masingmasing 14 sekolah). Sedangkan jenjang SMK, tahun 2010 sekolah terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal (masing-masing 13 sekolah) menjadi terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Barat (22 SMK) dan Bogor Utara (21 SMK).



Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2017

Gambar 2.20. Perkembangan Sekolah Negeri dan Swasta Berbagai Jenjang di Kota Bogor Tahun 2010 dan 2017

Bila dilihat status sekolahnya yaitu Negeri dan Swasta, selama 2010 dan 2017 telah terjadi peningkatan sejumlah 22,5% (149 sekolah) di berbagai jenjang pendidikan. Peningkatan jumlah sekolah lebih di karenakan jumlah sekolah swasta dalam 8 tahun terakhir bertambah, sedangkan jumlah sekolah swasta cenderung menurun secara jumlah. Jumlah Sekolah Swasta di berbagai jenjang meningkat sebesar 73% atau dari 232 Sekolah pada tahun 2010 menjadi 401 sekolah pada tahun 2017. Sebaliknya jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang justru berkurang 7 persen atau dari 280 sekolah menjadi 260 sekolah.

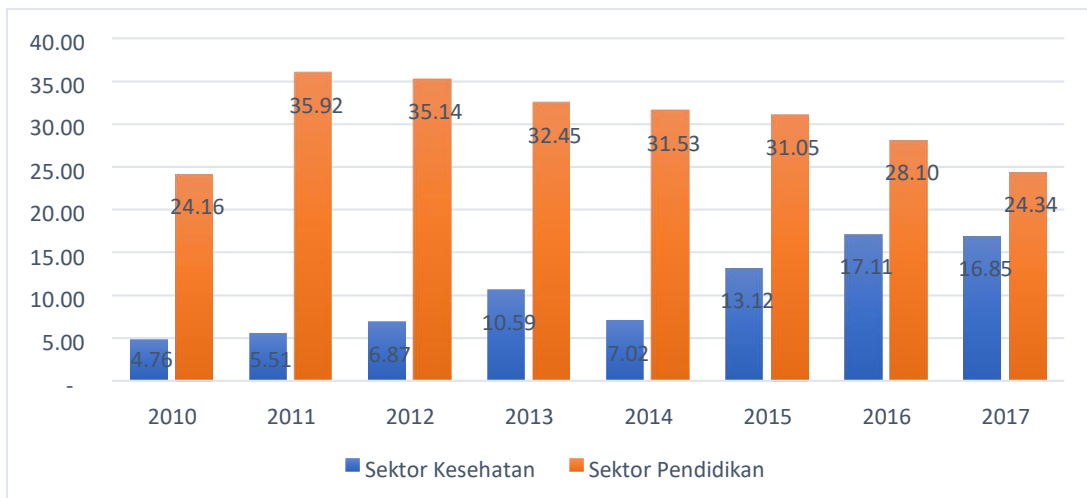
Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus pemda Kota Bogor, sebab pola pikir masyarakat Kota Bogor kualitas pendidikan masih berada di Sekolah Negeri dibandingkan

Swasta. Jenjang Sekolah Negeri yang tidak mengalami perubahan hanya Sekolah Menengah Pertama tetap 10 Sekolah dan tersebar merata diseluruh Kecamatan. Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan atau perubahan dari 22 sekolah tahun 2010 menjadi 20 sekolah pada tahun 2017. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan adanya pengabungan sekolah atau penurunan status sekolah. Informasi terkait perubahan sekolah masih belum diketahui, namun ini dapat menjadi salah satu fokus pembangunan Pendidikan Kota Bogor.

Jumlah sekolah yang meningkat dalam 8 tahun terakhir masih belum cukup meningkatkan angka RLS dan APM, yang juga mempengaruhi peningkatan nilai IPM Kota Bogor. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Komposisi penduduk yang relatif besar diusia muda memerlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai. Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa yang lalu. Yang perlu dilakukan saat ini adalah memelihara dan mempertajam upaya-upaya positif yang sudah dirintis di masa lalu sehingga dapat dihasilkan capaian pendidikan lebih baik. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini dikhawatirkan pada rentang waktu yang akan datang berdampak cukup serius pada pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Alokasi Anggaran

Berdasarkan amanat undang-undang, Alokasi Anggaran Wajib sektor kesehatan adalah 10% dan sektor pendidikan 20% dari total anggaran/realisasi anggaran Pemerintah (APBN/APBD). Jumlah Alokasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan di Kota Bogor sudah baik (rata-rata 40,57%, 10,23% Sektor Kesehatan dan 30,34 sektor pendidikan) dari total realisasi APBD Kota Bogor tahun 2010-2017 (Gambar 2.21). Porsi Anggaran Kesehatan mengalami peningkatan dari 4,76% (2010) menjadi 16,85% (2017), namun yang digunakan untuk program kesehatan sisi preventif dapat dikatakan hanya 6-7% (Dinas Kesehatan), 10% sisanya untuk anggaran RSUD dan BLUD (mulai 2013) hal ini masih kurang 10% (amanat undang-undang). Adapun Sektor Pendidikan sudah sangat baik yaitu rata-rata 30,34% pertahun dimana amanat undang-undang hanya 20%. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah porsi Belanja Tidak Langsung (72,43%) dan Tidak Langsung (15,07%). Adapun demikian tahun 2017 tercatat BL meningkat 80% dari 18% menjadi 32,84% dari total anggaran pendidikan Kota Bogor. Dengan anggaran yang cukup, diharapkan pemerintah kota bogor dapat memaksimalkan pencapaian atribut-atribut yang mendukung pencapaian IPM dari sektor Kesehatan dan Pendidikan.



Sumber: BPKAD Kota Bogor Tahun 2019

Gambar 2.21. Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan dan Pendidikan dalam APBD Realisasi tahun 2010-2017

2.2.3. Indek Hidup Layak

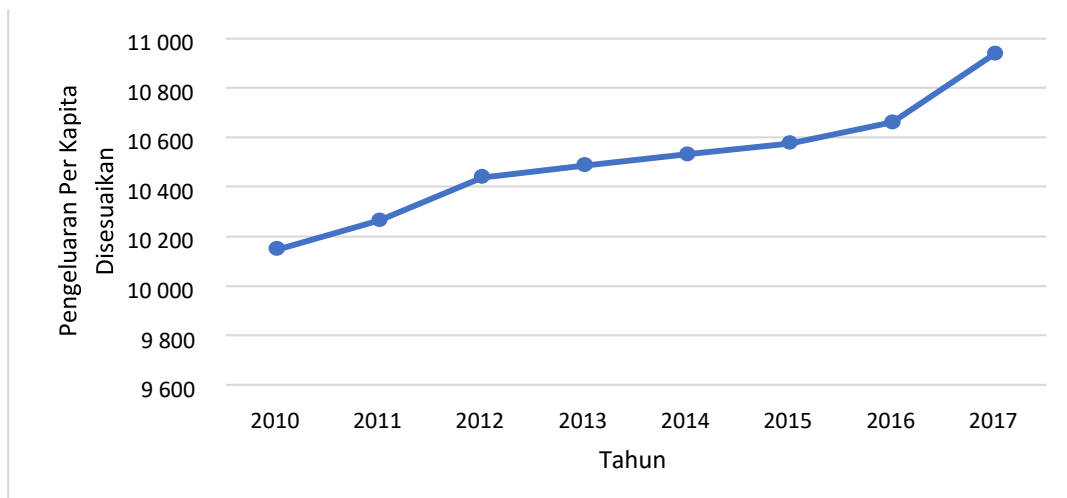
Purchasing Power Parity (PPP)

Kemampuan Daya Beli Penduduk atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding. Untuk itu perlu adanya standarisasi. Dengan demikian, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini maka kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Purchasing Power Parity (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita riil. PPP adalah suatu alat ukur yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya. tanpa memperhatikan asal atau sumber penerimaannya. apakah itu berupa pemberian atau hasil pendapatannya. Oleh karena itu PPP merupakan alat ukur yang dianggap lebih mewakili tingkat kesejahteraan penduduk sesuai dengan pola kebiasaan dan kemampuan untuk dapat mengakses terhadap setiap tingkatan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen utama IPM merupakan indikator dengan fluktuasi perubahan yang dinamis, sebab indeks ini sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal Kota Bogor,

seperti kebijakan fiskal dan moneter. Berikut ini disajikan data PPP Kota Bogor tahun 2013-2017.

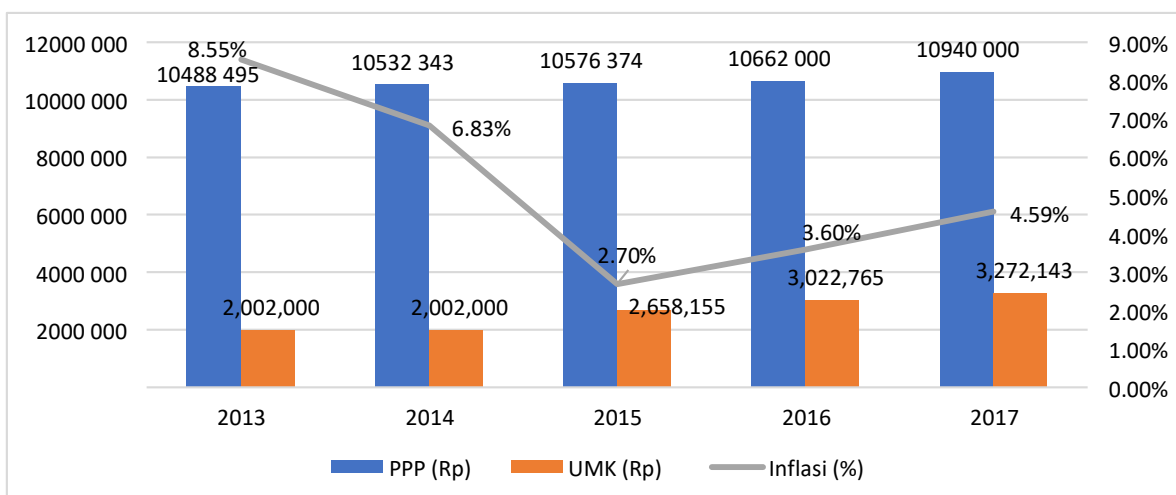


Sumber : BPS Kota Bogor (2019)

Gambar 2.22. Grafik Purching Power Parity (PPP) di Kota Bogor Tahun 2010-2017

Berdasarkan Gambar 4.22, diketahui bahwa PPP masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika naik turunnya kekuatan daya beli masyarakat, yaitu faktor pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa).

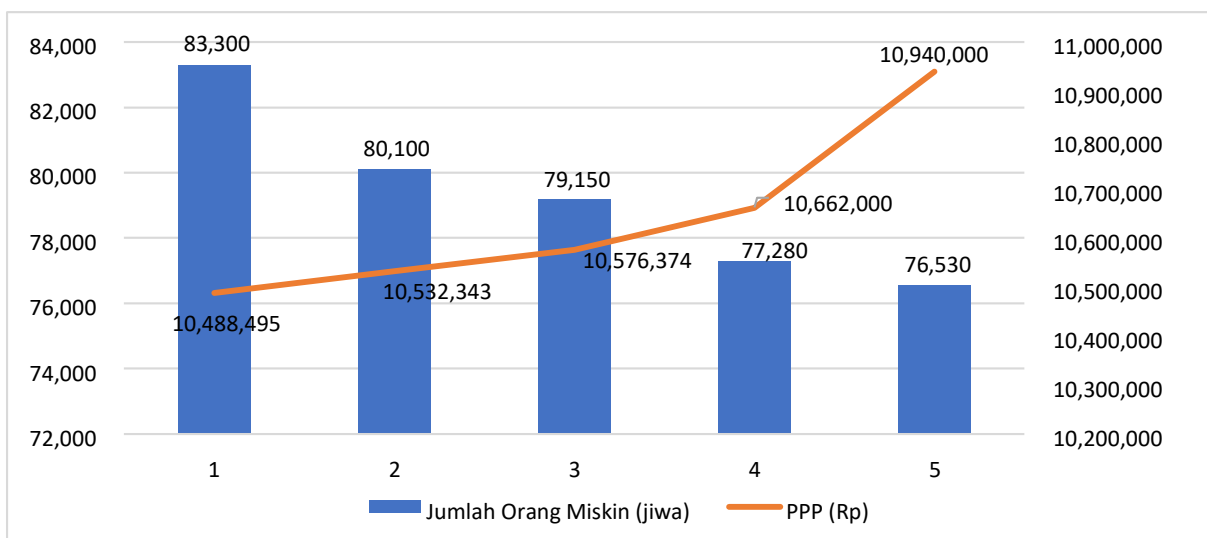
Inflasi di Kota Bogor yang cenderung mengalami peningkatan mempengaruhi kondisi **pengeluaran per kapita (PPP)** masyarakat Kota Bogor. Tingginya inflasi mendorong meningkatkan PPP masyarakat Kota Bogor. Dimana kondisi ini juga didukung oleh semakin meningkatnya Upah Minimum Regional di Kota Bogor (Gambar 2.23).



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.23. Hubungan Tingkat PPP, Inflasi dan UMK Kota Bogor 2013 -2017

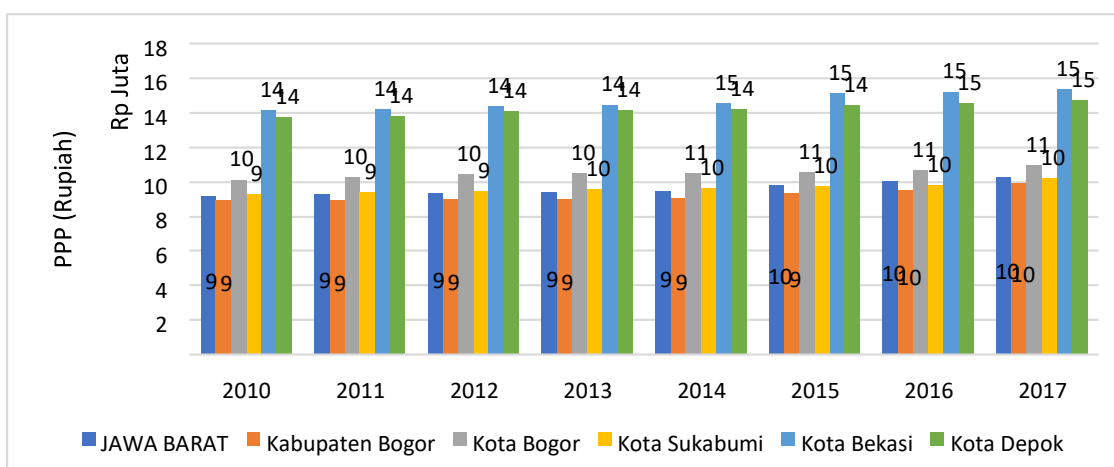
Sejalan dengan kondisi dimana daya beli masyarakat Kota Bogor terus meningkat, hal ini juga diikuti oleh kondisi jumlah orang miskin yang terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.24.



Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.24. Hubungan Tingkat PPP dan Jumlah Orang Miskin di Kota Bogor 2013 -2017

Beberapa wilayah di Jawa Barat, juga mengalami tren pengeluaran per kapita yang cenderung meningkat pada tahun 2013-2017, yaitu beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Sukabumi. Data Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Kota Bogor dan daerah sekitarnya tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber : BPS Jawa Barat, 2019 (Diolah)

Gambar 2.25. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2010-2017

Tingkat inflasi yang tinggi mendorong tingkat pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Bogor meningkat. Pada tahun 2017 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan yaitu mencapai 7,13%. Tertinggi kedua dari kelompok bahan makanan jadi sebesar 5,35% dan ketiga dari kelompok Transport dan Komunikasi sebesar 4,24%. Data inflasi Kota Bogor berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.15.

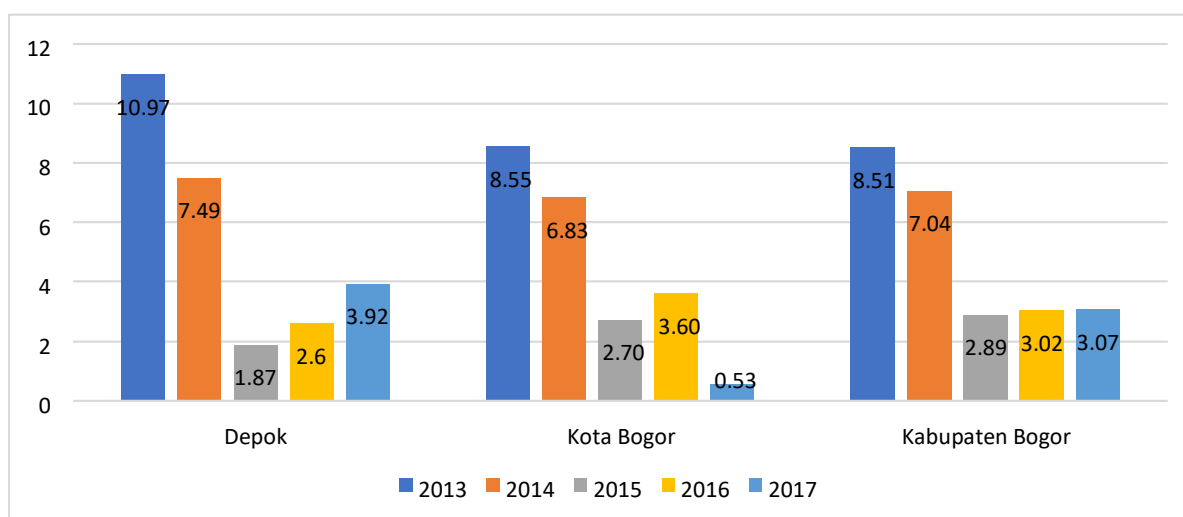
Tabel 2.15.

Inflasi Kota Bogor Menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2013-2017

Tahun	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan	Transport dan Komunikasi
2013	8,55	9,32	6,52	5,48	1,18	2,56	4,44	22,69
2014	6,83	9,94	3,91	4,96	2,24	3,67	3,69	12,77
2015	2,70	3,25	4,93	3,64	1,27	4,82	2,17	-1,74
2016	3,60	7,16	4,29	3,46	1,63	8,96	0,76	-1,09
2017	4,59	3,96	5,35	0,47	3,81	1,56	7,13	4,24

Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kota Bogor juga cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data pada Gambar 2.21.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Gambar 2.26. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor 2013 -2017

Pada Gambar 2.26 dapat dilihat tingkat inflasi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kecenderungan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 antara ketiganya adalah sama, mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2016. Tetapi untuk tahun 2017, tingkat inflasi di Kabupaten Bogor dan Kota Depok meningkat, tetapi tingkat inflasi di Kota Bogor menurun.

2.3. Kemiskinan dan Gini Rasio

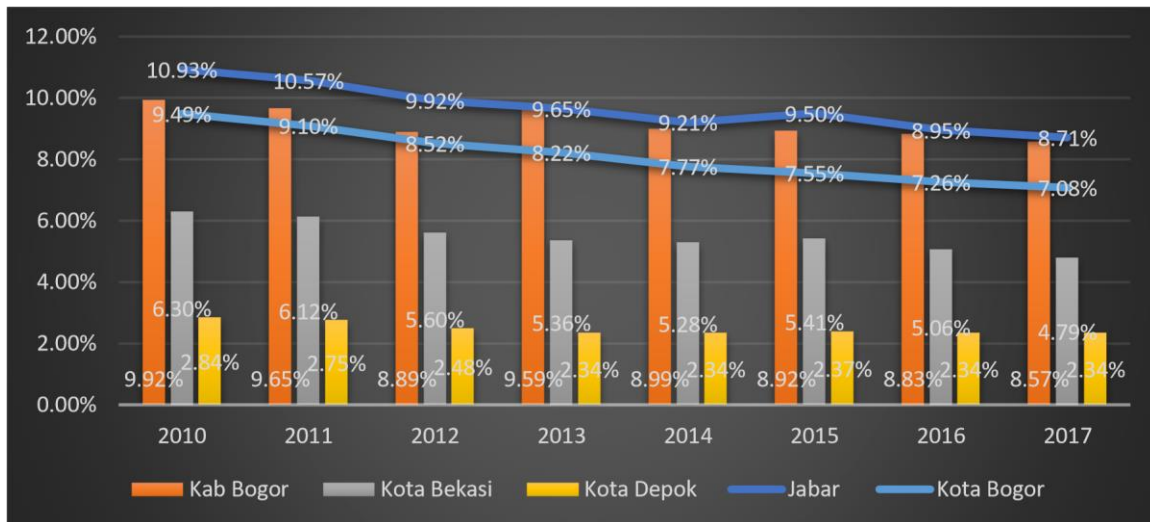
Kemiskinan di Kota Bogor jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2017, dari 90 ribu orang menjadi 76 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio kemiskinan di Kota Bogor pun mengalami penurunan, dari 9,49% menjadi 7,26%. Laju penurunan penduduk miskin di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga ke 2017 rata-rata per tahunnya adalah 2,31%. Laju penurunan tertinggi adalah pada tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 4,61%. Laju penurunan terendah adalah dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,97%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.27. Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bogor Tahun 2010 – 2017

Rasio kemiskinan, perbandingan antara orang miskin dengan penduduk di Kota Bogor relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain sekitar ibukota, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.28. Rasio Kemiskinan di Beberapa Wilayah Sekitar Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga ke tahun 2013, yaitu dari 1,60 di tahun 2010 menjadi 1,13 pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan di tahun 2014, menjadi 1,26. Selanjutnya, sejalan dengan menurunnya laju pengentasan kemiskinan di Kota Bogor, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2016 ke 2017, juga mengalami penurunan, tahun 2015 yang sebesar 1,26 menjadi 1,08 di tahun 2016 dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 0,99. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Begitu pula dengan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,33 menjadi 0,26 tahun 2016, selanjutnya menurun lagi menjadi 0,17. Dengan menurunnya P2, berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang. Sebaliknya dengan nilai gini ratio, pada periode tersebut, nilai gini ratio di Kota Bogor menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, dimana

pada tahun 2014, nilai gini ratio adalah 0,36, kemudian tahun 2015 hingga tahun 2017 nilainya di atas 0,40.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.29. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor Tahun 2010 - 2017

Jumlah aparatur sipil negara di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Jumlah ASN di Kota Bogor berkisar sekitar 1,03 persen di tahun 2010, selanjutnya menurun terus di bawah 1%, hingga pada tahun 2017 hanya 0,68%. Rasio ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional, yaitu 1,7%. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Brunai, rasio ini cukup rendah. Kedua negara itu masing-masing memiliki rasio sebesar 4% dan 12%. Sementara itu di Thailand dan Vietnam, rasio ASN terhadap penduduk adalah 0,55% dan 0,31%. Di Thailand dan Vietnam, penduduknya banyak yang memilih menjadi wirausaha daripada ASN.

Penduduk di Kota Bogor tidak sedikit yang menjadi wirausaha. Rasio wirausaha terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor lebih tinggi daripada rasio ASN terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2010, rasio wirausaha terhadap penduduk adalah 13%, selanjutnya terus menurun, hingga 7,3% di tahun 2015. Selanjutnya meningkat kembali hingga tahun 2017, menjadi 10,6%.

Sebagai daerah *buffer zone* dari ibukota, PDRB Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu meningkat, dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2012 ke tahun 2013, sebesar 12,16%. Selanjutnya, walaupun PDRB terus meningkat, tetapi lajunya semakin menurun hingga ke tahun 2017. Laju pertumbuhan dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8,77%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakatnya, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Dana bantuan sosial di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 kecenderungannya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 rasio dana bantuan social terhadap total belanja adalah 9,33%, menurun terus hingga tahun 2013, menjadi 1,55%, kemudian tahun 2016 yang sangat rendah, sebesar 0,00% dan tahun 2017 meningkat menjadi 1,25%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.30. Perkembangan Jumlah ASN, Orang Miskin, Wirausaha, Nilai PDRB dan Dana Bantuan Sosial di Kota Bogor dari Tahun 2010 - 2017

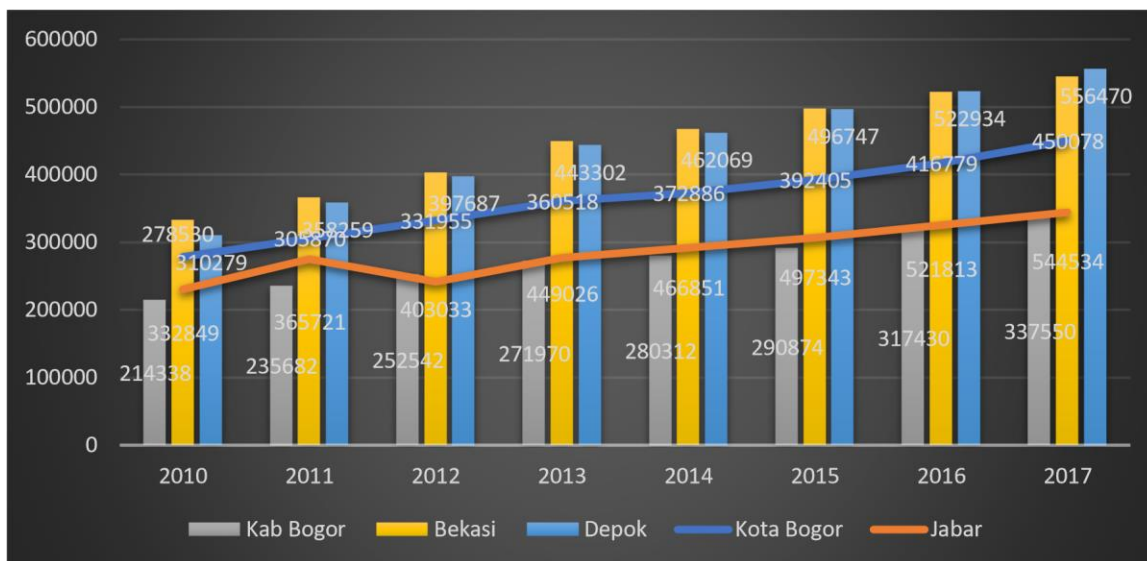
Sementara itu jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah sekitarnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Bogor, sepanjang tahun 2010 hingga 2017 lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi dan Kota Depok. Nilai P1 Kota Bogor lebih rendah dari nilai rata-rata P1 di Provinsi Jawa Barat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.31. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

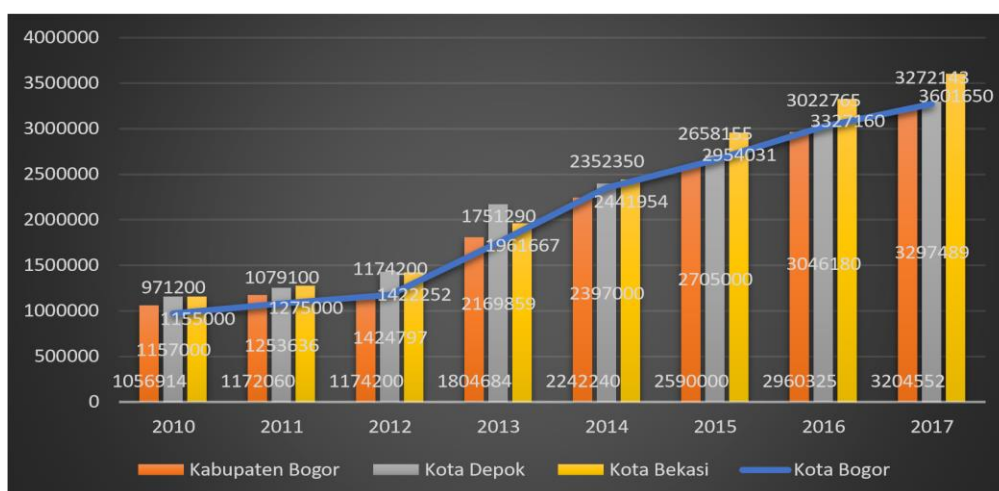
Kota Bekasi dan Kota Depok memiliki nilai P1 yang rendah dibandingkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikarenakan tingkat garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi lebih tinggi dari Kota Bogor. Pada tahun 2017, Sementara itu, jika dilihat dari garis kemiskinan, garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bogor. Pada tahun 2010, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Kota Depok adalah Rp 332.849 dan Rp 278.530. Sedangkan Kota Bogor berada pada Rp 310.279. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Depok adalah Rp 449.026 dan Rp 443.302, sedangkan Kota Bogor adalah Rp 360.518. Begitu pula pada tahun 2017, garis kemiskinan Kota Bekasi dan Depok lebih tinggi dari Kota Bogor, yaitu Rp 544.534 dan Rp 556.470, sedangkan Kota Bogor sebesar Rp 450.078. Oleh karena itu nilai P1 di Kota Bogor relatif lebih tinggi dibandingkan 2 kota lainnya.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.32. Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

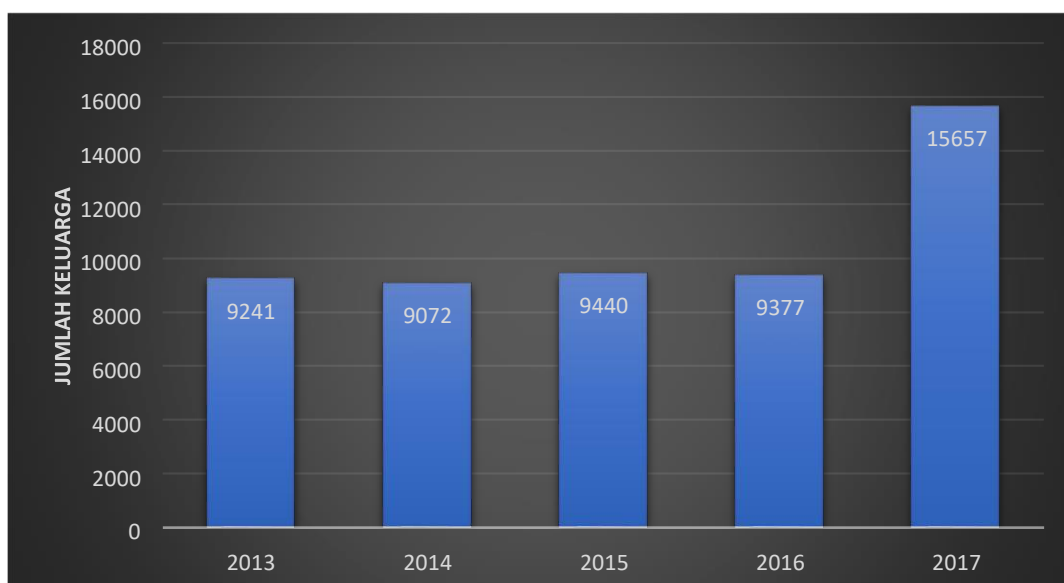
Jika dilihat dari nilai upah minimum regional, UMR, kecenderungan kota dan kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai yang relatif sama. Pada tahun 2010, nilai UMR/UMK sekitar Rp 1 juta, sedangkan di tahun 2017 telah mencapai Rp 3 juta an. Pada tahun 2010, UMK Kota Bogor adalah Rp 971.200, sedangkan di Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi masing-masing memiliki nilai UMK sebesar Rp 1.056.914, Rp 1.157.000 dan Rp 1.155.000. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai UMK di Kota Bogor sebesar Rp 1.751.290, sedangkan di tiga kota lainnya adalah Rp 1.804.684 untuk Kabupaten Bogor, Rp 2.169.859 di Kota Depok dan Rp 1.961.667 di Kota Depok. Pada tahun 2017 UMK di kota dan kabupaten di Jawa Barat mengalami peningkatan, begitu juga keempat wilayah ini. UMK di Kota Bogor adalah 3.272.143, nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan UMK di Kabupaten Bogor (Rp 3.204.552), sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Depok (Rp 3.297.489) dan Kota Bekasi (Rp 3.601.650) maka UMK Kota Bogor lebih rendah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

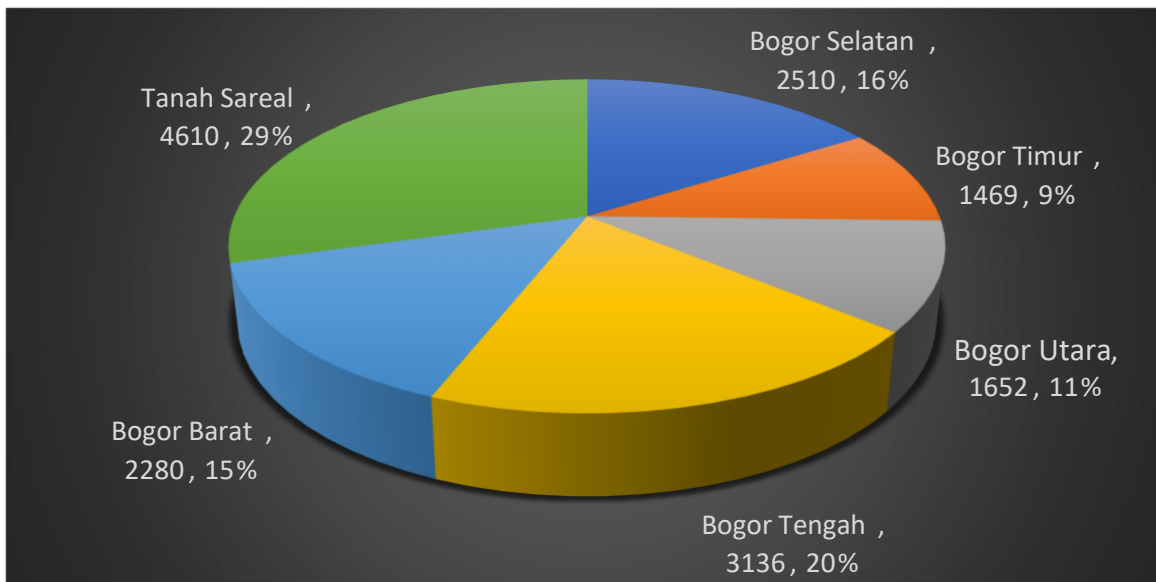
Gambar 2.33. Perbandingan UMR/UMK di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan” (BKKBN,1994). Semnetara itu, keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Jumlah keluarga prasejahtera di Kota Bogor dari tahun 2013 – 2017 mengalami laju menungkat, rata-rata 17,13% per tahun. Peningkatan tertinggi tahun 2016 ke 2017 sebesar 66,97%. Tahun 2017, jumlahh keluarga pra sejahtera meningkat dari 9.377 orang di tahun 2016 menjadi 15.657 keluarga di tahun 2017.



Gambar 2.34. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kota Bogor Tahun 2013-2017

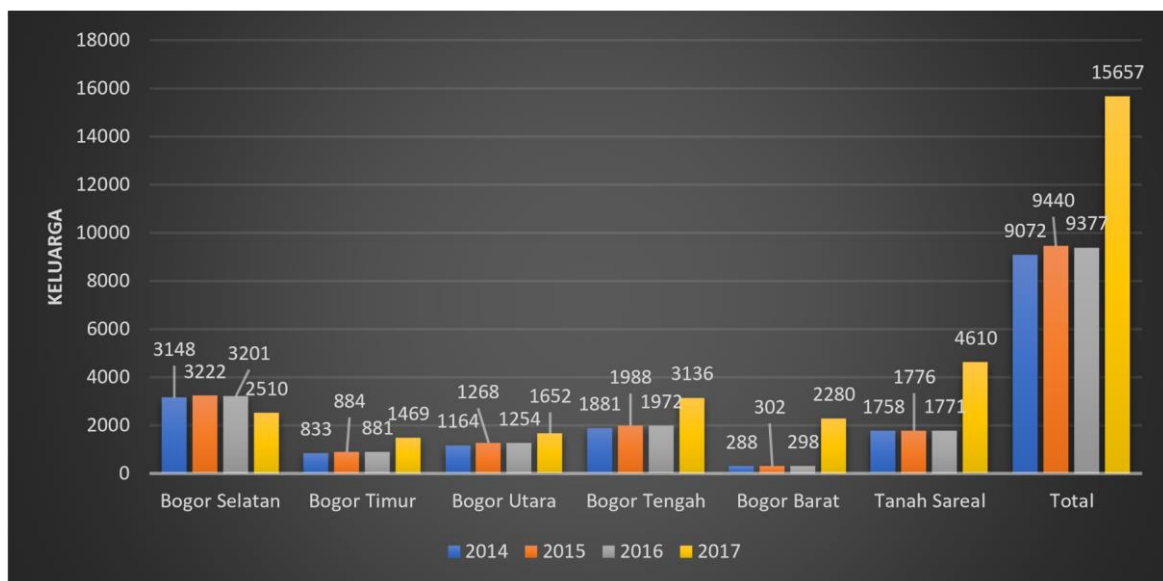
Jumlah keluarga pra sejahtera yang tertinggi di Kota Bogor pada tahun 2017 ada di Kecamatan Tanah Sereal, sekitar 29% atau sebesar 4.610 keluarga. Selanjutnya adalah Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah keluarga prasejahtera sebesar 3.136 keluarga atau sekitar 20%. Kecamatan Bogor Timur merupakan kecamatan yang paling sedikit terdapat keluarga pra sejahtera, yaitu 1.469 keluarga atau 9%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2018

Gambar 2.35. Perbandingan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan-Kecamatan di Kota Bogor

Perkembangan jumlah keluarga pra sejahtera di kecamatan-kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.36. Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2014, yang tertinggi berada di Kecamatan Bogor Selatan, sebesar 3.148 keluarga, terendah berada di Kecamatan Bogor Barat sebesar 288 keluarga.

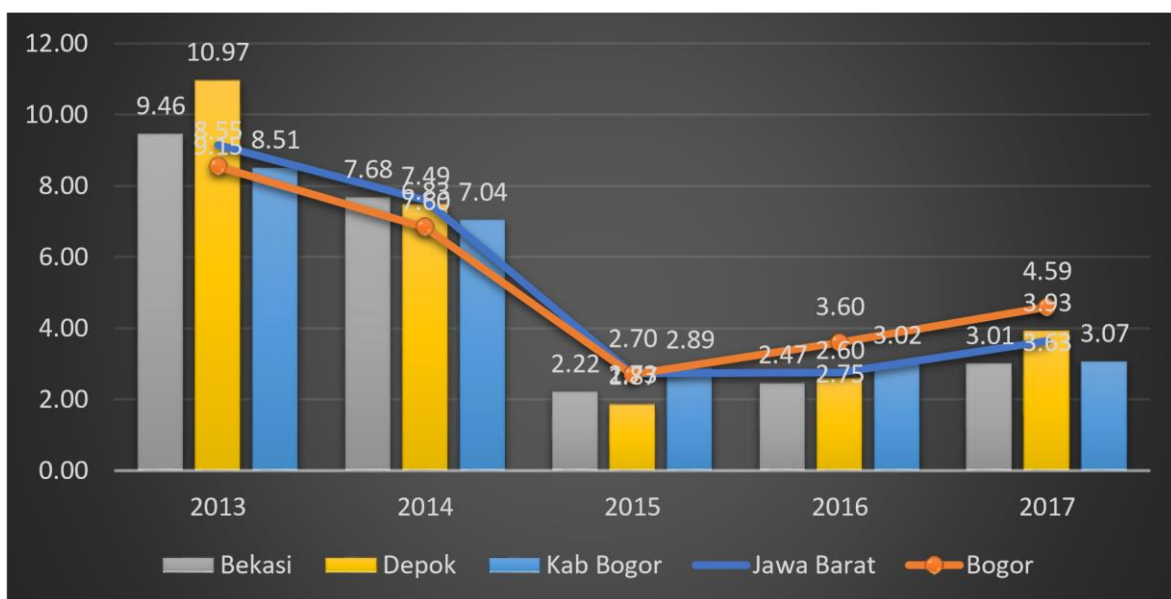


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018

Gambar 2.36. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan-Kecamatan di Kota Bogor Taun 2014-2017

Perkembangan hingga tahun 2016 relatif stabil. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat hamper di seluruh kecamatan, kecuali di Bogor Selatan yang mengalami penurunan sebesar 21,59%. Sedangkan peningkatan tertinggi berada di Tanah Sereal, dengan peningkatan lebih dari 600%, dari 1.771 keluarga pada tahun 2016 menjadi 4.610 keluarga di tahun 2017. Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Irawan et al, dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Pedesaan, inflasi memberikan beban yang relatif jauh lebih besar bagi penduduk miskin di Indonesia baik di perkotaan

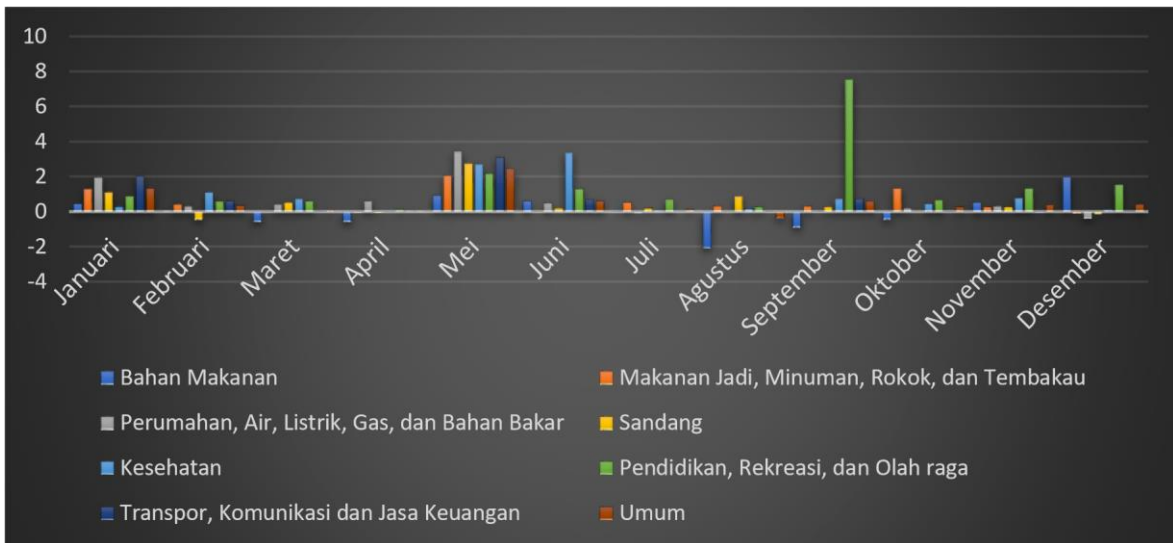
maupun pedesaan dibandingkan dengan yang dirasakan oleh penduduk nonmiskin. Sementara itu menurut Powers (1995), terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara inflasi dan tingkat kemiskinan bila tingkat kemiskinan tersebut diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Pada Gambar 4.37 dapat dilihat tingkat inflasi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kecenderungan tingkat inflasi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 antara ketiganya adalah sama, mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2016. Tetapi untuk tahun 2017, tingkat inflasi di Kabupaten Bogor dan Kota Depok meningkat, begitu juga tingkat inflasi di Kota Bogor. Tingkat inflasi di Kota Bogor tahun 2017 merupakan tingkat inflasi tertinggi diantara kota-kota tersebut, yaitu 4,59.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018

Gambar 2.37. Tingkat Inflasi di Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor 2013 -2017

Tingkat inflasi di Kota Bogor secara keseluruhan setiap bulannya **rendah** (<10%). Bahkan ada yg deflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi yang paling tinggi pada tahun 2017 adalah pada sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga, sekitar 8% pada bulan September. Sedangkan pada bulan lainnya lebih rendah lagi, secara rata-rata di bawah 4%. Permasalahannya adalah inflasi yang **fluktuatif**. Beberapa bulan di Kota Bogor, inflasi mencapai titik negative. Menurut BI, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sementara itu menurut Hellerstein, FRB, 1997, perekonomian stabil jika inflasi < 2,5%, inflasi moderat antara 2,5-5%, inflasi tinggi antara 5-8%, diatas 8% berarti perekonomian memasuki fase inflasi berbahaya.



Gambar 2.38. Tingkat Inflasi per Bulan di Kota Bogor pada Tahun 2017

Penduduk di Kota Bogor yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di kegiatan informal dan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4.39. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Bogor bekerja di bidang perdagangan besar, eceran, rumah tangga dan hotel, mencapai 35%. Ketika terjadi inflasi yang rendah, maka ini berpengaruh pada perekonomian Kota Bogor.



Sumber : BPS Kota tahun 2010-2017

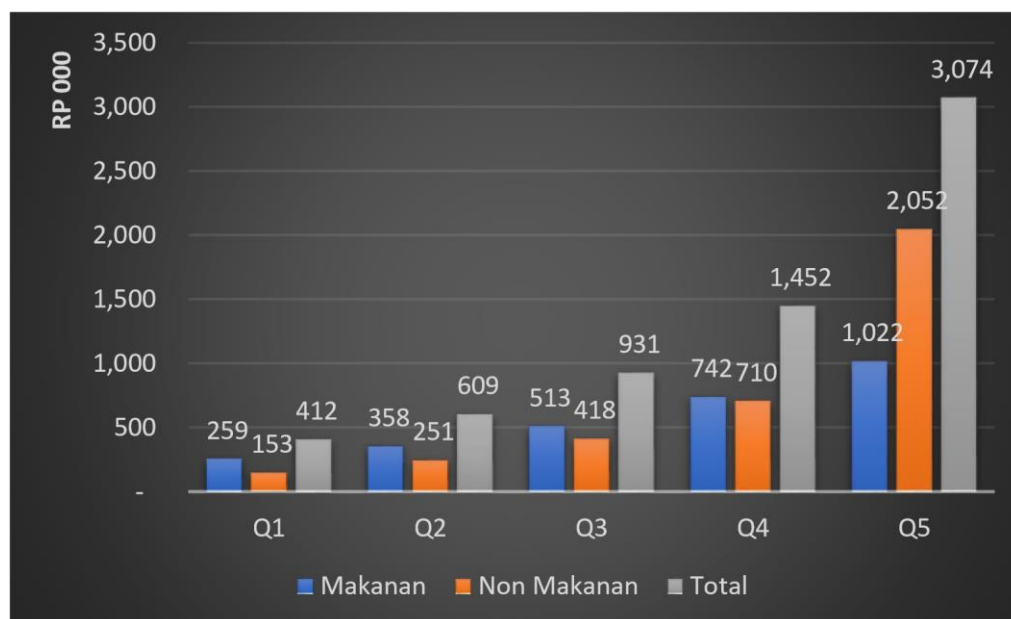
Gambar 2.39. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kegiatan Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bogor, 2017

Gini Ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Gini ratio di Kota Bogor dari tahun 2013 hingga tahun 2017 nilainya paling tinggi diantara Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Nilai gini ratio Kota Bogor setiap tahunnya memiliki nilai lebih dari 0,4, kecuali pada tahun 2014 yang memiliki nilai sebesar 0,365.



Gambar 2.40. Nilai Gini Ratio di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2017

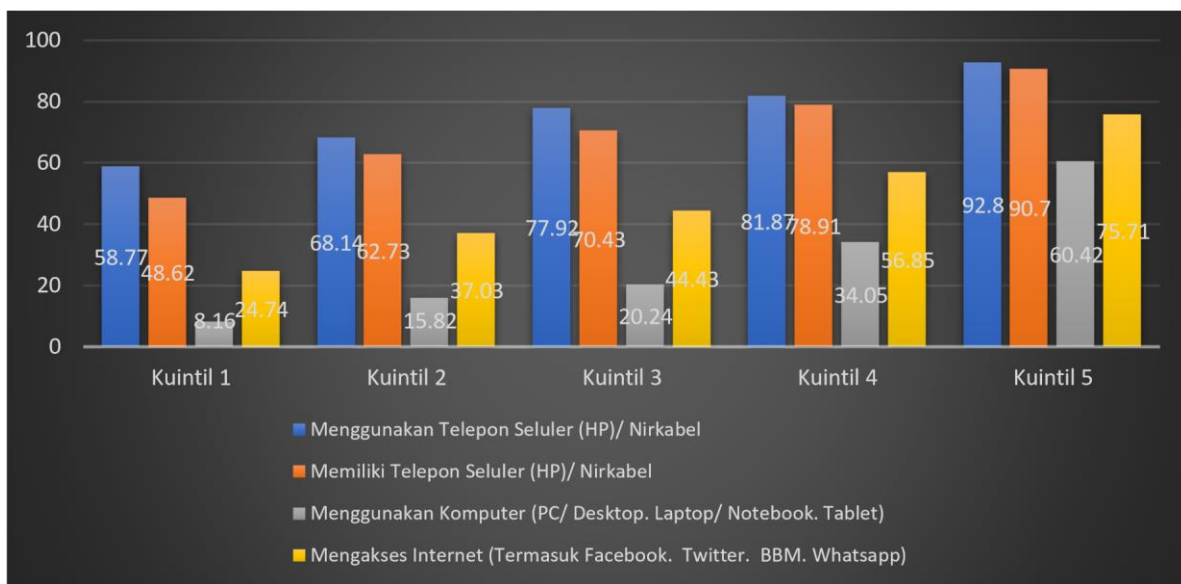


Gambar 2.41. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Pada Gambar 2.41 dapat dilihat rata-rata pengeluaran masyarakat di Kota Bogor berdasarkan atas pembagian pengeluaran, dari kuintil 1 (Q1) hingga kuintil 5 (Q5), dimana Q1 berarti 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita terendah, sebaliknya Q5 adalah 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi. Pengeluaran makanan untuk Q1 hingga Q4 lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Kecenderungan pengeluaran makanan semakin menurun dengan meningkatnya pengeluaran. Hal ini dapat dilihat pada Q4 dimana pengeluaran makanan tetap lebih tinggi dari non makanan tetapi dengan perbedaan yang lebih rendah. Selanjutnya untuk Q5, pengeluaran makan lebih rendah dibandingkan

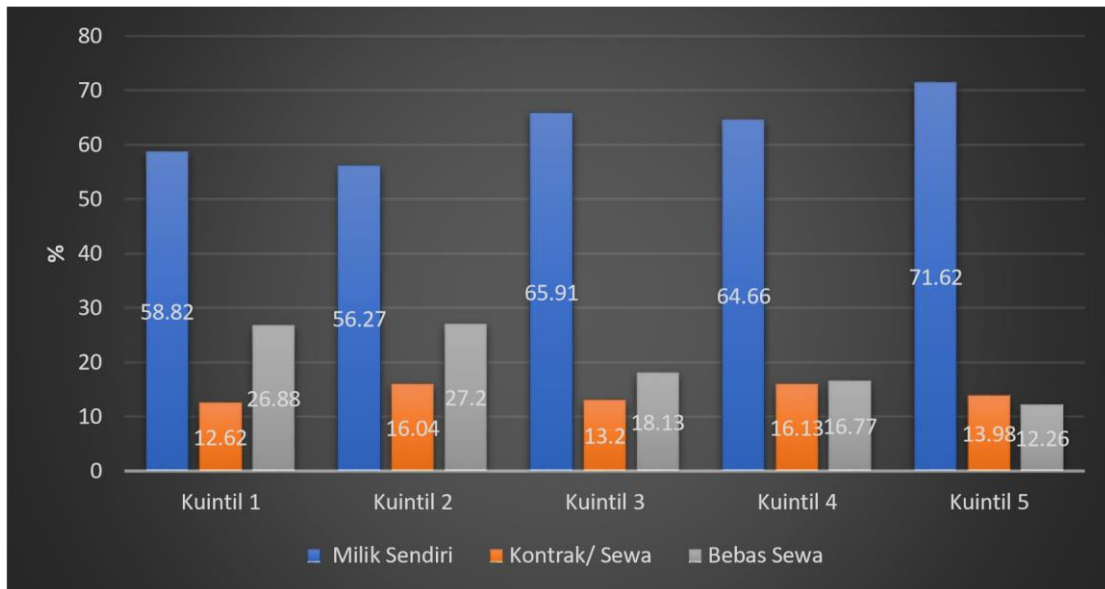
dengan non makanan. Pengeluaran rata-rata Q1 adalah Rp 412 ribu, pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan dengan non makanan. Begitu juga dengan Q2, dimana rata-rata pengeluaran adalah Rp 609 ribu, Q3 dengan rata-rata pengeluaran adalah Rp 931 ribu, Q4 dengan rata-rata sebesar Rp 1,45 juta.

Penggunaan teknologi, seperti computer, telepon selular, laptop dan internet di Kota Bogor, seluruh kelompok masyarakat terdapat orang yang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Penggunaan HP merupakan kegiatan yang paling banyak digunakan di setiap kelompok pengeluaran, dari Q1 hingga Q5. Sementara itu untuk penggunaan computer, perbedaannya cukup tinggi terutama Q4 dan Q5 dibandingkan dengan Q1, Q2 dan Q3. Tetapi untuk penggunaan internet, jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan computer, hal ini karena internet dapat diakses dengan menggunakan telepon selular.



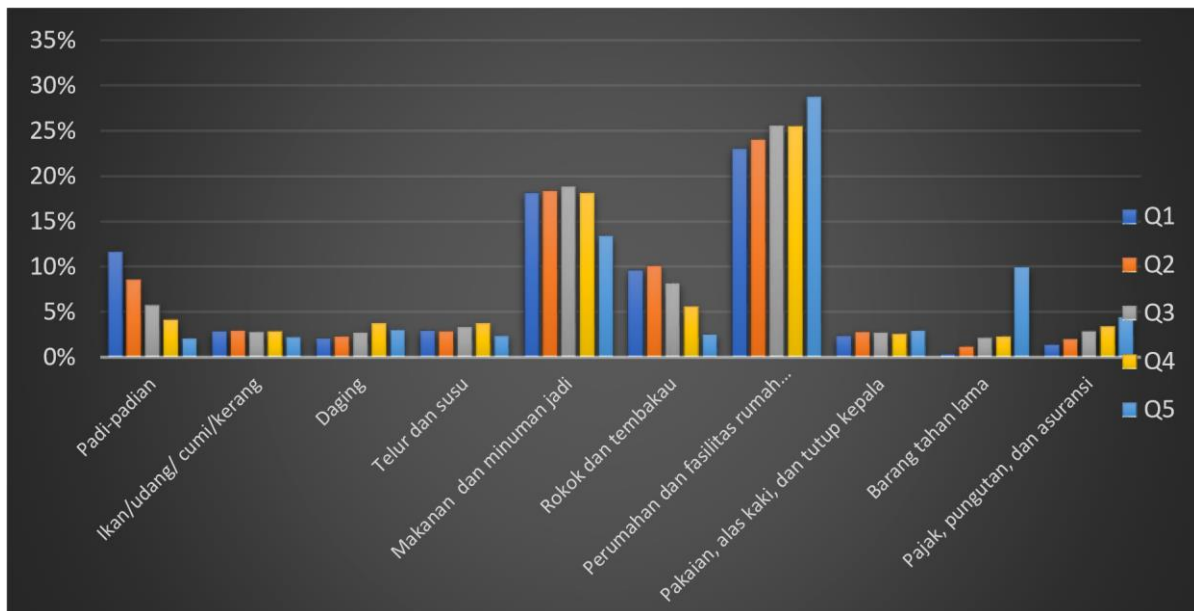
Gambar 2.42. Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan IT selama Tiga Bulan Terakhir, 2017

Sementara itu untuk kepemilikan rumah, dari masing-masing kelompok pengeluaran, sebagian besar telah memiliki rumah sendiri, bahkan rata-rata kepemilikan rumah di Q1 lebih tinggi dibandingkan dengan Q2, dan kepemilikan rumah kelompok Q3 lebih tinggi dibandingkan dengan Q4. Kepemilikan rumah untuk kelompok Q5 merupakan yang paling tinggi, yaitu 71,62%.



Gambar 2.43. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2017

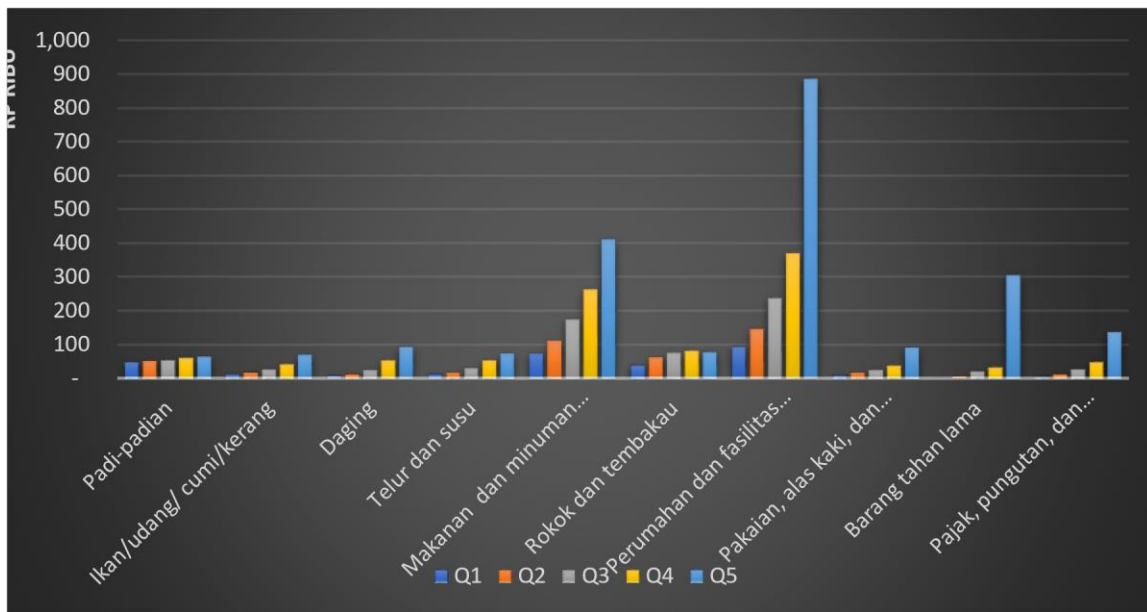
Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang paling tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya di setiap kelompok pengeluaran, dengan nilai di atas 20%, bahkan untuk kelompok Q3, Q4 dan Q5 di atas 25%. Pengeluaran selanjutnya yang tertinggi adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi dengan *share* lebih dari 15% untuk Q1 hingga Q4, sedangkan untuk Q5 lebih rendah dari 15%. Pengeluaran padi-padian *share*-nya menurun dari Q1 ke Q5, Q1 paling tinggi (11,67%), Q5 terendah (2,07%). Sementara itu untuk pengeluaran tembakau, pengeluaran tembakau Q2 paling tinggi (10,16%), Q1 (9,62%), Q5 terendah (2,56%).



Gambar 2.44. Rata-Rata Pengeluaran (%) terhadap Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

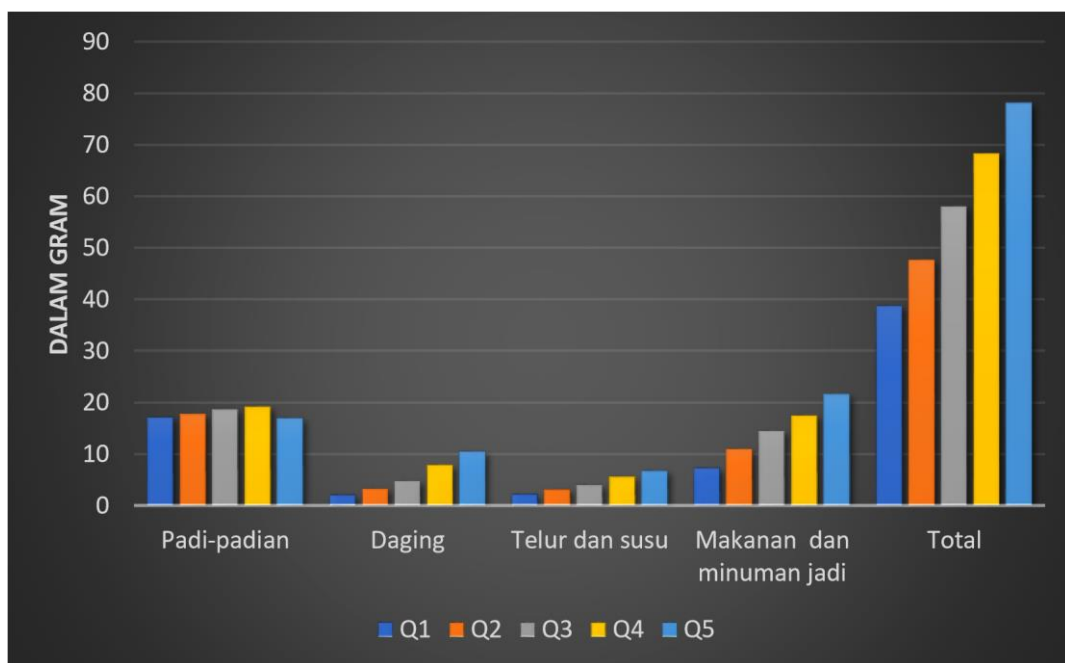
Sementara itu jika dilihat dari nilainya, pengeluaran tertinggi adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah untuk Q5, yang hamper mencapai Rp 900 ribu. Begitu juga pengeluaran untuk makanan dan minuman dari Q5 yang mencapai lebih dari Rp 400 ribu. Secara umum,

besarnya pengeluaran semakin meningkat dengan meningkatnya pengeluaran. Hal ini berbeda untuk kebutuhan pokok (padi-padian) dan rokok. Kedua kelompok ini jumlahnya dari setiap kelompok hampir sama.



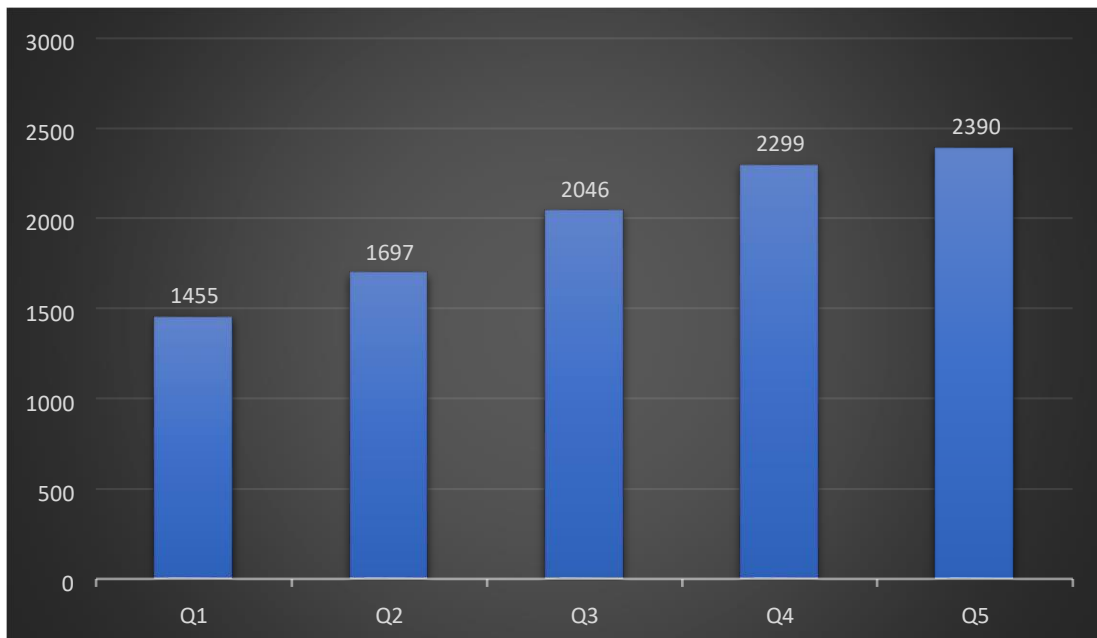
Gambar 2.45. Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) Per Kapita Sebulan Beberapa Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Pengeluaran untuk kebutuhan makanan pokok, jumlah proteinnya relatif sama, berkisar antara 17 gram hingga 19 gram satu hari. Sedangkan untuk daging, telur dan makanan minuman jadi, semakin meningkat pengeluaran maka semakin meningkat konsumsi proteinnya.



Gambar 2.46 Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran, 2017

Begitu juga dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari, semakin meningkat pengeluaran maka rata-rata konsumsi kalorinya mengalami peningkatan. Asupan kalori tertinggi adalah pada kelompok Q5 sebesar 2.390 Kcal, sedangkan yang terendah adalah pada kelompok Q1, yaitu rata-rata konsumsi kalorinya sebesar 1.455 Kcal sehari.



Gambar 2.47. Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kcal) per Kapita Sehari menurut Kuintil Pengeluaran, 2017

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Bogor

Analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Bogor menggunakan analisis regresi berganda. Beberapa variable yang digunakan dalam analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor adalah Jumlah ASN, Jumlah Wirausaha, PDRB per kapita, inflasi dan pengeluaran Pemerintah Kota Bogor untuk dana bantuan sosial.

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi, model regresi ini dapat dikatakan cukup baik, karena memiliki nilai F yang signifikan pada tingkat 1%, begitu pula variablevariabelnya. Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien regresi adalah 0,9929, ini berarti variabel-variabel yang digunakan pada model dapat menerangkan 99,29% keragaman yang terjadi pada penentuan jumlah orang miskin di Kota Bogor, sisanya dijelaskan oleh variable variabel bebas lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap model, didapat bahwa variabel-variabel yang ada sesuai dengan konsep ekonomi, dimana tanda dari koefisien jumlah ASN, jumlah wirausaha, PDRB per kapita dan inflasi memiliki tanda negatif. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan terhadap varioabel-variabel tersebut, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Bogor. Sementara itu nilai koefisien dana bantuan sosial atau bansos memiliki nilai negatif, ini berarti jika terjadi kenaikan dana bansos, maka orang miskin akan meningkat.

Variabel jumlah ASN memiliki nilai koefisien sebesar -0,10. Hal ini berarti jika jumlah ASN meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 0,10%. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah PNS, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5%.

Variabel jumlah Wirausaha memiliki nilai koefisien sebesar $-0,01$. Hal ini berarti jika jumlah wirausaha meningkat sebesar 1% , maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar $0,01\%$. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah wirausaha, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5% .

Variabel PDRB per kapita memiliki nilai koefisien sebesar $-0,33$. Hal ini berarti jika PDRB per kapita meningkat sebesar 1% , maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar $0,33\%$. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PDRB per kapita, maka tingkat kemiskinan akan turun. Variabel PDRB per kapita signifikan terhadap penurunan jumlah orang miskin. Hal ini karena variabel PDRB per kapita signifikan pada level 5% .

Variabel inflasi memiliki nilai koefisien sebesar $-0,001$. Hal ini berarti jika inflasi meningkat sebesar 1% , maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar $0,001\%$. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan inflasi, maka tingkat kemiskinan akan turun, walaupun dalam model tersebut, tidak terlalu signifikan penurunannya, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5% . Penurunan ini terjadi karena inflasi yang terjadi tidak selamanya berpengaruh baik terhadap perekonomian. Terjadinya inflasi dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena dengan adanya inflasi maka akan banyak menguntungkan produsen. Berdasarkan data BPS, jumlah wirausaha di Kota Bogor lebih tinggi dari jumlah ASN. Jumlah wirausaha mencapai $10,6\%$. Selain itu, 35% masyarakat di Kota Bogor bekerja di bidang perdagangan besar, eceran, rumah tangga dan hotel. Oleh karena itu, ketika terjadi inflasi yang rendah, maka ini berpengaruh pada perekonomian Kota Bogor, sehingga akan meningkatkan kemiskinan.

Variabel dana bantuan sosial memiliki nilai koefisien yang positif, sebesar $0,00$. Hal ini berarti jika dana bantuan sosial meningkat sebesar 10% , maka akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin sebesar $0,01\%$. Variabel ini tidak terlalu signifikan, karena variabel ini tidak signifikan pada level 5% . Selain itu nilai koefisiennya pun paling rendah dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Jika dilihat di lapangan, masyarakat kita saat ini sangat senang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, ketika ada program bantuan untuk masyarakat miskin, maka ada masyarakat yang berada pada tahapan sejahtera I (di atas pra sejahtera) yang berubah menjadi miskin agar mereka bisa mendapatkan dana bantuan sosial.

Tabel 2.16.

Hasil Pengolahan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Orang Miskin di Kota Bogor

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	18.21999	2.707278	6.730002	0.021373
Ln (Jumlah ASN)	-0.10488	0.121238	-0.8651	0.478171
Ln (Jumlah Wirausaha)	-0.01734	0.046098	-0.37615	0.742958
Ln (PDRB per kapita)	-0.33586*	0.068647	-4.89251	0.039329
Ln (Inflasi)	-0.00183	0.001345	-1.36033	0.306755
Ln (Dana Bansos)	0.000923	0.001918	0.48105	0.677967
F	56.45377*			
R Square	0.992964			

Keterangan: *0 signifikan pada level 5%

2. 4. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal. Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan antara lain: (1) Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, (2) Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, (3) Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan, hal ini disebut dengan penganggur putus asa, dan (4) Mereka yang telah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja.

Penduduk yang termasuk dalam penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka dimana situasi sebagian besar angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan rutin. Jenis pengangguran ini dapat dilihat dan dihitung berdasarkan jumlah orang yang menganggur. Angkatan kerja mengembang pada tingkat yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Karenanya semua orang tidak mendapatkan pekerjaan.

Menurut BPS pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu tidak melakukan kegiatan bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja. Secara umum pengangguran dapat digolongkan atas 3 (tiga) bagian besar yaitu : Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), dan Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*).

Bila dilihat jumlah pengangguran menurut golongan umur tahun 2013-2017 dan dilihat dari periode tahun 2013- 2014 jumlah penganggur terbuka di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 17,86%, tetapi antara tahun 2014-

2015 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 76,05%, kemudian menaik kembali di tahun 2017. Perkembangan pada tahun 2017 terjadi secara umum kenaikan tingkat pengangguran secara rata-rata sebesar 8,47, untuk golongan umur yang menurun yaitu 30-34, 35-39 dan 45-49. Penurunan jumlah pengangguran tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Pada Tabel 4.18 dapat dilihat data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2013-2017. Pada periode tahun 2013-2014 tingkat penganggur terbuka yang berpendidikan SD proporsinya sebesar 22,31% turun menjadi sebesar 16,48%, keadaan yang sama dikuti oleh yang berpendidikan SMTP dan Universitas. Pada tahun 2015 tingkat penganggur terbuka yang mengalami penurunan pada pendidikan SMTP, dan SMTA Umum dari tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran pada jenis pendidikan tersebut disebabkan terbukanya peluang kesempatan kerja untuk pendidikan tersebut. Pada Tahun 2015-2016 rata-rata semua tingkat pendidikan cenderung naik dengan kenaikan rata-rata sebesar 16,67%, kecuali untuk golongan pendidikan SMTP dan SMTA umum mengalami penurunan sebesar 1,8%, dan 4,01%.

Tabel 2.17.
Penganggur Terbuka (Mencari Pekerjaan) Menurut Golongan Umur di Kota Bogor, Tahun 2013 – 2017

Golongan Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
15 - 19	12,381	16,171	14,162	11,936	17,844
20 - 24	10,434	16,161	14,911	13,492	17,819
25 - 29	9,021	3,584	8,653	10,529	3,893
30 - 34	4,111	2,619	2,578	1,736	2,804
35 - 39	3,813	1,296	1,903	1,799	1,374
40 - 44	2,006	1,164	3,027	2,991	1,213
45 - 49	1,127	568	884	584	534
50 - 54	495	568	1,353	1,350	543
55 - 59	-	936	2,471	2,470	986
60 - 64	468	436	-	-	429
65+	-	-	-	-	-
Jumlah	43,856	43,503	49,942	46,886	47,438

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Adapun yang mengalami kenaikan yang cukup besar terdapat pada pendidikan SMTA Kejuruan dengan kenaikan sebesar 2,58%, dikuti dengan golongan pendidikan Universitas 1,78%, Diploma 1,40% dan SD 0,05%. Peningkatan tersebut secara umum dapat disebabkan oleh kendala karena terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga membuat

kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan sering kali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

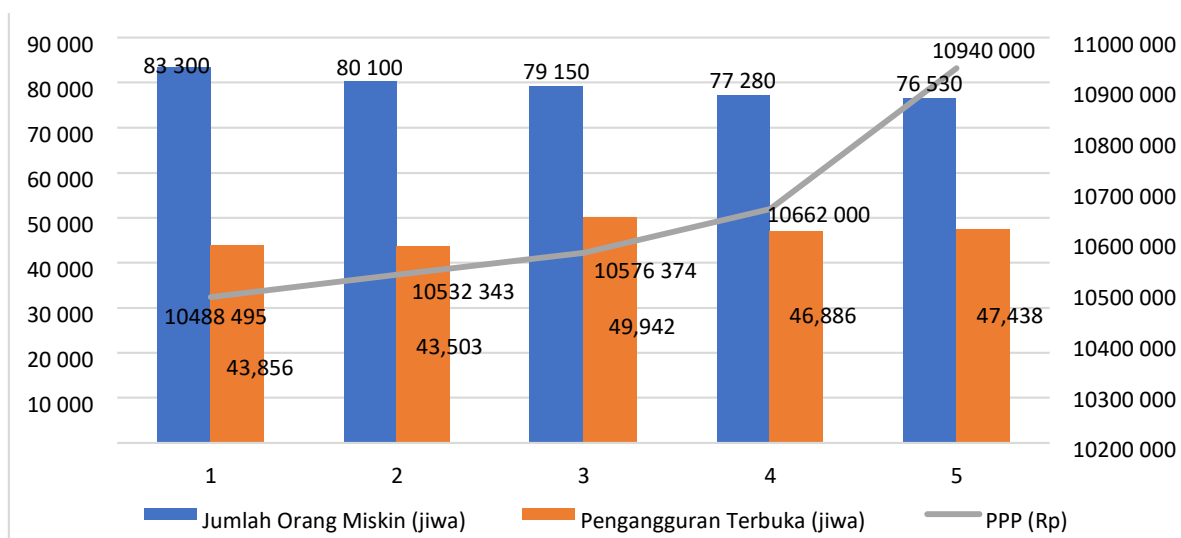
Tabel 2.18.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor
Tahun 2013 – 2017

Pendidikan	Tahun & Proporsi									
	2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
< SD	9,784	22.31	7,174	16.48	11,033	22.09	10,380	22.14	7,820	16.49
SMTP	11,072	25.25	10,148	23.31	8,207	16.43	6,859	14.63	11,152	23.51
SMTA Umum	14,318	32.65	14,662	33.68	9,900	19.82	7,416	15.82	16,097	33.93
SMTA Kejuruan	5,212	11.88	9,106	20.92	15,424	30.88	15,689	33.46	9,921	20.91
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	632	1.44	1,872	4.30	2,994	5.99	3,467	7.40	1,903	4.01
UNIVERSITAS	2,838	6.47	568	1.30	2,384	4.77	3,074	6.56	545	1.15
Jumlah/ Total	43,856	100	43,530	100	49,942	100	46,886	100	47,438	100

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2014-2018

Pada Tahun 2016-2017 rata-rata semua tingkat pendidikan cenderung menurun dengan penurunan rata-rata sebesar 6,75%, kecuali untuk golongan pendidikan SMTP dan SMTA umum mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 8,88%, dan 18,12%. Adapun pendidikan SMTA Kejuruan merupakan tingkat penurunan terbesar yaitu 12,55%. Dan penurunan terendah pada golongan pendidikan Diploma.

Kondisi pengangguran di Kota Bogor yang terus meningkat tidak sejalan dengan kondisi daya beli masyarakat Kota Bogor terus meningkat dan kondisi jumlah orang miskin terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.48.

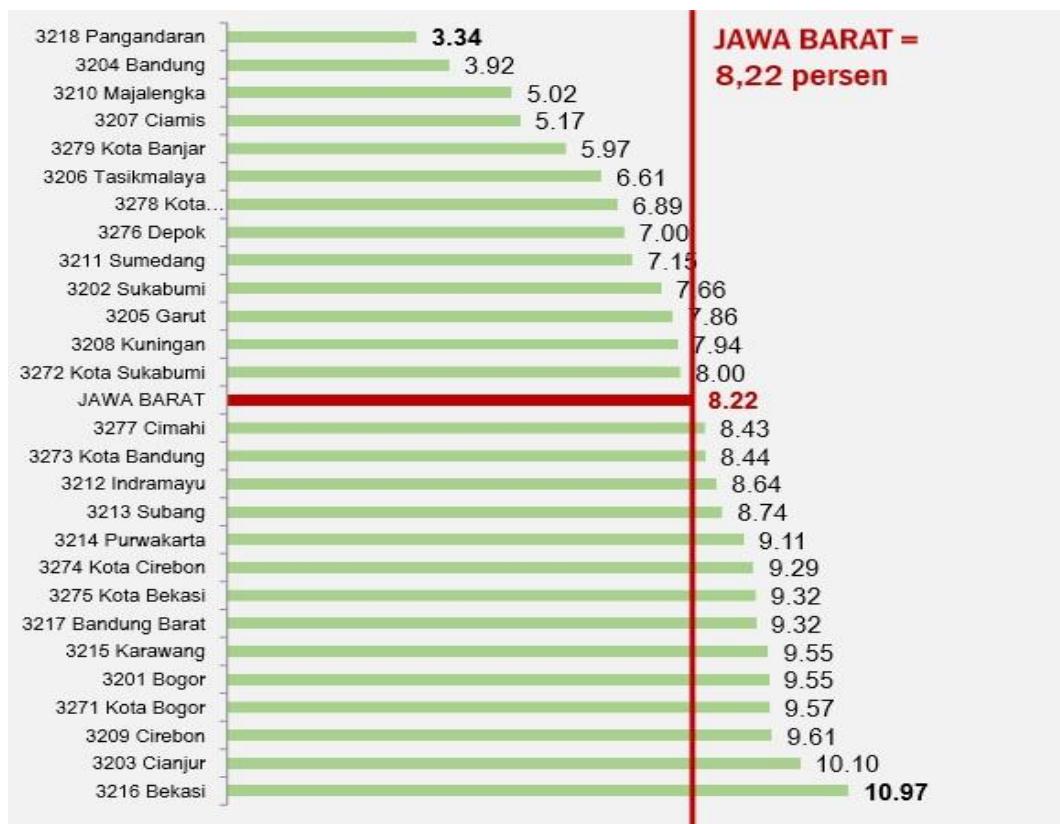


Sumber: BPS Kota Bogor, 2019

Gambar 2.48. Tingkat PPP, Jumlah Orang Miskin dan Pengangguran di Kota Bogor 2013 -2017

Pengangguran di Kota Bogor berdampak langsung terhadap angka kemiskinan. Meski mengalami penurunan tapi jika dibandingkan dengan Kota Depok, angka kemiskinan di Kota

Bogor masih cukup tinggi (BPS, 2018). Angka pengangguran mempengaruhi angka kemiskinan Kota Bogor yang sejak 2012 sampai 2017 turun secara lambat hanya sekitar 1 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat, maka berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota, Agustus 2017, diketahui bahwa TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar 10,97% dan TPT terendah Tercatat di Kabupaten Pangandaran sebesar 3,34%. TPT Kota Bogor masih berada di atas rata-rata Propinsi Jawa Barat yaitu sebesar 9,57%. Data tingkat pengangguran di wilayah-wilayah di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 4.49.



Sumber: BPS Jawa Barat (2018)

Gambar 2.49. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Jawa Barat per Agustus 2017

BAB III

CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 – 2019 akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Periode Tahun 2015-2019. Adapun hasil capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

3.1. MISI 1 MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi I RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
A	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI										
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)										
1.	Indeks E-Government	2,91	2,91	3,13	3,21	3,29	2,91	NA	2,92	3,03	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)										
1.	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	10,28	10,32	10,36	10,4	10,28	10,28	10,29	10,29	Tidak Tercapai
2.	APK SD	113,5	113,7	113,8	113,9	114	110,5	106,57	105,55	112,6	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104,7	104,75	104,8	104,9	105	108,56	105,55	101,06	104,1	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	Tidak Tercapai
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	59	62	63	64	65	60	62	70,26	73,5	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat										
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	30	30	NA	NA	NA	100	Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 1 MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
<p>Tidak Tercapai = 75 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks E-Government - RLS - APK SD - APK SMP - Nilai Rata-Rata USBN SD - Nilai Rata-Rata UN SMP 	<p>Tercapai = 25 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sekolah Terakreditasi - Persentase Inovasi Yang Berhasil diimplementasikan

3.2. MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
B.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR										
	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat										
	Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat										
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	62	62	66	100	100	65	67	76,6	95,85	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,88	72,95	73	73,08	73,15	72,88	72,95	73,01	73,12	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	105/100.000	105/100.000	105/100.000	100/100.000	95/100.000	105/100.000	110/100.000	30/100.000	60/100.000	Tercapai
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	3/1.000	Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman										
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	72,2	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/ air minum	84	86,92	90,03	94,62	98,95	63,40	64,20	90,55	90,55	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	70	60	50	40	30	87,34	84,36	72,2	72,2	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat											
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	63	65	67	70	72	63,40	64,20	65,2	65,5	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	45	50	55	60	75	100	100	100	100	Tercapai
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor											
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran											
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	8,44	7,64	6,91	6,26	5,66	11,03	10,10	6,5	9,57*	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8,96	10,89	12,35	13,35	14,89	7,90	8,89	10,25	54	Tercapai
Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan											
1.	Angka kemiskinan	7,60	7,29	7,18	7,05	7	7,60	7,29	7,11	5,93	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,47	0,43	0,43	0,41*	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat											
1.	Prosentase penduduk rawan pangan	26,29	25,29	24,29	23,29	22,29	NA	NA	24,79	18,3	Tercapai
Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat											
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi											
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,14*	6,73**	6,12	6,48	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
2.	Nilai investasi	2,1 T	2,2 T	2,3 T	2,4 T	2.5T	3,104 T	2,315 T	2.9T	3.1T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	21	23	25	27	29	21	23	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	31	34	36	38	40	30,88**	33,25**	37,18	37.18**	Tidak Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR	
<p>Tidak Tercapai = 44,4 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Masyarakat Yang memiliki JKN - Persentase Rumah Tangga Yang terlayani Air Minum yang layak - Persentase Luasan Kawasan Kumuh Sedang - Persentase Rumah Tangga BerPHBS - Tingkat Pengangguran Terbuka - Indeks Gini Rasio - Laju Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Per Kapita 	<p>Tercapai 55,56 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - AHH - Rasio Kematian Ibu Per 100.000 - Rasio Kematian Bayi Per 1000 - Persentase Rumah Tangga Yang terlayani ases air limbah - Tingkat Kepatuhan KTR - Persentase Penyerapan Tenaga Kerja - Angka Kemiskinan - Persentase Penduduk Rawan Pangan - Nilai Investasi - Pertumbuhan Jumlah Komoditi Ekspor

3.3. MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
C.	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN										
	Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang kota Bogor										
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW	75	80	85	87	90	NA	80	86	88	Tercapai
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	80	85	87	90	NA	80	86	89	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan										
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	22,15	25,50	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau										
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	NA	5,85	5,90	5,925	6	5,70	5,73	5,8	5,89	Tidak Tercapai
	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan										

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	71	72	73	74	75	72,2	74	74,34	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan											
1.	Indeks kualitas air	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	78	78,5	79	79,5	80	70,6	78,56	85,3	85,86	Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	
<p>Tidak Tercapai = 25 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik - Indeks Kualitas Air 	<p>Tercapai = 75 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi Rencana Struktur Ruang - Konsistensi Rencana Pola Ruang - Kecepatan Rata-Rata 150 Ruas Jalan (Arteri dan Kolektor) - Persentase Volume Sampah Terangkut - Persentase Reduksi Sampah - Indeks Kualitas Udara

3.4. MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 4 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
	Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan										
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.348.953	4.783.848	5.262.053	5.788.456	63.67.303	4.786.023	5.310.072	7.965.987	6.106.582	Tercapai
	Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif										
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	253	194	148	57	164	NA	40	148	57	Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	
Tidak Tercapai = 0 %	Tercapai = 100 % <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kunjungan Wisatawan - Jumlah Wirausahawan Ekonomi kreatif yang produktif

3.5. MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 5 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
E.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI										
	Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel										
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	B	BB	A	CC	CC	B	B	Tidak Tercapai
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	Tercapai
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	CC	B	BB	NA	NA	B	B	Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	2	3	1	1	1	1	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,65	3,2	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,21	3,39	Tidak Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI	
<p>Tercapai = 50 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Level Maturitas SPIP - Indeks Kepuasan Masyarakat 	<p>Tercapai = 50 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penilaian LPPD - Indeks RB - Opini BPK

3.6. MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi 6 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

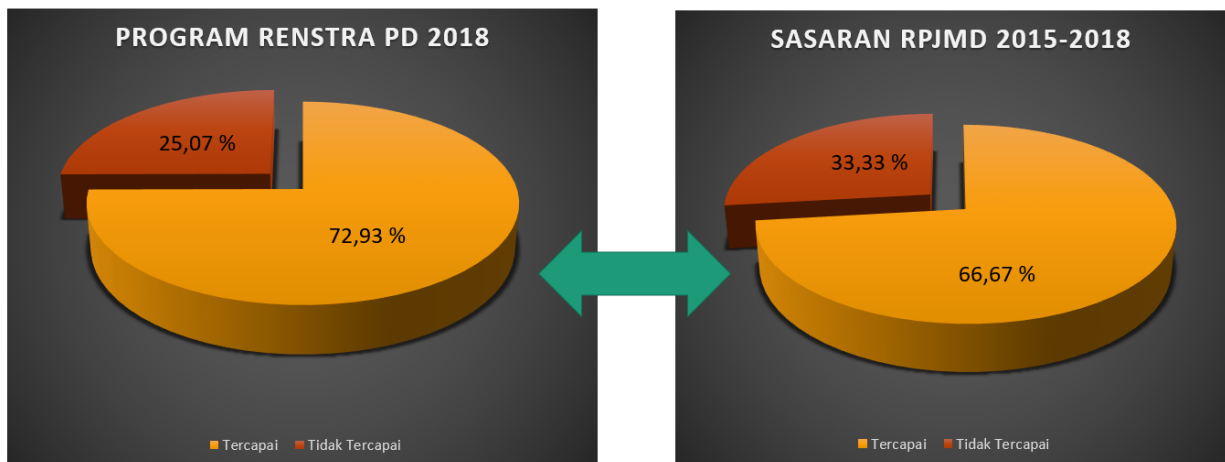
No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI										
	Sasaran 1 : Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat										
1.	Angka kriminalitas	<0,142	<0,143	<0,144	<0,145	<0,146	0,142	0,143	0,144	<0,145	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,15	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	10	10	10	10	10	6,32	23,78	21,99	21,99	Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat										
1.	Prosentase tanggap penanganan bencana	85	87	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatkan nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan										
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	80	85	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai

Atas dasar tabel di atas, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	
Tidak Tercapai = 0 %	Tercapai = 100 % <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kriminalitas - Prevalensi HIV Aids - Persentase Penurunan Kasus Narkoba - Persentase Tanggap Penanganan Bencana - Persentase Deteksi Dini Permasalahan Intoleransi - Persentase pencegahan dan penanganan Konflik sara - Persentase kemudahan mendirikan Tempat Ibadah -

Gambaran capaian sebagaimana dalam grafik berikut :

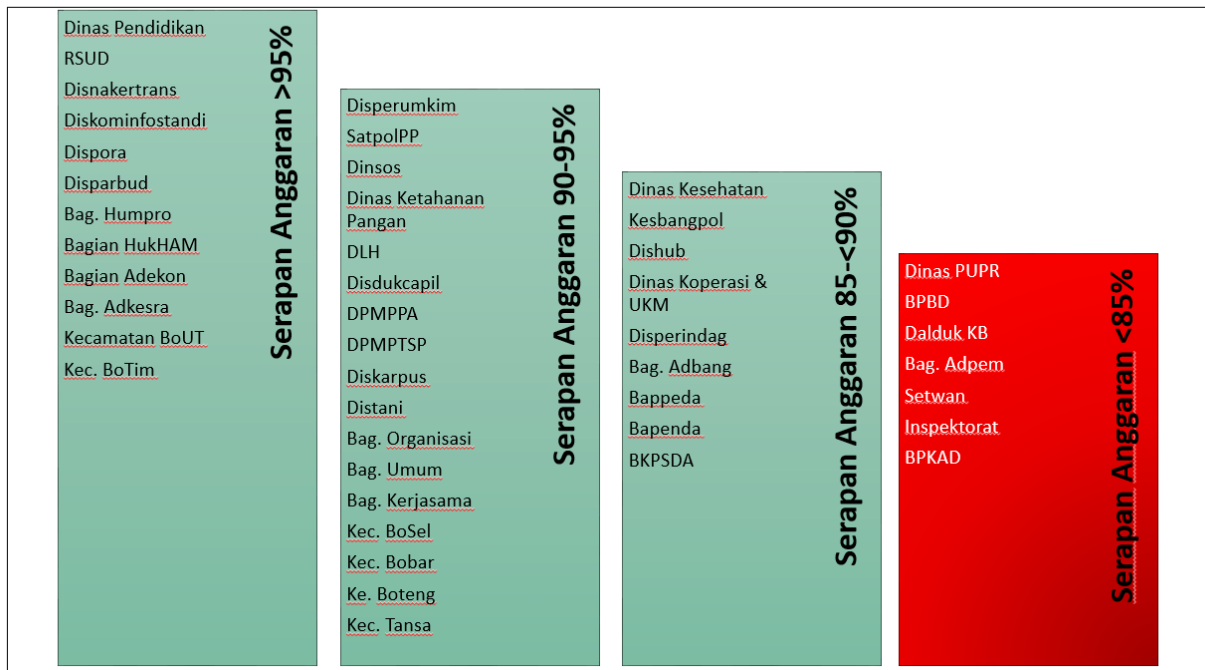
CAPAIAN KINERJA RPJMD KOTA BOGOR 2015-2018



Gambar 3.1. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bogor

3.7. EVALUASI SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

EVALUASI SERAPAN ANGGARAN TA 2018



Gambar 3.2. Evaluasi Serapan Anggaran Tahun 2018

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran 2018

NO	SKPD	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI PROGRAM		
		PAGU	REALISASI	%	Jumlah Indikator Program	Jumlah Indikator Program tercapai	%
1	DINAS PENDIDIKAN	188.894.266.546	181.314.371.849	95,99	29	17	58,62
2	DINAS KESEHATAN	167.426.470.482,00	146.321.884.208	87,39	78	51	65,38
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.680.197.000,00	7.201.377.140	93,77	7	6	85,71
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	170.000.000.000,00	177.412.181.879	104,36			
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	261.458.804.263,00	212.254.534.587	81,18	26	19	73,08
6	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	194.874.329.000,00	184.614.287.981	94,74	15	10	66,67
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.123.875.000,00	8.634.913.243	94,64	4	4	100
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.845.420.000,00	4.880.411.046	83,49	5	5	100
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.669.519.000,00	1.492.751.052	89,41	11	10	90,91
10	DINAS SOSIAL	5.291.415.000,00	4.923.847.920	93,05	12	5	41,67
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.671.090.000,00	3.764.778.985	102,55	9	5	55,56
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.669.615.000,00	3.331.019.400	90,77	9	6	66,67
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88.463.403.120,00	81.311.692.793	91,92	27	21	77,78
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.748.647.000,00	8.969.185.189	92,00	14	10	71,43
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.610.965.000,00	5.222.044.054	93,07	23	22	95,65

NO	SKPD	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI PROGRAM		
		PAGU	REALISASI	%	Jumlah Indikator Program	Jumlah Indikator Program tercapai	%
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.474.915.600,00	3.398.165.292	75,94	4	3	75
17	DINAS PERHUBUNGAN	40.177.477.333,00	35.251.548.189	87,74	16	11	68,75
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	11.469.670.800,00	10.925.485.237	95,26	5	4	80
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.513.000.000,00	5.698.083.248	87,49	10	6	60
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.494.239.900,00	6.103.758.093	93,99	8	7	86
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	20.465.160.000,00	20.093.819.654	98,19	16	9	56,25
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.686.365.000,00	6.409.215.150	95,85	6	4	66,67
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.525.905.000,00	3.292.719.742	93,39	9	3	33,33
24	DINAS PERTANIAN	5.862.615.500,00	5.503.464.128	93,87	5	5	100
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.158.707.000,00	4.626.305.576	89,68	9	8	88,89

NO	SKPD	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI PROGRAM		
		PAGU	REALISASI	%	Jumlah Indikator Program	Jumlah Indikator Program tercapai	%
26	SEKRETARIAT DAERAH	60.065.528.260,00	55.285.386.112,00	92,04	28	26	92,86
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	6.804.689.080,00	6.534.119.844,00	96,02			
	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.527.140.000,00	1.482.104.172,00	97,05			
	BAGIAN ORGANISASI	1.589.230.000,00	1.445.498.130,00	90,96			
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2.466.142.000,00	2.049.364.466,00	83,10			
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1.957.085.000,00	1.906.118.624,00	97,40			
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.572.355.000,00	7.274.341.000,00	96,06			
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.075.690.000,00	1.820.816.118,00	87,72			
	BAGIAN UMUM	35.197.637.180,00	31.953.695.921,00	90,78			
	BAGIAN KERJASAMA	875.560.000,00	819.327.837,00	93,58			
27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	89.111.467.000,00	69.021.657.694	77,46	1	1	100

NO	SKPD	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI PROGRAM		
		PAGU	REALISASI	%	Jumlah Indikator Program	Jumlah Indikator Program tercapai	%
28	KECAMATAN BOGOR UTARA	8.298.370.000,00	7.902.369.485	95,23			
29	KECAMATAN BOGOR SELATAN	14.493.519.000,00	13.447.875.130	92,79			
30	KECAMATAN BOGOR TIMUR	7.017.250.000,00	6.795.588.453	96,84			
31	KECAMATAN BOGOR BARAT	14.722.726.000,00	13.750.439.874	93,40			
32	KECAMATAN BOGOR TENGAH	9.777.965.000,00	9.131.061.899	93,38			
33	KECAMATAN TANAH SAREAL	9.941.115.000,00	9.255.410.582	93,10			
34	INSPEKTORAT	3.600.635.000,00	2.975.112.744	82,63	10	9	90
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.841.895.004,00	8.663.470.521	88,03	29	19	65,52
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.483.036.500,00	6.348.100.916	74,83	4	3	75
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18.876.312.325,00	16.931.454.122	89,70	11	Belum Ada Data	
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	13.710.904.825,00	11.696.538.109	85,31	5	5	100
	TOTAL Belanja Langsung	1.502.196.796.458,00	1,364,156,311,276,-	90,81			

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Evaluasi capaian kinerja program merupakan salah satu unsur yang harus dilakukan dalam proses pengendalian evaluasi sesuai dengan amanat Permendagri Nomo 86 Tahun 2017. Hasil evaluasi capaian program meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci evaluasi capaian kinerja program tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Program

Bidang Urusan Pendidikan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	40,87	59	55	56	57	58	59	36,6	46,56	47,03	49,06	Tidak Tercapai
		Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD -PAUD formal (%)	74	79	75	76	77	78	79	48,7	49	51	100	Tercapai
		-PAUD nonformal(%)	18	23	19	20	21	22	23	20	21	22	24	Tercapai
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A	113,33	114	113,5	113,57	113,8	113,9	114	97,8	106,5	105,53	112,64	Tidak tercapai
		angka partisipasi kasar SMP/MTS/paketB	104,66	105	104,7	104,75	104,8	104,9	105	107,26	103,6	103,95	104,01	Tidak Tercapai
		presentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	77,31	86	79	80	82	84	86	82	82	95	99,01	Tercapai
		Presentase jumlah ruang kelas SMP atau MTs yang memadai(%)	87,25	96	88	90	92	94	96	88	89	95,65	99,7	Tercapai
		Nilai rata rata ujian akhir standar nasional (USBN)SD	75,47	76	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	Tidak Tercapai
		Nilai rata rata Ujian Nasional Tingkat SMP	65	67,75	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	Tidak Tercapai
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	45	54	47	48	49	51	59	33	35	36	38	Tidak Tercapai
		Presentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	53	60	54	55	57	58	67	46	49	54	55	Tidak Tercapai
		persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	62,77	67	63	64	65	66	67	40	42	55,3	56	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
4	Pendidikan non formal	Presentase jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	90	100	92	94	69	98	100	100	100	100	100	Tercapai	
		presentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	60	21	17	18	19	20	21	20	21	24	28	Tidak Tercapai	
		Presentase kelulusan paket A(%)	NA	100	92	94	69	98	100	100	100	100	100	Tercapai	
		presentase kelulusan paket B(%)	NA	93	89	90	61	92	93	100	100	100	100	Tercapai	
		presentase kelulusan paket C (%)	NA	95	91	92	63	94	95	100	100	100	100	Tercapai	
5	Manajemen layanan pendidikan	Presentase satuan pendidikan yang terakreditasi A	58	65	59	62	63	64	65	59	60	70,26	73,5	Tercapai	
		Presentase guru berprestasi di semua jenjang (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tercapai	
		siswa berprestasi													
		tingkat provinsi	45	60	56	57	58	59	60	46	36	37	21	Tidak Tercapai	
		tingkat nasional	11	16	12	13	14	15	16	12	10	13	18	Tercapai	
		tingkat internasional	14	19	15	16	17	18	19	15	16	7	22	Tercapai	
		satuan pendidikan/lembaga yang berprestasi													
		tingkat provinsi	2	5	2	2	3	4	5	1	1	2	3	Tidak Tercapai	
		tingkat nasional	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	Tercapai	
		jumlah pendidik/tutor berprestasi tingkat provinsi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	Tercapai	
		jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	NA	30	16	17	18	29	30	13	15	18	13	Tidak Tercapai	
		jumlah siswa yang menerima BOS kota	113.433	114.171	113.583	113.783	113.933	114.046	114	94,55	95,24	111,02	109,642	Tercapai	
		terpenuhinya dokumen evaluasi pelajar siswa disatuan pendidikan	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Tercapai	
penurunan jumlah tawuran pelajar	7	5	12	11	7	6	5	9	7	6	2	Tercapai			

Bidang Urusan Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	presentase penduduk miskin yang memiliki JKN	30	100	62	66	70	90	100	65	70	88,78	95,85	Tercapai	
		presentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73,63	79,5	Tidak Tercapai
		presentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (home visite)	NA	85	81	82	83	84	85	64,5	91,8	90	93	Tercapai	
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	presentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	92	94	92	92,5	93	93,5	94	92,8	93,3	92,1	96,05	Tercapai	
		presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	99,1	99,6	99,4	100	Tercapai	
3	peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	presentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan balita)(%)	90,3	95	91	92	93	94	95	91	95,8	93,9	90	Tidak Tercapai	
4	upaya kesehatan masyarakat	presentase pelayanan kesehatan pada usia pendidkn dasar	96	97,5	96	96	96,5	97	97,5	97,8	96,1	99,57	100	Tercapai	
		persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		persentase pemeriksaan laboratorium dipuskesmas(%)	10	20	13	15	18	20	20	20	13	15	18	20	Tercapai
		persentase calon jamaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		persentase kelompok olahraga yang dibuat	69	83	72	75	78	80	83	83	72	75	78	80	Tercapai
		persentase kasus KTA yang di tangani (%)	11	23	13	15	17	20	23	23	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
		Jumlah penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	20	100	40	50	60	70	80	40	50	60	70	Tercapai	
		Persentase keluarga mandiri (%)	81,8	92	83	85	87	90	92	83	85	80	90	Tercapai	
		Persentase pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%)	20	75	50	60	65	70	75	50	60	64	70	Tercapai	
5	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase posbindu yang dibina (%)	85	93	87	89	90	92	93	87	89	76,3	100	Tercapai	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	100	100	41,8	52,7	76,3	100	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar	30	100	44	58	72	86	100	100	41,8	52,7	76,3	100	Tercapai
		Persentase puskesmas ramah lansia (%)	35	60	40	45	50	55	60	60	100	100	100	100	Tercapai
6	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,47	0,15	0,37	0,3	0,25	0,2	0,15	0,35	0,6	0,07	0,07	Tercapai	
		persentase balita gizi kurang	8	6	8	7,5	7	6,5	6	8	5	5,27	4,11	Tercapai	
		persentase balita pendek (%)	2,48	2	2,37	2,28	2,2	2	2	2	9,3	5,9	1,22	0,9	Tercapai
		Persentase cakupan ASI eksklusif (%)	76,4	90	70	75	80	85	90	90	77	49,5	50,7	49,95	
		Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A (%)	90,41	95	91	92	93	94	95	95	91	94,9	97,2	93,5	Tidak Tercapai
		Persentase Balita yang ditimbang (%)	70	100	80	85	90	95	95	100	80	93,4	88,25	77,6	Tidak Tercapai
		Persentase remaja putri mendapat Fe (%)	0	35	15	20	25	30	35	35	15	11,7	17,07	24,77	Tidak Tercapai
		Persentase Ibu hamil KEK (%)	7	4	5,7	5	4,5	4	4	4	19	3,9	5,67	3,99	Tercapai
7	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate) (%)	84	86	85	85	86	86	86	85	86	85,6	81,22	Tidak Tercapai	
		Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100,000 penduduk)	75	45	60	55	50	47	45	60	116	79	90,32	Tidak Tercapai	
		Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD (%)	93,5	95,4	95	95,1	95,2	95,3	95,4	95,4	94	91,79	92,1	93	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		Persentase penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR) (%)	91,4	92	91,52	91,64	91,76	91,88	92	91,52	107	108,3	115	Tercapai
		Persentase angka konversi TBC (%)	82	87	83	84	85	86	87	83	86	84	79,6	Tidak Tercapai
		persentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	91	90	86	87	88	89	90	85	86	86,3	89,3	Tercapai
		Prevalensi HIV/Aids	<5	3	<5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,42	Tercapai
		Persentase penemuan diare balita (%)	96,7	95	91	92	93	94	95	96,8	115,8	113,6	109	Tercapai
		Persentase penemuan kasus pneumonia Balita (%)	78,6	100	80	85	90	95	100	80	76,8	63,02	100	Tercapai
		Presentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	80	85	21	82	83	84	85	81	87	94,2	94,8	Tercapai
		Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun (%)	68,4	95	70	75	80	85	90	70	84,56	75	37,5	Tidak Tercapai
		Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC) (%)	6,6	30	10	15	20	25	30	10	48,7	13,4	15,07	Tidak Tercapai
		Persentase ODHA yang mendapat ART (%)	45,4	85	65	70	75	80	85	65	48,91	18,4	21,9	Tidak Tercapai
8	Pencegahan dan pengendalian	Prevalensi Hipertensi	25,8	23,38	25,28	24,77	24,28	23,79	23,38	1,18	3,91	4,25	4,4	Tercapai
		Prevalensi Diabetes Militus	6,9	4,4	6,3	5,9	5,3	4,8	4,4	0,25	0,89	0,81	1,3	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
	penyakit tidak menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular Terintegrasi	60	100	70	80	90	95	100	70	90	100	100	Tercapai
		Persentase posbindu yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular terintegrasi	25	55	35	40	45	50	55	35	40	89,28	89,28	Tercapai
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	80	100	85	90	95	100	100	90	95	100	100	Tercapai
9	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas per 30,000 penduduk	1 : 41.667	1 : 30.000	1 : 41.667	1 : 39.334	1 : 37.000	1 : 34.667	1 : 30.000	1 : 43.663	1 : 44.362	1 : 40.423	1 : 43.873	Tidak Tercapai
		Persentase puskesmas/pustu terbangun	86	100	86,9	90,2	93,4	96,7	100	100	100	140	140	Tercapai
		Persentase puskesmas dengan perawatan	50	100	50	67	84	100	100	100	100	82,3	82,3	Tidak Tercapai
		Persentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR	0	100	4,2	25	64	80	100	4,2	25	64	88	Tercapai
10	standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase sarana kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	0	100	0	16,7	48	72	100	0	0	48	68	Tidak Tercapai
		Jumlah puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	12	4	4	8	8	12	20 (masih dalam proses kajian)	4 (masih dalam proses kajian)	0	0	Tidak Tercapai
		Persentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	65	90	75	80	85	90	90	60,56	12,5	88,89	78	Tidak Tercapai
11	Promosi kesehatan dan	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	22,49	75	45	50	55	60	75	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	61,7	72	63	65	67	70	72	63,4	65	64,2	65,5	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
	Pemberdayaan Masyarakat	persentase RW Siaga(%)	34,8	82,5	34,8	35	35	40	45	35	33,71	35,1	35,6	Tidak Tercapai
		Persentase Posyandu Purnama Mandiri(%)	55	75	55	60	65	70	75	60,3	60,16	65,5	86,65	Tercapai
12	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	79,3	82,5	80,5	81	81,5	82	82,5	70	42,6	68	72,7	Tidak Tercapai
		Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat(%)	27,6	31,5	29,5	30	30,5	31	31,5	29,5	29,03	50	28,51	Tidak Tercapai
		Persentase Rumah sehat(%)	79,5	82,5	80,25	81	81,75	82,5	82,5	70,2	79,4	82	80,5	Tidak Tercapai
		Persentase akses pengelolaan sampah(%)	66,9	70,5	68,7	68,8	70	70,2	70,5	68,7	72,21	61,7	61,81	Tidak Tercapai
		Persentase kelurahan STBM(%)		90	40	60	70	80	90	40	60	70	80	Tercapai
		Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	75	93	89	90	91	92	93	89	88,4	98,6	100	Tercapai
		Persentase akses minum(%)	87,4	100	89	92	95	98	100	89	88,4	98,6	98,65	Tercapai
		Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibina	60	100	70	80	90	100	100	70	42,8	28	100	Tercapai
		Persentase TTU yang memenuhi syarat	54	64	56	58	60	62	64	65	67	69,2	72,45	Tercapai
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	58	68	60	62	64	66	68	56,24	75,9	66,95	66,96	Tercapai
13	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jenis obat dengan tingkat kesiediaan minimal 18 bulan(%)	97	100	100	100	100	100	100	100	98,9	100	99,3	Tidak Tercapai
		Persentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan(%)	90	100	95	98	99	100	100	74	94,6	72,2	74	Tidak Tercapai
		Persentase sarana industri rumah tangga pangan(IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)	90	95	95	95	95	95	95	95	90,66	86,25	90,86	Tidak Tercapai
14	Manajemen kesehatan	persentase puskesmas yang minimal memiliki 10 jenis jabatan fungsional tertentu		95	70	76	85	90	95	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun 2018
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		persentase puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis jabatan pelaksana		95	40	45	75	90	95	NA	NA	NA	NA	Tercapai
		persentase rekrutment tenaga kesehatan sesuai standar dan kompetensi		95	40	45	75	90	95	NA	NA	75	100	Tercapai
		proses tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi		95	40	45	75	90	95	NA	NA	75	100	Tercapai
		jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi terintegrasi		95	40	45	75	90	95	NA	NA	80	100	Tercapai

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pembangunan jalan dan jembatan	jumlah panjang ruas jalan utama (arteri,kolektor,&lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011-2031(km)	266,468	272.018	266,818	2701,418	270.418	271,418	272,018	266.868	270.122	270.245	270.245	Tidak Tercapai
		jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	0	4	0	0	0	2	4	0	1	1	1	Tidak Tercapai
		jumlah panjang ruas jalan yang di lebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	5,74	0	0	1,8	3,4	5,74	3.148	5.986	6.914	7.381	Tercapai
2	rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelasnya (km)	48,587	58,9	50,587	51,857	54,857	56,857	58,587	53.824	58.425	63.535	70.926	Tercapai
		persentase panjang jalan berkondisi mantap(baik&sedang)(%)	86	88,5	86,5	87	87,5	88	88,5	87,6	88,15	88,32	88,59	Tercapai
3	pembangunan saluran drainase/gorong gorong	penurunan jumlah lokasi rawan genangan	16	4	16	12	9	6	4	17	19	27	27	Tercapai
4	pembangunan prasarana pedestrian dan pesepeda	panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian)(km)	0,545	24.813	5.399	10,253	15,107	19,961	24,813	6.758	10.841	14.683	16.012	Tidak Tercapai
		panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	249,402	271.062	250,62	255,292	260,762	266,592	271,062	252.334	257.468	258.307	259.288	Tidak Tercapai
		jalur sepeda yang di kembangkan (koridor)	0	3	0	1	2	2	3	0	1	1	2	Tidak Tercapai
		rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan(%)	65	90	70	75	80	85	90	70	75	75	80	Tidak Tercapai
5	pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa,dan jaringan pengairan lainnya	panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Tercapai
6		panjang sungai berkodisi baik(KM)	174,54	184,54	176,54	178,54	180,54	182,54	184,54	180.245	183.965	189.040	193.086	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
	pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	panjang sungai yang di tingkatkan kapasitasnya (km)	0	5	0	2	3	4	5	0	0	0	0	Tidak Tercapai
		jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	5	7	5	6	6	7	7	3	5	6	5	Tidak Tercapai
7	pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/ terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	66,4	67,58	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	67,21	Tercapai
		prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM(%)	NA	1,65	1,07	1,07	1,37	1,46	1,65	NA	1,07	1,82	0,54	Tidak Tercapai
		jumlah penduduk berakses air minum bersih (nonPDAM)(intervensipertahun) (SR)	NA	4179	2679	2679	3,179	3,679	4,179	NA	2,679	2,746	2,746	Tidak Tercapai
		prosentase rumah tangga berakses air minum bersih(PDAM)	NA	97,3	82	85,85	88,75	93,16	97,3	82	85,85	90,55	91,44	Tidak Tercapai
8	perencanaan tata ruang	tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang		100	20	40	80	75	100	20	40	50	50	Tidak Tercapai
9	Pengaturan, pembinaan, pengawasan jasa konstruksi	presentase penyediaan konstruksi yang mendapat pembinaan, teknis	NA	90	50	60	70	80	90	50	60	70	80	Tercapai
10	peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	rasio keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		4,2083333	1 : 10.000	1 : 9000	1 : 8000	1 : 7000	1 : 6000	-	-	-	1 : 7000	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
11	lingkungan sehat perumahan	panjang jalan lingkungan berkondisi baik (n2)	548,153	1.048.153	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	NA	264.239	52.103	187.002	Tercapai	
		panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (n2)	767.400	867.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NA	67.891	19.890	49.665	Tercapai
		jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun(unit)	17	47	6	6	6	6	6	6	NA	15	26	40	Tercapai
		jumlah lokasi rawan longsor yang di bangun TPTnya (lokasi)	NA	600	120	120	120	120	120	120	NA	330	469	745	Tercapai
12	Pemanfaatan ruang	prosentase kecapaian target indikasi program rencana tata ruang		100	20	40	60	80	100	20	40	60	80	Tercapai	

Bidang Urusan RSUD

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pelayanan kesehatan penduduk miskin	presentase tempat tidur kelas III RSUD (%)	0	50	40	43	45	47	50	43,7	71,5	68,81	-	
		BOR kelas III RSUD	NA	87	75	80	83	85	87	75	83,78	85	85,29	Tercapai
		persentase masyarakat miskin yang terlayani di RSUD kota Bogor	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	persentase pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD(%)	50	85	73,55	75	77	80	85	73,5	85,7	87	81,05	Tercapai
		persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK	NA	75	45	57,5	65	70	75	45	64,3	76	75,5	Tercapai
3	standarisasi pelayanan kesehatan	persentase pelayanan minimal RSUD Kota Bogor	NA	75	NA	NA	70	72	75	NA	NA	81,8	91,4	Tercapai
4	pengembangan layanan unggulan	Penigkatan pelayanan pasien kanker,jantung,dan gagal ginjal	NA	53.000	26,841	37,452	44.200	48.700	53.000	26841	37452	47310	73419	Tercapai

Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	lingkungan sehat perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	0	17	3	6	9	14	17	10	4	16	16	Tercapai
		Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusunami(%)	60	98	60	60	69	89	98	89,96	92,5	44,84	76,61	Tidak Tercapai
		Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	71,5	85,5	74,3	77,1	79,9	82,7	85,5	99,06	98,114	78,4	70,59	Tidak Tercapai
2	Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU yang terkelola dengan baik(%)	46	46,25	46,05	46,1	46,15	46,2	46,25	46,05	46,1	46,15	46,2	Tercapai
		Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan utilitas perkotaan	Prosentase luas kawasan pemukiman yang sudah dilayani PJU	69	74	70	71	72	73	74	70	71	72	73,65	Tercapai
4	Penataan dan pengaturan bangunan dan gedung	Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	NA	90	90	90	90	90	90	100	100	100	99,32	Tercapai
5	Pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)	90	98	90	92	94	96	98	96,94	98,47	98,9	99,74	Tercapai
		Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	70	80	72	74	76	78	80	77,86	88,83	88,83	82,32	Tercapai
		Tindak lanjut atas pengaduan tata ruang(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	rasio keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian ruang		1:6000	01:10,0	01:09,0	01:08,0	01:07,0	01:06,0	-	-	-	-	
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (HA)	39,69	43	0,81	0,22	0,4	0,93	0,93	0,84	0,22	0,39	0,73	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan di tingkatkan kualitasnya (HA)	39,69	42,08	39,69	40,53	40,75	41,15	42,08	40,16	40,38	40,75	41,15	Tercapai
8	Penataan prasarana sarana umum perumahan	Prosentase PSU yang di serahkan pengembang	NA	50	NA	50	50	50	50	NA	NA	0	33	Tidak Tercapai
9	Perencanaan Pembangunan sarana Prasarana	tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan saran prasarana		100	20	40	60	80	100	40	60	60	100	Tercapai

Bidang Urusan : Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pemeliharaan kantranibmas dan pencegahan tindak kriminal	persentase penegakan perda KTR	70	80	72	74	78	80	80	85	90	90	90	Tercapai
		persentase bangunan melanggar yang di tertibkan	0	98	90	92	96	98	98	98	98	98	98	Tercapai
		Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	peningkatan keiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time)	75	95	78	80	85	90	95	95	95	95	95	Tercapai

Badan Penanggulangan Bencana daerah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana	0	8	-	2	2	2	2	NA	2	4	5	Tercapai
		Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	0	23	0	9	4	5	5	NA	9	4	5	Tercapai
2	Tanggap darurat bencana	Tingkat penanganan kejadian bencana	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Pemulihan Pasca Bencana	Prosentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Tingkat penguatan kelembagaan	0	100	80	90	-	-	100	80	90	90	100	Tercapai

Kantor Kesbangpol

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi dialog lintas agama (minimal 1x sebulan)	NA	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	Tercapai	
		prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
		prosentase pembinaan terhadap aparaturnya dari masyarakat	NA	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Tercapai
		jumlah pelanggaran norma agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
		jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai
		prosentase pembinaan terhadap LSM dan dormas	NA	50	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	Tercapai
2	pendidikan politik masyarakat	tingkat partisipasi dalam pemilu kota (%)	75	78	0	0	0	78	0	0	0	0	75,85	Tidak Tercapai	
		tingkat partisipasi dalam pemilu provinsi (%)	66	70					70	0	0	0	75	Tercapai	
		tingkat partisipasi dalam pemilu nasional (%)	75	78					78	0	0	0	0	Tercapai	
3	peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	angka kriminalitas	0,142	<0,146	<0,142	<0,143	<0,144	<0,145	<0,146	NA	0,00049	0,00051	0,00048	Tercapai	

Bidang Urusan : Sosial

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	43	63	55	57	59	61	63	44	43,1	44,39	72,7	Tercapai	
		prosentase jumlah anjal Gepeng dan PSK yang berdaya	63	75	63	69	800	850	900	50,45	103,87	202,29	70,33	Tidak Tercapai	
		persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	pembinaan panti asuhan/jompo	presentase panti asuhan/yayasan yang terbina (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
3	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, pak, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	30	67	30	61	63	65	67		29,9	60,75	108,21	Tercapai	
4	pembinaan anak terlantar	prosentase jumlah anak terlantar / anak jalanan yang di bina	13	41	13	32	35	38	41	6,38	13,22	32,25	21,22	Tidak Tercapai	
5	pembinaan para penyandang cacat dan trauma	prosentase penyandang cacat trauma yang dibina	4	12	4	6	8	10	12	20,82	3,96	5,66	2,96	Tidak Tercapai	
6	pembedayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	35,51	Tidak Tercapai	
		jumlah makam pahlawan yang terpelihara/terawat	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1060	1060	1060	1060	Tercapai
		jumlah PSKS yang terbina		267	251	261	263	265	267	243	243	228	228	Tidak Tercapai	
		jumlah PSKS yang menerima bantuan	6	18	10	12	14	16	18	10	10	1	1	Tidak Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
7	pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	jumlah pengurusan/pemulasaraan mayat telantar	24	48	24	30	42	48	48	-	-	-	-	

Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Pengembangan lembaga ekonomi kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	240	540	300	360	420	480	540	300	360	420	480	Tercapai
		Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%)	65	90	70	75	80	90	90	70	75	80	90	Tercapai
		Jumlah pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	Tercapai
		Jumlah penerima KUBE Gakin	2.762	2.887	2.787	2.812	2.837	2.862	2.887	2.787	2.812	2.837	2.862	Tercapai
		Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	400	900	500	600	700	800	900	500	600	700	800	Tercapai
2	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,7	0,76	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,72	0,73	0,74	0,75	Tercapai
		Masyarakat dan kelompok binaan yang mengikuti Lomba kelurahan (orang)	150	650	250	350	450	550	650	250	350	450	550	Tercapai
		Persentase partisipasi masyarakat	80	90	80	85	85	90	90	85	90	90	95	Tercapai
		Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	80	90	80	85	85	87	90	80	85	85	90	Tercapai

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	65	75	67	69	71	73	75	70	85	75	75	Tercapai	
2	peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan politik (orang)	500	750	550	600	650	700	750	550	600	650	700	Tercapai	
		persentase kepala keluarga perempuan yang di bina (%)	NA	45	25	30	35	40	45	30	30	50	40	Tercapai	
		persentase posyandu berstrata mandiri	NA	45	25	30	30	40	45	13	19	22,37	47,74	Tercapai	
		jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS (KK)	500	1000	600	700	800	900	1.000	600	700	800	900	Tercapai	
3	penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	10	20	12	14	16	18	20	12	14	16	18	Tercapai	
		persentase perempuan berpolitik(%)	NA	15	5	7	10	12	15	17,8	17,8	17,8	17,8	Tercapai	
		jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	74	74	74	74	74	74	74	0	74	74	74	Tercapai
		jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	238	68	136	170	204	238	68	136	170	204	Tercapai	
		Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak hak anak	100	272	136	170	204	238	272	136	170	204	238	Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	Tercapai
		jumlah peserta pelatihan perencanaan penganggaran dan resnponsif gender (PPRG)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	30	Tercapai
4	peningkatan peran perempuan di kelurahan	jumlah anggota organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (orang)	150	650	250	350	450	550	650	250	350	450	550	Tercapai
		Jumlah lingkungan ramah anak (LRA)	74	104	80	86	92	98	104	6	6	6	6	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Ketenagakerjaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja(%)	67,41	67,22	63,08	64,34	64,62	65,9	67,22	55.10	64.79	64.79	63,91	Tidak Tercapai
2	perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	jumlah pekerja anak	100	100	100	100	100	100	100	25	25	Balai Pengawasan Provinsi		
		jumlah angka kecelakaan kerja	344	289	333	322	311	300	289	247	-	Balai Pengawasan Provinsi		
3	peningkatan kesempatan perluasan kerja dan transmigrasi	jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.514	1,347	1387	1,482	1.470	1.514	2033	1309	2781	2189	Tercapai
		persentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%)	7,88	16,86	8,96	9,19	10,89	11,59	14,63	7.90	8.89	10.25	53.86	Tercapai
		jumlah wirausaha baru	128	944	253	194	148	57	164	0	0	487	103	Tercapai
		presentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	26	29	27	27	28	28	39	21	36	21	152	Tercapai
4	pembinaan hubungan industri dan lembaga ketenagakerjaan	penetapan besaran UMK	2.493.941	3.852.048	2.634.632	3.022.365	3.272.143	3550275	3.852.048	2.658.155	3.022.765	3.557,15	3.842,79	Tercapai

Bidang Urusan : Transmigrasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pembinaan dan penempatan transmigrasi	jumlah KK transmigrasi yang mengikuti transmigrasi	34	2	3	2	2	2	2	2	0	0	0	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan energi per kapita (AKE= 2,200 kkal/hr)	2.318	2.220	2.298	2.278	2.259	2.239	2.220	2318	2394,6	2482,7	2512,8	Tercapai	
		ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari)	91,1	57	84,28	77,46	70,46	63,82	57	91,1	102,3	105,3	89,4	Tercapai	
		Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan	27,29	22,29	26,29	25,29	24,29	23,29	22,29	-	-	24,79	18,3	Tercapai	
		Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Tercapai
		Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton	-	91,19	57,59	65,69	74,09	82,69	91,19	4,46	0	2	5,4	Tidak Tercapai	
		konsumsi energi per kapita (AKE= 2,000 kkal/hr)	1.797	1.966	1.831	1.864	1.898	1.932	1.966	2087	2019	2013,4	1.809	Tidak Tercapai	
		Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr)	53,3	52	53,04	52,78	52,52	52,26	52	59,3	56,8	63,6	50,8	Tercapai	
		Skor PPH konsumsi	82,6	97,1	85,5	88,4	91,3	94,2	97,1	82,3	78,3	82,7	88,7	Tidak Tercapai	
		Prosentase tingkat keamanan pangan		95	75	80	85	90	95	94,62	86,37	87,1	91,53	Tercapai	

Bidang Urusan : Lingkungan Hidup

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Pengembangan kinerja pengelolaan perampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	70,37	75,37	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	72,2	74	74,38	75,85	Tercapai
2	Perbaikan optimalisasi , operasional dan pemeliharaan fungsi TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA(%)	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	Tercapai
3	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R	Reduksi sampah(%)	3,2	4,7	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
		Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	18	14	15	16	17	18	24	25	26	26	Tercapai
		Jumlah bank sampah(lokal)	10	70	15	15	15	15	0	56	72	233	253	Tercapai
4	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Tingkat indeks kualitas air (%)	52	55	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	Tidak Tercapai
		Tingkat indeks udara (%)		80	78	78,5	79	79,5	80	70,56	78,56	85,3	85,86	Tercapai
		Prosentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan /tanah untuk produksi biomassa		100	20	40	60	80	100	0	0	10,58	26,21	Tidak Tercapai
		Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti(%)		100	60	70	80	90	100	100	100	100	100	Tercapai
		Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memnuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	400	1000	120	120	120	120	1.000	150	274	300	200	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
		Prosentase usaha/kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan)	-	100	20	40	60	80	100	0	0	60	80	Tercapai	
5	Perlindungan dan konservasi Sumber daya Alam	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di kota Bogor (kegiatan usaha)	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	185	Tidak Tercapai	
		Prosentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air(%)	0	10	0	0	10	10	10	10	0	0	10	10	Tercapai
		Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	1.306	1.806	100	100	100	100	100	100	175	295	40	120	Tercapai
		Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati	13	48	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Tercapai
		Persentase sekolah yang menjadi keanekaragaman hayati	NA	1,42	0,28	0,57	0,85	1,14	1,42	1,42	0,26	0,57	0,85	1,14	Tercapai
		Persentase kelurahan yang menjadi kelurahan keanekaragaman hayati	NA	36,76	7,35	14,7	22,05	33,33	36,76	36,76	-	-	-	-	-
6	Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	5	Tercapai	
7	Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim	Jumlah inventarisasi GRK (dokumen)		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai	
		Jumlah kampung iklim		5	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		Jumlah biodiesel yang dihasilkan(liter)	152.303	184.303	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kemitraan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	56	100	60	70	80	90	100	100	100	170	180	Tercapai
		Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Tercapai
		Jumlah kampanye lingkungan hidup		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai
9	Peningkatan pengelolaan sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	3,2	4,7	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
		Jumlah kelompok masyarakat (pokmas) pengelola sampah berbasis 3R	23	88	16	16	16	16	1	-	-	-	-	

Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Penataan Administrasi kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki KK	38,03	85,4	41,32	70,05	75,3	80,25	85,4	100	100	100	100	Tercapai
		Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP	69,86	73,1	67,72	70,85	71,25	72,05	73,1	90,58	93	95	99,3	Tercapai
		Prosentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	NA	26,2	23,38	23,38	24,96	25,15	26,2	0	0	20	30	Tercapai
		Prosentase pelayanan E-KTP-el kurang dari 2 jam	NA	90	75	75	80	85	90	20	20	0	0	Tidak Tercapai
		Presentase penduduk yang pindah datang	NA	0,45	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	6,9	0,8	1,3	1,4	Tercapai
		Prosentase penduduk yang pindah keluar	NA	0,45	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	7,7	1,03	1,9	2	Tercapai
		Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan	NA	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,85	Tercapai
		Prosentase penduduk yang ber-akta kelahiran	79,49	88	80,69	82	84	86	88	92,87	93,1	93,84	94,07	Tercapai
		Prosentase penduduk yang ber-akta kematian	56,9	66	58,2	60	62	64	66	2,08	15,75	11,59	21,03	Tidak Tercapai
		prosentase penduduk ber-akta perkawinan	46,89	63,15	62,19	62,71	62,94	63,02	63,15	53	53	54	55	Tidak Tercapai
		Prosentase penduduk ber-akta perceraian	27,85	44,02	48,79	44,16	44,62	44,51	44,02	37	38,5	40,5	42	Tidak Tercapai
		Prosentase bayi lahir pulang bawa akta	NA	95	0	70	80	90	95	0	80	82	91	Tercapai
		Prosentase database kependudukan yang valid dan update	NA	91	65	85	87	89	91	85	90	95	100	Tercapai
		prosentase data dan informasi kependudukan yang di manfaatkan oleh pengguna	NA	64,5	0	58	60	62,5	64,5	60	65	70	75	Tercapai

Bidang Urusan :Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Keluarga Berencana	Tingkat penurunan TFR	2,23	2	2,17	2,1	2,04	2,02	2	1,89	1,89	2,04	2,04	Tercapai
		Kesertaan ber-KB (akseptor)	79.805	124.805	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	37.528	-514	1.591	1.800	Tidak Tercapai
2	Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Kelompok kegiatan (poktan)	5.139	5.205	12	12	12	12	12	-	-	18	24	Tercapai
3	Kesehatan reproduksi remaja	Pusat Informasi dan konseling (PIK) Remaja	24	42	6	6	6	-	-	28	0	7	0	Tercapai

Bidang Urusan : Perhubungan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Peningkatan pelayanan angkutan	Operasional (Jumlah) Koridor BTs Trana Pakuan	3	7	4	5	6	7	7	3	4	5	5	Tidak Tercapai
		Jumlah trayek Feeder	23	30	23	23	23	30	30	23	23	23	22	Tidak Tercapai
		Jumlah Becak laik jalan	1.725	331	1.036	838	680	523	331	857	682	607	566	Tercapai
		Jumlah koridor bus sekolah	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	2	Tercapai
		Angkutan wisata dalam kota (paket)	0	4	0	0	0	2	2	0	0	1	0	Tidak Tercapai
2	Peningkatan Akseibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking	NA	2	NA	NA	NA	2 lokasi		0	0	0	1	Tercapai
		Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan umum	NA	35,15	NA	NA	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		Prosentase ketersediaan prasarana & sarana perhubungan berkondisi baik	70	90	70	75	80	85	90	75	80	85	85	Tercapai
3	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi	jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) terpasang	51	86	8	7	9	7	7	8	7	13	13	Tercapai
		persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	85	90	85	87	88	89	90	97,07	88,66	97,37	87,82	Tercapai
4	peningkatan kompetensi SDM transformasi	persentase kelompok masyarakat/pelaku transportasi yang di bina	50	75	55	60	65	70	75	55	60	65	88,43	Tercapai
5	pengembangan transportasi ramah lingkungan	persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	93,14	99	95,14	96	97	98	99	97,8	96,14	98,02	87,82	Tercapai
		persentase angkutan umum berbahan bakar ramah lingkungan	35	55	35	40	45	50	55	35	40	-	-	Tercapai
6	pembangunan pedestrian dan jalur sepeda	persentase ruas jalan yang menyediakan pedestrian	0,71	3,28	1,35	1,99	2,03	3,28	3,28	-	-	-	-	Tercapai
		persentase jalur sepeda	-	0,7	-	-	0,25	0,5	0,7	-	-	-	-	

Bidang Urusan : Komunikasi dan Informasi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	0	40	9	5	10	36	40	10	5	7	10	Tidak Tercapai
		prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD(%)	1,94	20,39	3,88	12,62	15,53	18,45	20,39	3,88	12,62	15,53	18,45	Tercapai
		prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	50		60	70	80	90	100	90,7	90,9	87,8	90,2	Tercapai
		ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK(orang/PD)	NA	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tercapai
		prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik(persandian)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan : Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	persentase UMKM yang produktif	NA	30	10	15	20	25	30	-	-	-	-	
		jumlah kelompok usaha mendapat bantuan permodalan	75	476	75	78	81	83	87	75	162	81	84	Tercapai
2	Peningkatan kualitas pelembagaan koperasi	jumlah koperasi aktif	301	726	85	85	85	85	85	395	465	498	528	Tercapai
		jumlah lembaga keuangan mikro yang menjadi lembaga mikro berbadan hukum	136	272	27	27	27	27	28	27	58	0	7	Tidak Tercapai
3	pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	jumlah promosi yang dilakukan	25	25	5	5	5	5	5	5	7	7	5	Tercapai
		jumlah kemitraan dan kerja sama UMKM	3	13	5	7	9	11	13	5	7	10	11	Tercapai
4	penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona	0	100	100	100	100	100	100	0	10	10	10	Tidak Tercapai
		penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi)		2	2	1	1	2	0	2	1	1	Tercapai	
		persentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum		100	20	40	60	80	100	0	40	60	80	Tercapai
5	pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	jumlah jenis produk wira usaha baru/UMKM baru yang terserap pasar	19	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	

Bidang Urusan : Penanaman Modal

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	penikatan daya saing penanaman modal	nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	NA		1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	3,1	2,3	2,9	2,1	Tercapai	
		jumlah promosi penanaman modal	4	20	4	4	4	4	4	4	4	6	4	Tercapai	
		tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet	100	100	100	100	100	100	100	-	-	77	63,97	Tidak Tercapai	
		persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%0		98	98	98	98	98	98						
2	peningkatan daya saing penanaman modal	persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	-	100	-	100	100	100	100						
		tingkat tindak lanjut pengaduan msayarakat terhadap pelayanan (%)		98	98	98	98	98	98						
		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		98	80	90	95	98	98						

Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRA	200	300	255	250	275	280	300	265	275	275	358	Tercapai
		jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	30	80	40	50	60	70	80	40	50	60	50	Tidak Tercapai
		jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jumlah pelapor	30	40	32	34	36	38	40	60	34	36	38	Tercapai
		jumlah pemuda kota bogor yang mengetahui cara berwirausaha	0	60	-	-	60	60	60	0	0	100	100	Tercapai
		jumlah organisasi pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	30	60	30	30	20	60	60	68	68	78	36	Tidak Tercapai
		jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	68	100	-	92	92	100	100	0	92	0	100	Tercapai
		jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore komunitas	55	100	80	80	80	100	100	0	80	100	100	Tercapai
2	pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	jumlah pemuda yang memahami tentang undang undang kepemudaan	55	100	80	80	80	100	100	0	0	0	0	Tidak Tercapai
3	pembinaan dan pemaasyarakatkan olahraga	jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikuti sertakan dalam POPWIL	114	127	127	-	127	-	127	0	149	0	140	Tercapai
		jumlah atlet dengan cabang olahraga yang diikuti sertakan dalam POPDA	116	130	-	130	-	130	116	0	204	0	0	Tidak Tercapai
		jumlah atlet dengan cabang olahraga yang		150	150	-	-	-	0	0	-	60	Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		diikutsertakan dalam pekan olahraga pondok pesantren daerah (POSPEDA)												
		jumlah atlet yang diikutsertakan dalam pekan olahraga pondok pesantren daerah tingkat wilayah (POSPEDAWIL)	120	60	0	0	60	0	0					
		jumlah atlet yang diikutsertakan dalam pekan olahraga pondok pesantren daerah tingkat nasional (POSPEDANAS)	0	2	0	25	0	0	2	0	0	0	0	Tercapai
4	peningkatan sarana dan prasarana	jumlah lapangan yang direnovasi	7		300	5	5		5	6	4	4	3	Tercapai
		presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga (%0	7	25	5	5	5	5	5					
		jumlah sarana kreatifitas yang didukung ruang publik	0	3		1	1	1						

Bidang Urusan Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pengelolaan keberagaman budaya	presentae peningkatan jumlah pelaku seni budaya (komuniktas dan sanggar) yang aktif	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Tercapai

Bidang Urusan : Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	Pengembangan pemasaran pariwisata	persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan(%)	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	16%	38%	Tercapai
		prosentase Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	NA	50	10%	10%	10%	10%	10%						

Bidang Urusan Kearsipan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	perbaikan sistem administrasi kearsipan	persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib(%)	NA	NA	20	40	60	80	100	58,62	47,82	12,5	60	Tidak Tercapai
		prosentase arsip yang terkelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah	NA	NA	50	60	70	80	90	53,83	53,83	68,55	75	Tidak Tercapai
		jumlah arsip yang ditertibkan	121	121	241	483	966	1499	1932	590	4428	300	278	Tidak Tercapai
2	penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	prosentase arisp daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%)	NA	NA	10	20	30	40	50	52,67	52,67	52,67	49,07	Tercapai
		jumlah penambahan arsip dinais in aktif	28	28	57	115	330	345	460	404	450	250	241	Tidak Tercapai

Bidang Urusan Perpustakaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	37	37.000	49	61	73,1	85.000	97000	49,04	45,01	74,62	25.421	Tidak Tercapai
		jumlah koleksi dan judul buku	44,32	44.320	47,62	503.290	54.220	57.520	60.820	57650	64120	66900	67990	Tercapai
		peningkatan fungsi perpustakaan	NA	20	20	40	60	80	100	50	60	62,5	80	Tercapai
2	peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	pemenuhan sarana dan prasarana (Sapas) perpustakaan seusai standard	NA	20	20	40	60	80	100	20	40	61,98	70	Tidak Tercapai

Bidang Urusan : Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Peningkatan produksi pertanian,peternakan dan perikanan	prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian,peternakan,dan perikanan pertahun(%)		15	3	3	3	3	3	8,74	4,03	11,01	4,36	Tercapai
		Peningkatan status kelompok tani (kelompok)		50	10	10	10	10	10	22	4	14	15	Tercapai
2	pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian,peternakan dan perikanan	peningkatan jumlah produk olahan yang dibina(produk)	24	89	13	13	13	13	13	9	13	17	13	Tercapai
3	pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis dan penyediaan pangan hewani sesuai dengan kriteria aman,sehat,utuh,dan halal	jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun		10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	Tercapai
		persentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani(%)	50	25	45	40	35	30	25	10,8	15,6	17,5	22,2	Tercapai

Bidang Urusan : Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	perlindungan konsumen dan pengamanan dan perdagangan	persentase jumlah kasus konsumen yang terselesaikan	115	240	15	20	25	30	35	21	41	32	45	Tercapai
		persentase pelaku usaha yang tertib niaga	32	87	11	11	11	11	11	11	NA	NA	11	11
2	peningkatan kualitas pelayanan publik	haki	200	390	50	50	30	30	30	50	50	30	30	Tercapai
		halal	590	1090	100	100	100	100	100	100	100	100	70	Tidak Tercapai
3	peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	22	26	23	24	25	25	25	23	24	25	25	Tercapai
		rata rata persentase kenaikan harga bahan pokok	12	12	12	12	12	13	12	12	12	12	18	Tercapai
4	peningkatan dan perkembangan ekspor	jumlah produk berkualitas ekspor (berkomoditi)	19	29	21	23	25	27	29	21	23	30	30	Tercapai

Bidang Urusan : Perindustrian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	perkembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang produktif	700	1075	775	850	925	1000	1.075	775	850	925	1000	Tercapai
2	peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang menerapkan teknologi	12	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Tercapai

Sekretariat Dewan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	persentase rancangan yang disetujui menjadi perda (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Tercapai

Sekretariat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	penataan perundang-undangan	prosentase penerbitan perda dan perwali	NA	95	80	85	85	90	95	80	85	85	90	Tercapai
		presentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	penegakan hukum dan penerapan HAM	prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan perdata)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	prosentase kecamatan dan kelurahan kinerja baik (%)	90	95	85	87	90	93	95	85	87	90	93	Tercapai
		jumlah kelurahan berpresentasei tingkat kota, provinsi, dan nasional	NA	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah	prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	80	95	75	80	85	90	95	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
5	peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	prosentase hasil rekomendasi hasil rekreda yang ditindak lanjuti	70	100	85	90	90	95	100	85	90	90	95	Tercapai
6	pemningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	indeks evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah	2,8	3,2	2,8	2,9	3	3,1	3,2	2,8	2,9	3	3,1	Tercapai
		ketetapan waktu penyampaian	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
7	pengingkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	perentase tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretarian daerah	100	100	100	100	100	100	100	85	90	95	95	Tercapai
8	kejasama pembangunan	prosentase kerjasama yang diimplementasik sesuai kesepakatan	80	100	83	85	90	95	100	83	85	90	95	Tercapai
9	Kerjasama informasi dengan media masa	prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi/publik (%)	NA	100	80	85	90	95	100	80	85	90	92	Tercapai
10	Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan	rprosentase pemenuhan kebutuhan dasar oprasional PD	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11	pengembangan sistem usaha bagi usaha mikro kecil mengengah	prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang di tindak lanjuti	NA	95	70	80	85	90	95	70	80	85	90	Tercapai
12	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase BUMD yang sehat	NA	50	NA	NA	50	50	50	75	75	75	75	Tercapai
13	perlindungan konsumen dan	kesesuaian antara kondisi riil intalase daerah terhadap	NA	< Proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	proyeksi RKPD	NA	NA	NA	NA	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
	pengamanan perdagangan	pryeksi inflansi tahun ke -n												
		tingkat pemantauan dan pengendalian infasi daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Pemberdayaan lembaga sosial	Opresentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
15	Penguatan akuntabilitas kinerja	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	A	CC	CC	B	BB	A	BB	BB	B	B	Tercapai
		prosentase OPD yang medapat nilai B pada pemilihan AKIP	50	90	70	75	80	85	90	3	5	49	76	Tidak Tercapai
16	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	Prosentase pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada perangkat daerah (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	penataan tata laksana	indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan layanan publik	2,5	3,25	2,65	2,8	2,95	3,1	3,25	2,65	3,2	3,3	3,3	Tercapai
		persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	50	100	60	70	80	90	100	73	95	100	100	Tercapai
18	peningkatan kualitas pelayanan publik	indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan/publik	2,5	3,25	2,65	2,8	2,95	3,1	3,25	2,65	3,2	3,3	3,3	Tercapai
19	penataan dan penguatan organisasi	organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
20	penerapan reformasi birokrasi	indeks RB	NA	BB	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	Tercapai
21	pengendalian pembangunan	konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya	NA	NA	NA	97	85	95	100	NA	96	81	90	Tidak Tercapai
22	pengendalian bangunan	tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	97	>97	>97	>97	>97	>97	>97	100	100	100	100	Tercapai

Bidang Urusan : Pengawasan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	level maturitas penerapan SPIP	1	3	1	1	1	2	3	1	1	1	2	Tercapai	
		peningkatan level kapabilitas APIP	1	3	1	1	2	2	3	1	1	2	2	Tercapai	
		penetapan PD berpredikat WBK	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	0	Tidak Tercapai	
		tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		opini BPK atas LKPD kota bogor	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	Tercapai
		tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan internal (inspektorat kota Bogor)(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2		tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	70,72	74	70,72	71	72	73	74	55,17	81,05	83,64	93,29	Tercapai	
		tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	83,2	89	85	86	87	88	89	95,97	98,64	98,88	100	Tercapai	
		tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	
3	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	40	65	45	50	55	60	65	2,9	5,4	29,7	75	Tercapai	

Bidang Urusan ; Perencanaan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	perencanaan pembangunan daerah	persentase keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD	75	90	80	85	90	95	100	80	85	90	95	Tercapai
		Prosentase keselarasan program pembangunan daerah di RKPD dengan RPJMD	NA	100	82	84	86	88	90	82	84	86	88	Tercapai
		persentase keselarasan kerja SKPD dengan RKPD	75	100	80	85	90	95	100	80	85	90	95	Tercapai
		persentase program dalam renja/renja perubahan yang terakomodir dalam RKA/RKA perubahan	NA	90	82	84	86	88	90	80	80	80	80,5	Tidak Tercapai
		persentase anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS DAN KUPA-PPASP	NA	90	82	84	86	88	90	80	80	80	80,5	Tidak Tercapai
		jumlah pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	NA	15	10	12	13	14	15	-	-	-	4,3	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		presentase program pengembangan daerah yang di danai dari pemerintah pusat atau provinsi	NA	10	3	5	7	10	10	-	-	-	4,3	Tidak Tercapai
		presentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	NA	90	60	65	70	75	80	60	65	70	74,49	Tercapai
		rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	NA	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	01:10,0	0:01	0:01	0:01	Tercapai
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	NA	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	Tercapai
		persentase penarapan E planing, E Budgeting, dan E Monev	NA	80	30	40	70	100	100	30	40	70	100	Tercapai
2	perencanaan pembangunan sosial budaya	persentase keselarasan rencana program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tidak Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	80		80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tercapai
3	perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
		persentase ketersediaan dokumen /perencanaan bangunan prasarana sarana wilayah dan SDA	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tercapai
4	program perencanaan bangunan ekonomi	persentase keselarasan rencana program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	80	97	80	90	93	95	97	80	85	90	90	Tidak Tercapai
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	80	97	80	90	93	95	97	80	85	90	90	Tidak Tercapai
5	program pengendalian pembangunan daerah	persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tercapai
		persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	80	97	80	90	93	95	97	80	90	93	95	Tercapai
6	kerjasama pembangunan	jumlah pendanaan dari CSR/TJSLP	NA	10,5 Milyar	NA	NA	Milyar	Milyar	Milyar		158,882,000	4,227,730,000	2,193,744,450	Tercapai
		prosentase program pembangunan daerah yang didanain dari CSR	NA	10	NA	NA	5	8	10	-	9,02	6,25	18,275	Tercapai
7	Perencanaan tata ruang	Presentase konsistensi antara rencana tata ruang wilayah(RTRW)dengan RPJMD	NA	90	80	85	87	90	90	80	85	87	88	Tidak Tercapai

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
8	Pengendalian pemanfaatan Ruang	persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	NA	90	80	85	87	90	250	80	85	87	90	Tercapai
9	penelitian dan pengembangan	jumlah inovasi masyarakat yang telah di inventarisir	NA	60	-	-	20	40	60	-	-	54	44	Tercapai
		persentase inovasi masyarakat yang di implementasikan untuk menunjang visi misi kota	NA	60	-	-	-	30	30	-	-	-	100	Tercapai
		jumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat	NA	9	-	-	3	3	3	-	-	12	0	Tidak Tercapai
10	Pengembangan Data dan Informasi	prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	NA	97	60	70	80	90	100	80	90	93	95	Tercapai
		Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi Manajemen data	8766	9266	8766	8766	8766	9016	9266	8766	8766	8766	9016	Tercapai
11	Perencanaan Tata ruang	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang			20	40	50	75	100					

Bidang Urusan ; Keuangan
BAPPENDA

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an	Target Pada Akhir Periode Perencana an	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
1	Peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah	Target PAD	315.010.0 39.893	754.739.728 .200	535,373,902 ,900	583,069,233 ,600	635,230,953 ,200	692,280,153 ,600	754,439,728 ,200	627.815.080 .243	728.030.823 .933	917.788.606 .450	887.396.041.6 82	Tercapai	
		Target pendapatan pajak daerah	344.501.0 00.000	550.000.000 .000	388,811,965 ,615	466,700,000 ,000	488,800,000 ,000	541,000,000 ,000	550,000,000 ,000	404.240.922 .337	500.387.947 .492	562.032.285 .582	598.284.841.4 10	Tercapai	
		piutang pajak daerah menurun(%)	0,76	3	3	3	3	3	3	3	2,27	2,26	1,66	1,8	Tercapai
		WP Yang diklarifikasi/di periksa	60 WP	70 WP	60 WP	60 WP	70 WP	70 WP	70 WP	70 WP	43 WP	45 WP	48 WP	129 WP	Tercapai
		Presentase WP yang membayar pajak daerah secara Online(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		WP pajak daerah lainnya bertambah	7,68	10	10	10	10	10	10	10	39	24	11,10	10,54	Tercapai
		presentase WP pajak daerah bertambah(%)	1,52	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1,15	1,72	Tercapai
2	Pembinaan,pe ningkatan kapasitas dan pengembang an aparatur	kompetensi aparatur	-	90	70	75	80	85	90	62,93	78,95	-	-	Tercapai	
			-	60	20	30	40	50	60	62,93	61,40	-	-	Tercapai	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an	Target Pada Akhir Periode Perencana an	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
3	Peningkatan dan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	laporan kinerja dan keuangan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

BPKAD

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen keuangan(APBD dan DPA SKAPD),laporan keuangan,dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Peningkatan pengelolaan aset daerah	persentase laporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		tingkat tertib pengelolaan aset daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	79	79	79	80

Bidang Urusan ; Kepegawaian

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke				Evaluasi di Akhir Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
1	Pembinaan dan pengembangan aparatur	persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian(%)	90	100	95	95	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	50	85	60	65	75	80	85	94,47	95,47	93,59	97,79	Tercapai
2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase proyek perubahan yang di implementasikan oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	NA	30	-	-	20	25	30	-	-	28,05	36,8	Tercapai
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	60	85	65	70	75	80	85	61,21	66,92	84,27	91,84	Tercapai
3	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

BAB V

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah disusun berdasarkan indikator program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dibagi dalam tiga aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I.	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI									
I.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admistrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,26	6,14	6,36	6,73	6,46	6,12	6,56	
2.	Laju Inflasi	4,06	4,05	2,73	4,05	3,6	4,05	4,59	4,04	3,69
3.	PDRB per kapita ADHB	4,4	4,4	4,4	5,5	5,05	4,52	4,52	38,5	38,5
4.	PDRB ADHK	6.063.388,37	6.419.936,37	25.298,60	6.791.108,38	27.002,25	7.176.903,24	28.654,97	7.557.321,36	
5.	Miskin (%)	8,97	8,3	7,6	8,19	7,29	8,08	7,8	7,97	5,93
6.	IPM	76,7	77,77	73,65	78,27	74,5	78,77	75,16	79,27	75,59
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,33	8,44	11,03	7,64	10,01	6,91	6,5	6,26	9,28
8.	Indeks Gini	0,34	0,33	0,47	0,33	0,43	0,32	0,431	0,32	0,41
9.	Indeks Daya Beli (Rp)	67,86	68,89	10.576,37	69,15	10.662	69,41	10.940	69,67	
II.	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
II.1	Pendidikan									
1.	Angka Melek Huruf	99,03	99,09	98,82	99,15	99,33	99,2	99,35	99,26	99,35
II.2	Kesehatan									
1.	Angka Usia Harapan Hidup	69,3	69,41	72,88	69,51	72,95	69,62	73,01	69,73	73,12
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I.	PELAYANAN URUSAN WAJIB									
I.1	Pendidikan									
1.	Angka rata-rata lama sekolah	9,93	9,97	10,2	10,02	10,28	10,06	10,29	10,11	10,29
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	113,33	113,5	110,5	113,7	106,57	113,8	105,55	113,9	112,6
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/Paket B	104,66	104,7	108,56	104,75	105,55	104,8	101,06	104,9	104,1

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.	Angka Partisipasi Kasar SMA/Paket C	129	129,5	115,27	130	116,64	130,5	116,9	131	104,93
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	97,18	98	103,98	98,5	98,3	99	96	99,5	108,05
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B	89,6	90	99,41	90,5	74,3	91	90	91,5	94,14
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Paket C	99,94	99,95	103,99	99,96	78,6	99,97	88	99,98	88
8.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SLTP/MTs/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SLTA/MA/SMK/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Kualifikasi tenaga pendidik yang sekurang-kurangnya S1/DIV (orang)	72,14	72,15	85	72,16	88,5	72,17	85	72,18	87,87
12.	Rasio rombel dengan ruang kelas SD	1 : 1,64	1 : 1,51	1:1,35	1 ; 1,38	1:1,29	1 : 1,26	1:1,35	1 : 1,13	1:1,36
13.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMP	1 : 1,05	1 : 1,04	1:1	1 ; 1,03	1:1	1 : 1,02	1:1	1 : 1,01	1:1
14.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMA	1 : 1,12	1 : 1,10	1:1	1 ; 1,08	1:1	1 : 1,06	1:1	1 : 1,04	1:1
15.	Sekolah kondisi bangunan baik	91,6	91,7		91,8		91,9		92	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16.	Persentase sekolah yang memiliki Lab IPA (SMP, SMA) dengan sarana prasarana yang baik	54,03%	55%	58	56%	61	57%	63	58%	66
17.	APK PAUD usia 4-6 tahun	65,19%	70%	36,68	73%	37,03	77%	38,2	79%	49,04
18.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	22,70%	23%	22,72	24%	41,92	25%	42,3	26%	46,82
I.2	Kesehatan									
1.	Prevalensi HIV/AIDS	< 0,5	< 0,5	0,29	< 0,5	0,36	< 0,5	0,15	< 0,5	0,42
2.	Persentase balita gizi buruk	0,47	0,5	0,35	0,4	0,07	0,3	0,07	0,3	0,07
3.	Jumlah balita gizi buruk	378	350		340		330		320	
4.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	13	12	105	11	110	10	30	10	30
5.	Angka Kematian Bayi (AKB)	62	58	32	55	30	53	37	51	29
6.	Angka kematian balita	62	61,5		61		60,5		60	
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pasien gakin yang terlayani di pelayanan dasar dan rujukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 30.000 penduduk)	0,72	0,72		0,71		0,71		0,7	
10.	Rasio klinik yang memenuhi persyaratan per 25.000 penduduk	3,38	3,44		3,57		3,7		3,82	
11.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,87	0,96		0,96		1,02		1,07	
12.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	7,96	8,52		9,04		9,53		11,23	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13.	Rasio bidan per satuan penduduk	11,15	11,42		11,68		11,82		11,95	
14.	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	0,006	0,005	0,011	0,005	0,011	0,005	0,0209	0,005	0,0322
15.	Rasio perawat per satuan penduduk	10,85	11,71		12,53		13,29		14	
16.	Akreditasi Rumah Sakit	0	1		1		1		1	
17.	Cakupan kunjungan ibu hamil	95,97	96	96,5	96,5	97,6	97	98,5	97,5	96,6
18.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditandatangani	75,61	76	71,1	77	79,2	78	79,1	79	74,1
19.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,99	92	92,8	92,5	93,3	93	94	93,5	96
20	Cakupan pelayanan nifas	95,68	96	93,7	96,5	95,5	97	95,1	97,5	97,6
21.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,5	60	63,8	63	85,3	65	72,9	68	78,1
22.	Cakupan kunjungan bayi	94,96	95,5	94,9	96	97,4	96,5	98	97	97,2
23.	Cakupan peserta KB aktif	60,07	68,16	80,8	75,64	125,19	82,62	110,86	89,11	109,71
24.	Cakupan pelayanan anak balita	86,6	91	87,2	92	86,5	93	93,9	94	90,1
25.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	14	30	100	50	100	70	100	80	100
26.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	96,86	100	97,72	100	96	100	95	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
28.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29.	Persentase penemuan pnemonia balita	78,6	80	100	85	100	90	100	95	100
30.	Persentase penemuan pasien baru TB, BTA (positif)	91,4	81	105	82	103,3	83	103,3	84	115
31.	Persentase penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32.	Persentase penanganan diare	70,4	75	116	80	115	85	96,54	90	109
33.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35.	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	68	68	68	68	68	68	68	68	68
37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	77	3,7	79	3,2	81	3,21	83	3,32
I.3	Pekerjaan Umum									
1.	Jumlah danau/situ dan kolam retensi kondisi baik	5	5	3	6	5	6	6	7	5
2.	Panjang saluran, sungai, dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai dan	174,54	176,54	180,245	178,54	183,965	180,54	189,04	182,54	193,09

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	berkondisi baik (km)									
3.	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)	86	86,5	87,65	87	88,15	87,5	88,32	88	88,58
4.	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM)	840	500	1.840	500	2.679	500	2.746	500	2.746
5.	Cakupan rumah tangga yang dilayani Sanimas (SR)	4.700	6.200	670	7.700	1.850	9.200	2.547	10.700	3.335
6.	Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7.	Jumlah PJU baru	12.000	13.000	18.723	14.000	11.294	14.500	21.149	15.000	58.927
8.	Persentase pemeliharaan PJU	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Penambahan jumlah sambungan IPAL ke rumah penduduk (SR)	381	50	393	70	406	100	422		422
I.4	Perumahan Rakyat									
1.	Jumlah lingkungan pemukiman kumuh	43	3	10	3	3	3	16	3	16
2.	Rumah layak huni	-	272	563	340	208	408	3.240	476	900
I.5	Lingkungan Hidup									
1.	Persentase penanganan sampah (terangkut & 3R)	73,57	74,87		76,17		77,47		78,77	
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	0,001	0,001		0,001		0,001		0,001	
3.	Wilayah layanan persampahan	70,40%	71,40%	72,20%	72,40%	74%	73,40%	74,38%	74,40%	75,65%
4.	Jumlah taman yang tertata	200	12		12		12		12	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dengan baik									
5.	Persentase titik lokasi eks PKL yang difungsikan sebagai RTH	16	1		1		1		1	
6.	Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelola lingkungan	-	20		40		60		80	
7.	Persentase penegakan hukum	-	50		60		70		80	
8.	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan	50	60	60	70	100	80	170	90	180
9.	Jumlah hutan kota yang terbangun (unit)	1	-		1		1		1	
10.	Jumlah mata air yang dilindungi	34	8	7	8	3	8	10	8	
11.	Jumlah bangunan konservasi air tanah (sumur resapan, sumur pantau, sumur imbuhan, sumur bioretensi) (unit)	1.306	100		100		100		100	
12.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah	180	200		200		200		200	
13.	Jumlah perusahaan yang memiliki IPLC	30	5		5		5		5	
I.6	Kependudukan dan Catatan Sipil									
1.	Cakupan penerbitan KK	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Cakupan penerbitan KTP	82	83	90,58	84	93	85	95	86	99,3
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	57	63	92,87	72	93,1	79	93,84	86	94,07
4.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	5	7	84	10	120	12	144	15	160
I.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	67	72		73		73	90,9	74	
2.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	66	68		70		72	67,37	74	
3.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan terselesaikan (%)	110	67	70	69	85	71	75	73	75
4.	Tingkat pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	50	55		60		65		70	
5.	Tingkat pendidikan SMU/MA/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	48	52		56		60		64	
I.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1.	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	68.837	67.837	-	66.837	-	65.837	40.213	64.837	38.349
2.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	111.183	120.183	117.333	129.183	116.819	138.183	118.410	147.183	120.210
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	6.485	6.535	6.297	6.585	6.383	6.635	6.478	6.685	6.308
4.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	223	243	270	263	249	283	281	303	233

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB									
5.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68	68	68
6.	Kasus Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68	68	68
7.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 30% setiap tahun	30%	30%	0	30%	0	30%	56,57%	30%	31,49
1.9	Sosial									
1.	Jumlah lembaga keagamaan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	1.392	1.532		1.685		1.853		2.038	
2.	persentase panti jompo dan anak yang dikelola dengan baik	88	90	74	92	74	94	78	96	78
3.	Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan	50	180	75	180	42	180	150	180	100
4.	Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan	110	100	63	100	63	100	33	100	212
5.	Persentase korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	yang ditangani									
6.	Jumlah Anjal Gepeng, PSK yang ditangani:									
i.	Anjal	123	125	50	129	619	132	140	135	14
ii.	Gepeng	186	190	0	195	151	200	257	205	42
iii.	PSK	98	100	46	104	110	107	70	110	19
7.	Jumlah WKSBM di Kota Bogor yang terbentuk	16	10		10		10		10	
8.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18.690	19.064	15.963	19.445	15.831	19.834	21.763	20.231	55.734
9.	PMKS yang ditangani	18.943	19.322	15.963	19.708	15.831	20.102	21.763	20.505	55.734
10.	PSM yang aktif	100	125		150		175		200	
11.	Karang Taruna yang aktif	20	10		10		10		10	
12.	Persentase makan pahlawan yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I.10.	Ketenagakerjaan									
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.347	2.033	1.387	955	1.428	2.781	1.470	3.873
2.	Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)	2.002.000	2.493.941	3.022.765	2.634.632	3.272.143	2.775.773	3.557.146	2.916.914	3.557.146
I.11.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah									
1.	Jumlah UMKM yang produktif	11.297	12.427	25	13.669	25	15.036	35	16.540	40
2.	Jumlah koperasi aktif	301	85	395	85	472	85	501	85	528
3.	Jumlah produk yang tersertifikasi yang dihasilkan UMKM:									
	a. Halal	590	100		100		100		100	
	b. Haki	200	50		50		50		50	
I.12.	Penanaman Modal									
1.	Nilai realisasi PMA dan PMDN (dalam Miliar Rupiah)	3.583	3.941	3.104	4.335	2.315	4.769	2.947	5.246	
I.13.	Kebudayaan									
1.	Jumlah grup seni budaya yang aktif	40	42	50	45	50	48	50	50	50
2.	Jumlah cagar	0	0	485	0	485	0	485	0	485

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	budaya yang ditetapkan perda									
3.	Jumlah gelar budaya	30	32		33		33		34	
I.14.	Kepemudaan dan Olahraga									
1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2.	Jumlah Atlet yang berprestasi:									
	a. POPDA	52	0	0	55	234	0	0	60	180
	b. POPWIL	17	20	116	0	0	22	122	0	0
3.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	379	381	455	383	477	385	481	387	481
4.	Persentase keikutsertaan pada cabang olahraga									
	a. POPDA	60	0	0	85	71	0	0	90	76
	b. POPWIL	100	100	100	0	0	100	100	0	0
I.15	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1.	Jumlah LSM, ORMAS, dan OKP yang dibina (kegiatan)	1	1	25	1	20	1	23	1	20
I.16.	Kemasyarakatan									
1.	Jumlah qori/qoriah	30	45	45	60	85	75	131	90	177
2.	Jumlah tempat ibadah yang mendapatkan bantuan	154	167	172	180	240	193	311	206	393
3.	Jumlah zakat terkumpul di BAZ (Rp Milyar)	3.515.154.578	4.015.154.578	3.135.168.762	4.515.154.578	4.721.043.029	5.015.154.578	5.667.229.820	5.515.154.578	4.633.235.809
4.	Jumlah TQP dan MDA	39	39	456	39	497	45	391	45	418
I.17.	Statistik									
1.	Databse yang valid, mudah diakses, dan termutakhirkan secara rutin (OPD)	12	18	44	26	44	32	44	38	44
I.18.	Perpustakaan									
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	37.000	49.000	49.039	61.000	45.011	73.000	74.623	85.000	25.421
I.19.	Komunikasi dan Informasi									
1.	Jumlah Pengembangan Infrastruktur Jaringan telekomunikasi (titik)	10	20	60	45	71	45	77	46	83

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Jumlah pembangunan dan pengembangan Control Room (paket)	1	-	1	1	1	-	1	-	1
3.	Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	23	5	54	5	40	5	9	5	25
II.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN									
II.1.	Pertanian									
1.	Produksi Tanaman Hias (Tangkai/Pot)	556.000	564.000	840.257	573.000	520.310	581.000	581.483	589.000	615.953
2.	Produksi ikan hias (ekor)	14.768.300	16.000.000	15.252.000	17.000.000	18.856.000	18.000.000	17.552.000	19.000.000	18.578.560
3.	Jumlah hewan yang dipotong di RPH (ekor)	174.526	460.080	385.450	550.800	447.749	623.520	632.664	732.240	867.465
4.	Jumlah produk olahan pertanian binaan	24	32	32	45	45	58	62	71	81
5.	Produk hasil pertanian binaan yang dipasarkan	34	63	43	77	59	91	81	105	62
II.2.	Pariwisata									
1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.769.787	4.146.766	2.159.930	4.561.442	5.486.924	5.017.586	5.486.924	5.519.345	7.573.402
2.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	183.807	202.188	19.531	222.406	388.709	244.647	388.709	269.112	392.585
3.	Jumlah kompepar	1	1	1	1	6	1	1	1	6
II.3.	Industri									
1.	Jumlah sentra IKM	0	1		1		1		1	
2.	Jumlah Industri Kreatif	172	192		217		252		292	
3.	Jumlah IKM yang produktif	700	775	775	850	880	925	925	1.000	1.000
II.4.	Perdagangan									
1.	Peningkatan nilai ekspor	19	21	21	23	23	25	26	27	30
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
I.	KEMAMPUAN EKONOMI									
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	658,45	660,95	499.115	663,45		665,96		668,96	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutCome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	395.070	396.570	1.324.986	398.070		399.576		401.076	
II.	FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR									
II.1.	Perhubungan									
1.	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan	4	12	9	14	7	17	15	14	14
2.	Persentase Lulus Uji kendaraan bermotor wajib uji	97,5	97,8	97,07	98,1	88,66	98,4	97,37	98,7	87,82
3.	Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (menit/km)	2,99	2,91	2,43	2,83	2,3	2,75	1,72	2,68	1,7
4.	Operasional koridor angkutan massal (koridor transpakuan)	3	4	3	5	4	6	5	7	5
II.2.	Penataan Ruang									
1.	Kesesuaian IMB dengan bangunan di lapangan (%)	90	90		92		94		96	
2.	Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang	100	100		100		100		100	
3.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (%)	0	90	90	90	99,77	90	98,9	90	99,74
II.3.	Sumberdaya Manusia									
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,13	0,15	0,042	0,17	0,042	0,19	0,066	0,21	0,066

BAB VI

CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

6.1. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016

6.1.1. LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi pencapaian SPM yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

6.1.1.1. *Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air*

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Target dan Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	40	60	100	100	100	100	73,3	78,05	100	100	67,5	61,25

Berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%),

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator **tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair** terealisasi 153,1% atau **kategori tercapai**. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu

sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

6.1.1.2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak;

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan udara dari sumber tak bergerak. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 6.2

Target dan Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	60	80	100	100	100	100	64	94	100	100	100	100

Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel 2.120.

Tabel 6.3

Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
3.	PT. Unitex	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 (Satu)	1 (Satu) Kali

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH₃, Cl₂,

HCl, HF, NO₂, Opasitas, Partikel, SO₂, H₂S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam **kategori baik**.

6.1.1.3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Target dan Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;	60	80	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100

Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter-parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

6.1.1.4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 6.5
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
Dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

6.2. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017

6.2.1. PENDIDIKAN

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.6
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pelayanan Dasar	2017
1. Pendidikan Dasar	109,01%
2. Pendidikan Anak Usia Dini	

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pernyataan standar pelayanan minimal untuk pendidikan dasar adalah setiap warga negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan

standar nasional pendidikan. Sampai dengan semester 1 tahun 2017, capaian pelayanan ini sebesar 109,01%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 168.463 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 183.648 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

6.2.2. KESEHATAN

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil	50,76%
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin	49,98%
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	55,85%
4) Pelayanan kesehatan balita	59,72%
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	75,65%
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	11,01%
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72,45%
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	19,81%
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	26,08%
10) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	63,96%
11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	89%

6.2.3. PEKERJAAN UMUM

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.8**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum**

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,58%
- Non Perpipaan	143,30%
- Perpipaan (PDAM)	99,97%
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	107,61%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 90,55% dari target sebesar 90,03%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 1,82% dan perpipaan sebesar 88,73%. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 19.332 SR, dimana 67 SR merupakan hasil pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kencana.

Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh PDAM. Sampai dengan tahun 2017 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 900.862 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 974.603 jiwa atau sebesar 88,73% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2017 sebanyak 1.098.397 jiwa.

Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi. Penanganan produksi dilakukan diantaranya melalui penambahan kapasitas produksi di instalasi pengolahan air Dekeng 1 dan 2; pengadaan

dan pemasangan meter induk produksi; penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan screen sampah; serta pengadaan IPA Portable di Kota Batu dengan kapasitas 30 liter/detik. Sedangkan penanganan distribusi dilakukan diantaranya melalui penggantian meter induk distribusi; pemasangan alat level control di Reservoir; pengadaan Air Valve dan Reservoir Portable; pembentukan Distric Metering Area (DMA); serta pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU). Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dapat terealisasi sebesar 72,1% dari target sebesar 67%. Data tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban (septic tank) sampai dengan tahun 2017 mencapai 185.214 SR, dan 133.534 diantaranya telah terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

Sistem jaringan dan pengolahan air limbah diselenggarakan melalui 3 sistem yakni sistem onsite individual, sistem komunal, serta sistem intermediate. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem onsite (setempat) yaitu pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan sistem pelayanan on call (berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat), dimana pada tahun 2017 telah terlayani sebanyak 130.565 SR. Sarana penyedotan lumpur tinja yang dioperasikan adalah 4 unit vacum truk tinja dengan kapasitas 2-3 m³, 2 unit motor tanki dengan kapasitas 0,4 m³, serta 1 unit bus toilet. Lumpur tinja hasil penyedotan dari septic tank diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil, untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas effluent air limbah sebagai audit internal di laboratorium UPTD Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi ketentuan baku mutu air limbah domestic.

Pengolahan air limbah domestik melalui sistem komunal merupakan sistem pengolahan berbasis masyarakat dimana pelaksanaannya yang dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal sebanyak 855 SR di 14 lokasi, dimana pembiayaannya bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 telah terbangun infrastuktur pengolahan air limbah berbasis komunal sebanyak 2.547 SR.

Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik intermediate (terpusat) yaitu pelayanan perpipaan air limbah untuk sambungan rumah yang dikumpulkan dan dialirkan dengan sistem pemompaan dan gravitasi untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) Tegal Gundil. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penambahan cakupan wilayah pelayanan berupa penyediaan jaringan perpipaan air limbah, sambungan rumah, dan bangunan pelengkap pada sistem intermediate sebanyak 16 SR. Sehingga apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 pelayanan air limbah domestik melalui sistem intermediate telah mencapai 422 SR.

6.2.4. PERUMAHAN RAKYAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.9

Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%
2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	0,68%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

Tahun 2017 terdapat 2 KK yang menjadi korban bencana dengan 11 anggota keluarga. Pada tanggal 13 November 2017 korban bencana tersebut telah difasilitasi untuk menempati rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%.

B. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota

Tahun 2017 terdapat 1 KK yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota dan telah difasilitasi untuk menempati 2 unit hunian di rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor.

6.2.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2)

pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.10
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	
a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	78,95%
b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%
c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	100%
2. Penanggulangan bencana kebakaran	
a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	125%
b. Tingkat waktu tanggap	95%
c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	54%
d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	167%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- A. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 152 kasus. Dari total kasus tersebut, 78,95% atau 120 kasus dapat diselesaikan.
 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Pada tahun 2017 terdapat masing-masing 1 kelompok di 6 kecamatan. Seluruh kelompok tersebut melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 3 kali/hari, sesuai dengan target SPM yang ditetapkan.
 3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat

Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan 3563 RT di wilayah Kota Bogor. Sehingga setiap RT memiliki minimal 1 orang petugas Linmas. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target SPM.

B. Penanggulangan bencana kebakaran

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian tersebut telah melebihi target SPM yang hanya sebesar 80%.

2. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 28 kejadian, dan 20 kejadian diantaranya (71,43%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 95% dari target SPM sebesar 75%.

3. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 orang aparaturnya pemadam kebakaran, namun baru 33 orang (45,83%) diantaranya yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi. Capaian tersebut baru sebesar 54% dari target SPM dimana minimal 85% aparaturnya pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi.

4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

6.2.6. SOSIAL

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.11

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	87,56%
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	96,10%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 193 orang, dan 169 orang (87,56%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah anak terlantar sebanyak 131 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pada tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

6.3. PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL (SPM) TAHUN 2018

6.3.1. PENDIDIKAN

Pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.12

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
1. Pendidikan Dasar	103,38%
2. Pendidikan Kesetaraan	27,93%
3. Pendidikan Anak Usia Dini	47,90%

Adapun penjelasan capaian jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan ini sebesar 103,38%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 172.817 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 178.654 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

B. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 27,93% dari target pada SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal, diprediksi melanjutkan ke pendidikan formal.

C. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 47,90% dari target SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, dikarenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.

6.3.2. KESEHATAN

Terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.13
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2018
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,60%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	96,05%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,70%
4	Pelayanan kesehatan balita	90,10%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00%
10	Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	96,00%

Adapun penjelasan ketidak tercapaian SPM tersebut di atas adalah :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 tercapai sebesar 99,60%, hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program KB pada wanita usia subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya (Spesialis Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyerta nya.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU).
- c. Pelayanan kesehatan balita tercapai 90,10%, upaya yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi,

juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan di puskesmas, posyandu maupun PAUD/ TK se Kota Bogor dengan melibatkan lintas sektor yaitu PKK, kader posyandu, kecamatan dan kelurahan serta guru PAUD/TK yang sudah dilatih Simulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga seluruh balita dapat terpantau tumbuh kembangnya melalui kegiatan SDIDTK.

- d. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai sebesar 96,00%, hal ini disebabkan karena :
 1. Penemuan kasus masih sulit terutama untuk komunitas dan kalangan ekonomi menengah ke atas, dikarenakan faktor sosial budaya, stigma dari masyarakat dan akses layanan untuk kalangan ekonomi menengah atas masih bervariasi dan tertutup.
 2. Masih banyak Rumah Sakit di Kota Bogor yang belum membuka layanan HIV. Dari 20 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor, 6 Rumah Sakit sudah memberikan layanan HIV, 8 Rumah Sakit memberikan layanan PDP.
 3. Masih banyak Ibu hamil ODHA yang menyembunyikan statusnya karena sulit untuk mendapatkan perawatan persalinan di layanan kesehatan, jika mereka membuka statusnya.
 4. Masih banyak ODHA yang tidak memeriksakan rutin kondisi CD 4 nya.
 5. Masih ada sekolah, universitas, instansi pemerintah dan swasta yang menolak untuk diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS.
 6. Kemauan kelompok resiko untuk memeriksakan HIV ke sarana kesehatan masih kurang.
 7. Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci.
 8. Kemauan wanita penaja seks (WPS) untuk menggunakan kondom kurang karena kondom tidak nyaman, kualitas kondom tidak baik.
 9. Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena pengetahuan klien terhadap ARV belum optimal.
 10. Pasien menghilang setelah diketahui positif HIV, dikarenakan masih banyak pasien yang belum menerima terhadap kondisi yang dihadapinya.

6.3.3. PEKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.14

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,65%
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	67,36%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 94,65% dari target sebesar 91,6%. Sampai dengan tahun 2018 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 1.064.362 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.064.362 jiwa atau sebesar 94,65% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2018 sebanyak 1.124.539 jiwa.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Pada tahun 2018 jumlah warga negara yang memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar sebanyak 728.215 jiwa.

6.3.4. PERUMAHAN RAKYAT

SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.15

Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Tahun
	2018
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota, dilakukan dengan penyediaan Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Bogor, namun untuk Tahun 2018 tidak dilakukan relokasi, hanya dilakukan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

6.3.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (2) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.16
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum d. Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	85%
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%
3. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	100%
	100%
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kenakaran e. Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	80%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

4. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kasus. Dari total kasus tersebut, 90% atau 66 (enam puluh enam) kasus dapat diselesaikan.
5. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 Pada tahun 2018 dilakukan patroli dengan anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di 6 kecamatan, dengan frekuensi patroli sebanyak 3 (tiga) kali/hari untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat
 Terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang tersebar di 68 Kelurahan se-Kota Bogor.

C. Penanggulangan bencana kebakaran

5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian yang belum memenuhi target SPM dikarenakan beberapa faktor kondisi di lapangan antara lain :

- a. Kendala dengan kemacetan jalan raya,
- b. Kurangnya Pos Sektor Damkar,
- c. Kurangnya Kendaraan Pemadam kebakaran.

6. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2018 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 62 kejadian, dan 54 kejadian diantaranya (95%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 80% dari target SPM sebesar 100%.

7. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 (tujuh Puluh dua) orang aparaturnya pemadam kebakaran, diantaranya sebanyak 30 (tiga puluh) personil sudah tersertifikasi dan terlatih. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK sebanyak 9 (sembilan) unit.

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 6.17

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pelayanan Dasar	Tahun
	2018
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	92,17%
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	104%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	66%
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	18,02%
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 230 orang dan sebanyak 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 230 orang, dan 212 orang (92,17%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 50 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 (lima) anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan) .

C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang.

D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 42 orang, dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pada tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, dan 7.029 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB VII

CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bogor dengan total sebesar 199 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator ada data tetapi belum ada dalam target (TT) serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap pilar yaitu sebagai berikut.

7.1. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1

Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Sosial						
No	Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
1	Dinas Sosial	3	0	0	6	9
2	Dinas Kesehatan	8	3	1	16	28
3	Dinas PPKB	2	3	0	6	11
4	Dinas Pendidikan	4	6	0	7	17
5	Disdukcapil	0	0	0	1	1
6	BPBD	1	1	0	7	9
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	1
8	PLN	0	0	0	1	1
9	Dinas Ketahanan Pangan	1	0	2	2	5
10	BPJS	0	1	0	0	1
11	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	3	0	0	3	6
12	PUPR	0	2	0	0	2
	Jumlah	23	16	3	49	91

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar sosial, terdapat 23 indikator atau 25,27 % yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bogor. Sebanyak 16 indikator atau 17,58 % belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 3 indikator atau 3,30 % indikator yang tidak memiliki data dan 49 indikator ada data tetapi tidak ada dalam target.

Dari 12 OPD tersebut, Dinas kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 28 indikator.

7.2. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 44 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2

Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Ekonomi

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
dispenda	0	2	0	1	3
Disnaker	1	2	0	1	4
UMKM	0	0	2	0	2
Disparbud	0	1	2	2	5
Indag	2	1	0	2	5
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	2	2
Dinas Sosial	1	1	0	1	3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	3	3
BPJS	1	0	0	0	1
Diskominfo	1			3	4
disdukcapil	0	0	0	1	1
BPS	1	0	1	4	6
Pemerintah Daerah	0	0	0	2	2
Jumlah	7	7	5	22	41

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. Dari total 41 indikator di pilar ekonomi, terdapat 7 indikator atau 17,07 % yang mencapai target nasional. Sebanyak 7 indikator atau 17,07% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 22 indikator atau 53,66% indikator belum memiliki data.

7.3. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 41 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan capaian per OPD pilar lingkungan, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan.

Dari total 44 indikator di pilar lingkungan, terdapat 3 indikator yang mencapai target, 9 indikator **dilaksanakan belum mencapai target (SB)**, 2 indikator **ada data tidak ada target (TT)** dan 27 indikator **tidak ada data (NA)**. Persentase capaian indikator dalam pilar lingkungan disajikan pada diagram berikut ini.

Tabel 7.3

Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Lingkungan

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
PDAM	1	1	0	0	2
Dinas Perumahan dan Permukiman	0	4	0	4	8
PUPR	0	2	0	1	3
Dinas Perhubungan	0	0	1	2	3
Dinas Lingkungan Hidup	0	2	1	4	7
Indag	0	0	0	1	1
Disnaker	0	0	0	1	1
Bappeda	0	0	0	6	6
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	1	1
BPBD	2	0	0	5	7
Kepolisian	0	0	0	2	2
Jumlah	3	9	2	27	41

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

7.4. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 22 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.4

Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
Kepolisian	0	0	1	2	3
dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	1	0	2	2	5
dispenda	1	0	0	1	2
LPSE	0	0	0	2	2
BPS	2	0	0	4	6
Disdukcapil	1	1	0	2	4
Jumlah	5	1	3	13	22

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kota telah dilaksanakan oleh Kota Bogor sebanyak 199 indikator, dimana 40 indikator telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 34 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 13 indikator yang belum dilaksanakan, dan 112 indikator belum ada datanya.

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebanyak 40 indikator atau 20% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan satu yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Berikut tabel indikator masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Tabel 7.5
Matriks Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs Kota Bogor

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
	TUJUAN						2013	2014	2015	2016	2017			
	TUJUAN	1												
	TARGET	1.2												
1	INDIKATOR	1.2 .1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	tahun 2017 (7,11)	Tahun 2018 (7,05)	7-8% (2019)	8,19	7,74	7,60	7,29	7,11	sudah mencapai target (SS)	BPS, DINAS SOSIAL
	TARGET	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
2	INDIKATOR	1.3 .1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	tahun 2017 (88,8)	100	95% (2019)				Persentase masyarakat miskin terlayani di sarana kesehatan dasar dan rujukan 100%		sudah mencapai target (SS)	BPS, DINAS SOSIAL
3	INDIKATOR	1.3 .1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen			62,4 juta pekerja formal & 3,5 juta pekerja informal (2019)							DINAS SOSIAL, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	INDIKATOR	1.3 .1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen			17,12% (2019)							DINAS SOSIAL, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	INDIKATOR	1.3 .1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	orang	tahun 2017 (37940)		2,8 juta (2019)				Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)	37940	sudah mencapai target (SS)	DINAS SOSIAL, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
											/KSM Eks Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) :9.823)			
	TARGET	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
6	INDIKATOR	1.4 .1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen			70% (2019)						Dinas Kesehatan	
7	INDIKATOR	1.4 .1. (b)	Persentase umur anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen			63% (2019)				Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi :87%	sudah mencapai target (SS)	Dinas Kesehatan	
8	INDIKATOR	1.4 .1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen			65% (2019)				Kesertaan ber-KB tahun 2016: 116.819 atau 76.12% dari jumlah PUS)	sudah mencapai target (SS)	Dinas PPKB	
9	INDIKATOR	1.4 .1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	tahun 2017 (90,55)	tahun 2018 (94,62)	100% (2019)			63,4	64,2	90,55	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	PUPR
10	INDIKATOR	1.4 .1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	tahun 2017 (72,1)	tahun 2018 (67,26)	100% (2019)			66,6	66,8	72,1	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	PUPR
11	INDIKATOR	1.4 .1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persen	tahun 2017 (72,2)	tahun 2018 (40)	mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan atau terbawah.			87,34	84,36	72,2	sudah mencapai target (SS)	DISBANGKIM

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
12	INDIKATOR	1.4 .1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Persen	tahun 2017 (95,94)		94,78% (2019)				100,11	95,94	Sudah mencapai target (SS)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD
13	INDIKATOR	1.4 .1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	tahun 2017 (90,10)		82,2% (2019)				95,52	90,1	Sudah mencapai target (SS)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD
14	INDIKATOR	1.4 .1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	Persen	tahun 2017 (61,21)		91,63% (2019)				Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Sederajat : 102,95%	61,21	Sudah mencapai target (SS)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD
15	INDIKATOR	1.4 .1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Persen			77,4% (2019)							DISDUKCAPIL
16	INDIKATOR	1.4 .1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.	Persen			100% (2019)							PLN dan BPS
	TARGET	1.5 .1. (l)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana											
17	INDIKATOR	1.5 .1* (m)	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang										BPBD
18	INDIKATOR	1.5 .1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	daerah			39 daerah (2019)				Prosentase tanggap penanganan bencana :87%		dilaksanakan belum mencapai target (SB)	BPBD
19	INDIKATOR	1.5 .1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	orang			150 ribu (2019)							BPBD
20	INDIKATOR	1.5 .1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	orang			81 ribu (2019)							BPBD
21	INDIKATOR	1.5 .1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	daerah			450 (2019)							BPBD
22	INDIKATOR	1.5 .1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	indeks risiko			118,6 (2019)							BPBD
23	INDIKATOR	1.5 .2 (f)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.											BPBD

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
24	INDIKATOR	1.5 .2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										BPBD
25	INDIKATOR	1.5 .3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	persen	Tahun 2017 (100%)	100			100	100	100	Sudah Sesuai target (SS)	RPJMD Tekonokratik
	TUJUAN	2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKENJUTAN										
	TARGET	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
1	INDIKATOR	2.1 .1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Persen	Tahun 2016 (8%)	penguatan pangan 16%				8		ada data tidak ada target (TT)	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	INDIKATOR	2.1 .1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	tahun 2015 (0,35%)		0% (2019)	0,35		Persentase balita gizi buruk 0,6%)		dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DINAS KESEHATAN
3	INDIKATOR	2.1 .2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	Tahun 2017 (24,79%)		Tahun 2019 (22,29)				24,79	ada data tidak ada target (TT)	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	INDIKATOR	2.1 .2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.	Persen				8,5% (2019)					DINAS KETAHANAN PANGAN
	TARGET	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
5	INDIKATOR	2.2 .1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (presentase Balita Pendek)	Persen	Tahun 2015 (9,3%)				9,3			ada data tidak ada target (TT)	DIINKES
6	INDIKATOR	2.2 .1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen			28% (2019)						DIINKES
7	INDIKATOR	2.2 .2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Persen									DINKES
8	INDIKATOR	2.2 .2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	Tahun 2015 (19%)		28% (2019)		19			dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DINKES
9	INDIKATOR	2.2 .2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. (presentasi cakupan ASI eksklusif)	Persen	Tahun 2017 (70,1%)		50% (2019)		77	70	70,1	sudah mencapai target (SS)	DINKES
10	INDIKATOR	2.2 .2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan				Skor PHH 92,5 dan tingkat			Skor Pola Pangan Harapan		sudah mencapai target (SS)	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
						konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun (2019)					(PPH) :95,2% dan prosentase penduduk rawan pangan mencapai 26,29%			
	TARGET	2.3 .	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.											
11	INDIKATOR	2.3 .1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Persen									DINAS KETAHANAN PANGAN	
	TUJUAN	3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA											
	TARGET	3.1 .	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
1	INDIKATOR	3.1 .1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	kelahiran hidup	Tahun 2017 (30/100000)	tahun 2018 (100/100000)	306 (2019)			106/100000	110/100000	30/100000	sudah mencapai target (SS)	BPS
2	INDIKATOR	3.1 .2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	Tahun 2017 (88,9%)		95% (2019)			92	90,7	88,9	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DINKES
3	INDIKATOR	3.1 .2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen			85% (2019)							DINKES
	TARGET	3.2 .	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.											
4	INDIKATOR	3.2 .1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Orang			24 (2019)							DINKES
5	INDIKATOR	3.2 .2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	orang			0							DINKES
6	INDIKATOR	3.2 .2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak. (angka kematian Bayi/AKB Kota Bogor	kasus/kelahiran hidup	Tahun 2017 (3,7/1000) kelahiran hidup	Tahun 2018 (3/1000 kelahiran hidup)	40			3,2/1000	3/1000	3,7/1000	Sudah Mencapai Target (SS)	DINKES
	TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
7	INDIKATOR	3.3 .1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	Tahun 2017 (0,15)		<0,5% (2019)					0,15	sudah mencapai target (SS)	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
8	INDIKATOR	3.3 .2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	kasus/orang	tahun 2017 sebanyak 219 kasus (85,6%)	Tahun 2017 sebanyak 180 (86%)	245 kasus (2019)					219 kasus (85,6%)	Sudah Mencapai Target (SS)	DINKES
9	INDIKATOR	3.3 .3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	orang			0							DINKES
	TARGET	3.4 .	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
10	INDIKATOR	3.4 .1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen			5,4% (2019)							RSUD
11	INDIKATOR	3.4 .1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen			24,3% (2019)							RSUD
12	INDIKATOR	3.4 .1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen			15,4% (2019)							RSUD
13	INDIKATOR	3.4 .2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Orang			0							kepolisian
	TARGET	3.5 .	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.											
14	INDIKATOR	3.5 .1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Orang			0							DINSOS
15	INDIKATOR	3.5 .1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Orang			0							DINSOS
16	INDIKATOR	3.5 .1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Orang			210 (2019)							DINSOS
17	INDIKATOR	3.5 .1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	tempat			85 (2019)							DINKES/DINSOS
18	INDIKATOR	3.5 .1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Persen			0,02% (2019)							DINKES
19	INDIKATOR	3.5 .2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Persen			0							DINKES
	TARGET	3.7 .	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.											
20	INDIKATOR	3.7 .1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	Persen			66% (2019)							Dinas PPKB

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data		
							2013	2014	2015	2016	2017				
			menggunakan alat kontrasepsi metode modern.												
21	INDIKATOR	3.7 .1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen		65% (2019)				Kesertaan ber-KB tahun 2016: 116.819 atau 76.12% dari jumlah PUS)		sudah mencapai target (SS)	Dinas PPKB		
22	INDIKATOR	3.7 .1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen		23,5% (2019)							Dinas PPKB		
23	INDIKATOR	3.7 .2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) (tingkat penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun/ASFR 15-19 tahun)	Persen	Tahun 2017 (27,92/1000)	Tahun 2018 (11,62/1000 remaja)					27,92/1000	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	paparan teknokrat		
24	INDIKATOR	3.7 .2 (a)	<i>Total Fertility Rate(TFR)</i>	Persen	tahun 2017 (2)	Tahun 2018 (2,0)	2,28 (2019)				2	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Dinas PPKB		
	TARGET	3.8 .													
25	INDIKATOR	3.8 .1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Persen			9,91% (2019)						Dinas PPKB		
26	INDIKATOR	3.8 .2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Orang			Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%)				62	76,6	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	BPJS	
27	INDIKATOR	3.8 .2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	Tahun 2016 (66 %)	80,00%	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada				30	62	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 100%	sudah mencapai target (SS)	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						tahun 2019 minimal 95% (2015:60%)							
	TARGET	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.										
28	INDIKATOR	3.9 .3 (a)	Persen			0							DINKES
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
29	INDIKATOR	3.a .1*	Persen			0							DINKES
	TARGET	3. b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.										
30	INDIKATOR	3. b. 1 (a)	Persen			0							DINKES
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
31	INDIKATOR	3.c .1*				0							DINKES
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.													
	TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
1	INDIKATOR	4.1 .1*	Persen										DISDIK
2	INDIKATOR	4.1 .1 (a)	Persen			-							DISDIK
3	INDIKATOR	4.1 .1 (b)	Persen			-							DISDIK
4	INDIKATOR	4.1 .1 (c)	Persen			-							DISDIK /LPPD Tahun 2017
5	INDIKATOR	4.1 .1 (d)		tahun 2017 (105,55)	tahun 2018 (113,9)	Meningkat nya Angka Partisipasi			110,5	106,57	100,55	dilaksanakan belum	DISDIK

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
						Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).						mencapai target (SB)		
6	INDIKATOR	4.1 .1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Persen	tahun 2017 (101,06)	tahun 2018 (104,9)	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).			108,56	105,55	101,06	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DISDIK
7	INDIKATOR	4.1 .1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	Tahun 2017 (87,79)		Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).				113,19	87,79	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DISDIK /LPPD Tahun 2017
	TARGET	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
8	INDIKATOR	4.2 .2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	Tahun 2017 (51,28)	Tahun 2018 (58)	APK PAUD 80% pada 2019 (2015:70%)					51,28	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DISDIK /LPPD Tahun 2017
	TARGET	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
9	INDIKATOR	4.3 .1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	Tahun 2017 (87,79)		Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 %				113,19	87,79	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	DISDIK

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						(2015: 76,4 %)							
10	INDIKATOR	4.3 .1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen		36,73% (2019)							DISDIK
	TARGET	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
11	INDIKATOR	4.4 .1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen									DISDIK
	TARGET	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
12	INDIKATOR	4.5 .1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan /laki-laki di SD/MI/SMP /SMA yang setara gender pada tahun 2019.							DISDIK
	TARGET	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
13	INDIKATOR	4.6 .1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	-	Meningkat nya rata- rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).			99,09%).			sudah mencapai target (SS)	DISDIK
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN													
	TARGET	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
1	INDIKATOR	5.1 .1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.			16 (2019)							dinas pemberdayaan

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
	TARGET	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											masyarakat dan perlindungan anak
2	INDIKATOR	5.2 .1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen		≤20,48% (2019)								
3	INDIKATOR	5.2 .2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	Tahun 2017 (75)	tahun 2017 (71)	70% (2019)				67	75	sudah tercapai (SS)	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak
	TARGET	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
4	INDIKATOR	5.3 .1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun			21 tahun (2019)							dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak
5	INDIKATOR	5.3 .1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	Tahun	Tahun 2017 (27,92/1000)	Tahun 2018 (11,62/1000 remaja)	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun					27,92/1000	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Paparan Rancangan Teknokrat
6	INDIKATOR	5.3 .1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Persen	Tahun 2017 (87,79)		91,63% (2019)				113,19	87,79	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	disdik
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
7	INDIKATOR	5.5 .1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	Tahun 2017 (48,9)		≥ 16,6% (2019)					48,9	sudah tercapai (SS)	BPS Kota Bogor 2018
8	INDIKATOR	5.5 .2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	Tahun 2017 (6 /15 (35,71%))		Eselon I ≥ 20, 66% dan Eselon II ≥ 16,39% (2019)					6 /15 (35,71%)	Sudah Sesuai target (SS)	BPS Kota Bogor 2018
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.											

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
	2013	2014	2015					2016	2017					
9	INDIKATOR	5.6 .1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen			9,9% (2019)							Dinas PPKB
10	INDIKATOR	5.6 .1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen			85% (2019)				Program Kesehatan Reproduksi Remaja (tahun 2016:27)			Dinas PPKB
11	INDIKATOR	5.6 .2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Perwal			Tersedia (2019)							Dinas PPKB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN														
TARGET														
6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
1	INDIKATOR	6.1 .1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	tahun 2017 (90,55)	tahun 2018 (94,62)	100% (2019)			63,4	64,2	90,55	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	PDAM, DISBANGKIM
2	INDIKATOR	6.1 .1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.	m3	Tahun 2016 (31847973)		118,6 m3/detik (2019)					3E+07	sudah tercapai (SS)	paparan rancangan teknokratis
3	INDIKATOR	6.1 .1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen			100% (2019)							PDAM, DISBANGKIM
TARGET														
6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.														
4	INDIKATOR	6.2 .1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (cakupan penduduk yang memiliki akses terlayani sistem jaringan dan pengelolaan air limbah skala pengolahan air limbah skala kawasan kota)	Persen	tahun 2017 (72,1)	tahun 2018 (67,26)	100% (2019)			66,6	66,8	72,1	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	PDAM, DISBANGKIM, DLH
5	INDIKATOR	6.2 .1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa			45000 (2019)							PDAM, DISBANGKIM
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis masyarakat)											Dinkes, DISBANGKIM, DLH
6	INDIKATOR	6.2 .1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa										Dinkes, DISBANGKIM, DLH

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
7	INDIKATOR	6.2 .1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. (persentase rumah tangga ber PHBS)	Persen	tahun 2017 (65,2)	tahun 2018 (70)	Persentase masyarakat ber-PHBS mencapai 75% pada 2019			63,4	64,2	65,2	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Dinkes, DISBANGKIM, DLH
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
8	INDIKATOR	6.3 .1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	0	0								PUPR, Dinkes, DISBANGKIM, DLH
	TARGET	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
9	INDIKATOR	6.4 .1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Persen	tahun 2011 (20%) perda no 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah		ada (2019)					ada	sudah tercapai (SS)	BAPPEDA, PUPR
10	INDIKATOR	6.4 .1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.				ada (2019)							
	TARGET	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.											
11	INDIKATOR	6.5 .1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sungai			10 WS (2019)						Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam melalui Jumlah Situ/Danau/Kolam Retensi Berkondisi Baik berjumlah 7 pada	BAPPEDA, PUPR
12	INDIKATOR	6.5 .1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.				ada (2019)					ada	sudah tercapai (SS)	BAPPEDA, PUPR
	TUJUAN	8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELNJTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA											
	TARGET	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
1	INDIKATOR	8.1 .1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	%	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2016 sebesar 7,67 % dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2016 sebesar 5,05%)	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2013 sebesar 10,17 % dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2013 sebesar 4,16%)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2014 sebesar 9,83 % dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2014 sebesar 4,19%)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2015 sebesar 9,19 % dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2015 sebesar 4,40%)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2016 sebesar 7,67 % dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2016 sebesar 5,05%)		dilaksanakan belum mencapai target (SB)	bps, dispenda
2	INDIKATOR	8.1 .1. (a)	PDB Perkapita	Juta Rupiah	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2016 sebesar 33,25 juta dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2016 sebesar 25,36 juta)	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2013 sebesar 25,72 juta dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2013 sebesar 22,20 juta)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2014 sebesar 28,23 juta dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2014 sebesar 23,13 juta)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2015 sebesar 30,88 juta dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2015 sebesar 24,14 juta)	(berdasarkan Paparan Rancangan Teknokratis tahun 2016 sebesar 33,25 juta dan berdasarkan BPS Kota Bogor Tahun 2018 padat tahun 2016 sebesar 25,36 juta)		dilaksanakan belum mencapai target (SB)	bps dispenda
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
3	INDIKATOR	8.3 .1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	orang	Tahun 2017 (Laki-laki 105864 orang/67,59%) (Perempuan 50753 orang/32,40%)	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015:42,2%).					(Laki-laki 105864 orang/67,59%) (Perempuan 50753 orang/32,40%)	sudah tercapai (SS)	Disnaker/BPS Kota Bogor

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
4	INDIKATOR	8.3 .1 (a)	Presentase tenaga kerja formal	orang	Tahun 2017 (7392)	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015:42,2 %).					7392	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Disnaker/BPS Kota Bogor	
5	INDIKATOR	8.3 .1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	orang	tahun 2017 (335)						335	ada data tidak ada target (TT)	UMKM/BPS Kota Bogor	
6	INDIKATOR	8.3 .1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	%	tahun 2016 (15 %)			10	15			ada data tidak ada target (TT)	Disnaker, umkm	
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya											
7	INDIKATOR	8.5 .2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	%	tahun 2017 (9,50)	tahun 2018 (6,26)	tingkat penganggur an terbuka5,6 6% pada 2019			11,03	10,1	9,5	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	BPS, DISNAKER
	TARGET	8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya											
8	INDIKATOR	8.8 .1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	perusaha an										
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											
9	INDIKATOR	8.9 .1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%			Meningkat nya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).							bps dispenda
10	INDIKATOR	8.9 .1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	Orang			Meningkat nya jumlah wisatawan mancanega ra menjadi	167.006	202.280	222.507	246.870	283.901	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Disparbud

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
						20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).								
11	INDIKATOR	8.9 .1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang			3.425.211	4.148.650	4.563.516	5.063.201	5.822.681	ada data tidak ada target (TT)	Disparbud	
12	INDIKATOR	8.9 .1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	RP (milyar)			88.954.300.000	116.951.000.000	137.000.000.000	185.000.000.000	193.851.398.631	ada data tidak ada target (TT)	Disparbud	
13	INDIKATOR	8.9 .2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja											
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua											
14	INDIKATOR	8.1 0.1 *	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										DPMPTSP / Indag	
	TUJUAN	9	MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN											
	TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang											
1	INDIKATOR	9.2 .1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur (industri Pengolahan) terhadap PDB dan perkapita	%			Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	18,55	18,50	18,53	18,47	18,35	Belum Sesuai Target (SB)	BPS (Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018)
2	INDIKATOR	9.2 .1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	%			Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan	4,69	5,53	6,12	5,48	4,74	Sudah Sesuai target (SS)	BPS (Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018)
3	INDIKATOR	9.2 .2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%						14,57		16,02	Sudah Sesuai Target (SS)	BPS (Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018)

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Keblakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						an PDB (2015: 4,3%).							
	TARGET	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar										
4	INDIKATOR	9.3 .1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri									(NA)/(BB)	UMKM/Indag
5	INDIKATOR	9.3 .2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit									(NA)/(BB)	UMKM/Indag
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan										
6	INDIKATOR	9.4 .1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur									(NA)/(BB)	Dinas Lingkungan Hidup
7	INDIKATOR	9.4 .1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca			Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.						(NA)/(BB)	Dinas Lingkungan Hidup
	TUJUAN	10	BERKURANNYANYA KESENJANGAN										
	TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
1	INDIKATOR	10.1.1 *	Koefisien Gini.		0,32	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,45	0,36	0,47	0,43	0,43	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial, BPS
2	INDIKATOR	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).						BB/NA	Dinas Sosial, BPS

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
3			Tingkat kemiskinan	%	7,06	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7% (2015: 11,13%).	8,19	7,74	7,60	7,29	7,11	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Sosial, BPS	
	TARGET	10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
4	INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									BB/NA	HAM Pusat/Pemberdayaan Perempuan	
5	INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									BB/NA	HAM Pusat/Pemberdayaan Perempuan	
6	INDIKATOR		presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%								BB/NA	LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	TARGET	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
7	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		100	95% (2019)					Persentase masyarakat miskin terlayani di sarana kesehatan dasar dan rujukan 100%	sudah mencapai target (SS)	BPJS / Disnaker	
	TUJUAN	11	MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELAJUTAN											
	TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
1	INDIKATOR	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. (presentase luasan kawasan kumuh sedang)	%	tahun 2017 (72,2)	tahun 2018 (40)	100			87,34	84,36	72,2	Belum Sesuai target (SB)	Disbangkim,

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
2	INDIKATOR	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (rumah layak huni)	%	Tahun 2017 (80,09)	Tahun 2018 (82,7)	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.			74.3	77.1	79.9	Belum Sesuai target (SB)	rumkin
	TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.											
		11.2.1	proporsi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas											
3	INDIKATOR	11.2.1 (a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%			Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).					Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan melalui Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif sebanyak 1000unit	ada data tidak ada target (TT)	Dishub
4		11.2.1 (b)	jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar											Dishub
	TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
7	INDIKATOR	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	Tahun 2017 (74,38)	73	Meningkatnya cakupan penanganan			72,2	72,4	74,38	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
						n sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).								
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas											
8		11.7.1	proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang difabilitas											
			Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik Tertata (%)	%	tahun 2017 (0,98)	Tahun 2018 (0,99%)	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019					0,98	Belum Sesuai Target (SB)	
9		11.7.1 (a)	jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang			Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas RTH menjadi 5925 pada 2019 (Target revisi RPJMD)	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di				Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas RTH menjadi 40.74 Ha		Belum Sesuai Target (SB)	

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019							
10	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)									BB/NA	Polres/Pemberdayaan Perempuan dan anak
11	INDIKATOR	11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi									BB/NA	Polres
	TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah										
12	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya									BB/NA	Bappeda
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijaksanaan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030										
13	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana									BB/NA	BPBD
14	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah									BB/NA	BPBD
			Prosentase tanggap penanganan bencana	(%)		100	100			100	100	100	Sudah Sesuai target (SS)
	TUJUAN	12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB										
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
1	INDIKATOR	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).									BB/NA	Dinas Lingkungan Hidup
2			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3	(%)			Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta					BB/NA	Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data		
							2013	2014	2015	2016	2017				
						ton pada tahun 2019									
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.												
3	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	(%)									BB/NA	Dinas Lingkungan Hidup	
4			Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	(%)		98,16				107,6			ada data tidak ada target (TT)	Dinas Lingkungan Hidup	
5			Prosentase Pelayanan / Prosentase Volume Sampah Terangkut Ke TPA	(%)		73	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).			72,2	73,4	74,28	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup	
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.												
6		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan /SML) hingga tahun 2019.							BB/NA	Indag
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.												

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
7	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									BB/NA	Disnaker
	TUJUAN	13	PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM										
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
1	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.									BB/NA	
2			Penanganan bencana alam	(%)	100	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.			100	100	100	Sudah Sesuai target (SS)	RPJMD Tekonokratik
3	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									BB/NA	
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	jiwa								BB/NA	
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.										
4	INDIKATOR	13.2.1(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										LH
	TUJUAN	15	Ekosistem Daratan										
	TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.												
1	INDIKATOR	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.									BB/NA	Bappeda, PUPR

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.													
2	INDIKATOR	15.2.1 (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.									BB/NA	Bappeda, PUPR, Dinas Kehutanan
3	INDIKATOR	15.2.1 (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.									BB/NA	Bappeda, PUPR, Dinas Kehutanan
4	INDIKATOR	15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.									BB/NA	Bappeda, PUPR, Dinas Kehutanan
TARGET 15,3 Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi													
5	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan									BB/NA	Bappeda, PUPR, Dinas Kehutanan
TARGET 15,9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.													
6	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati									BB/NA	LH
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH													
TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.													
1	INDIKATOR	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.				4	7	2	6		ada data tidak ada target (TT)	BPS, Polres
2	INDIKATOR	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.									BB/NA	
5	INDIKATOR	16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(%)			Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap					BB/NA	BPS, Polres

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						anak pada tahun 2019							
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak.										
6	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.										
7	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.			Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).						BB/NA	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak, POLRES
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
8	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.			Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).						BB/NA	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak, POLRES
9			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)		Jumlah orang atau kelompok masyarakat				Persentase pendampingan kasus kekerasan		Sudah Sesuai target (SS)	dinas pemberdayaan masyarakat dan

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.				terhadap anak tindak kekerasan mencapai 100%		perlindungan anak, POLRES	
10			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	(%)	67%				22/49= 44,90 %		ada data tidak ada target (TT)	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak, POLRES	
11			Angka Kriminalitas/jumlah penduduk	(%)			1415	1387	1449	1554	ada data tidak ada target (TT)	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak, POLRES	
12	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.			Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.					BB/NA	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak, POLRES	
	TARGET	16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
13	INDIKATOR	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).									BB/NA	
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
14	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Kota			WTP			WDP	WDP	WTP	Sudah Sesuai target (SS)	RPJMD Tekonokratik
15	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kota (Indeks E- Government)			Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kota			2,91		2,92	Belum Sesuai Target (SB)	RPJMD Tekonokratik
16	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.									BB/NA	
17	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).									BB/NA	
18	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan				Persentase permintaan akan informasi publik yang terlayani oleh PPID dan PPID pembantu mencapai 100%		BB/NA	

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data	
							2013	2014	2015	2016	2017			
						perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.								
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
19	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	jiwa	Tahun 2016 (8 jiwa/44 (18,18))		Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	7jiwa/45	7jiwa/45	7jiwa/45	8 jiwa/44 (18,18))		Sudah Sesuai target (SS)	BPS 2018
20	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Tahun 2016 (85 /15 (35,71%))		Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).				5 /15 (35,71%)		Sudah Sesuai target (SS)	BPS 2018
21	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.										BB/NA	

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
33	INDIKATOR	16. 7.2 . (b)	Indeks Kebebasan Sipil.									BB/NA	
23	INDIKATOR	16. 7.2 . (c)	Indeks Hak-hak Politik.									BB/NA	
	TARGET	16. 9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
24	INDIKATOR	16. 9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									BB/NA	Disdukcasip
25	INDIKATOR	16. 9.1 . (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.				Meningkat nya cakupan pelayanan dasar kepemilika n akte lahir untuk penduduk 40% berpendap atan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019					BB/NA	Disdukcasip
26			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	(jiwa)/ji wa			Meningkat nya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).				93,33%	Sudah Sesuai target (SS)	Disdukcasip
27	INDIKATOR	16. 9.1 . (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun)	jiwa	313092,00		Meningkat nya persentase anak yang				313092	Belum Sesuai target (SB)	BPS, Disducapil

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kebelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).							
	TUJUAN	17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
1	INDIKATOR	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	triliun	215529741 7691				1.827.008.27 3.928	2.130.926.86 9.342	2.155.297.41 7.691	ada data tidak ada target (TT)	RKPD Tahun 2017
2	INDIKATOR	17.1.1 .(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	Tahun 2017 (66,43 %)	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).			64,08	65,72	66,43	Sudah Sesuai target (SS)	RKPD Tahun 2017 (halaman 95)
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi										
3	INDIKATOR	17.6.2 .(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.									BB/NA	Diskominfo
4	INDIKATOR	17.6.2 .(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.									BB/NA	Diskominfo
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
5	INDIKATOR	17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet.			tersedianya jangkauan layanan akses telekomuni					100	Sudah Sesuai target (SS)	Diskominfo

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
						kasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan .							
	TARGET	17. 17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
6	INDIKATOR	17. 17. 1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									BB/NA	
	TARGET	17. 17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
7	INDIKATOR	17. 17. 1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									BB/NA	
	TARGET	17. 18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
8	INDIKATOR	17. 18. 1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik									BB/NA	
9	INDIKATOR	17. 18. 1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.									BB/NA	
	TARGET	17. 19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET KOTA	TARGET SDGs	capaian indikator TPB Time series Kelelakang					Keterangan	Sumber Data
							2013	2014	2015	2016	2017		
10	INDIKATOR	17. 19. 2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.									BB/NA	Disdukcasip
	TARGET	17. 19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
11	INDIKATOR	17. 19. 2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).									BB/NA	BPS
	TARGET	17. 19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
14	INDIKATOR	17. 19. 2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website									BB/NA	
15	INDIKATOR	17. 19. 2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)									BB/NA	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

BAB VIII

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BOGOR

8.1. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 400.45-192 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor sebagai sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 7 – 7,86% pada periode akhir masa RPJMD tahun 2019. Komitmen tersebut, dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah terkait setiap tahunnya.

Tabel 8.1

Skenario Target Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Miskin (%)	8,30	8,19	8,08	7,97	7,86
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66
Laju Inflasi	4,05	4,05	4,05	4,04	4,04
Angka Melek Huruf	99,09	99,15	99,20	99,26	99,32
Angka Usia Harapan Hidup	69,41	69,51	69,62	69,73	69,83

Sumber : Perda RPJMD Tahun 2015-2019

Untuk mewujudkan tercapainya target tersebut di atas, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan melalui 6 urusan yang dituangkan kedalam 20 program yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Peningkatan Ketahanan Pangan

7. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
9. Pendidikan Menengah
10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
11. Peningkatan Kesempatan Kerja
12. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
13. Lingkungan Sehat Perumahan
14. Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
16. Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
17. Pembinaan eks penyandang Penyakit Sosial (eks narapina, PSK, Narkoba dan penyakit social lainnya)
18. Pembinaan Anak Terlantar
19. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
20. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Dari berbagai upaya intervensi dengan berbagai program tersebut, tingkat kemiskinan di Kota Bogor di 2017 mengalami penurunan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya kemiskinan. Sementara itu, Tingkat kemiskinan di Kota Bogor 2018 mengalami penurunan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017. Persentase kemiskinan Kota Bogor menurut BPS, pada tahun 2014 sebesar 7,74 persen menurun menjadi 5,93 persen pada tahun 2018. Artinya pada periode Tahun 2014 sampai 2018 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,81 Persen

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2014 indek kedalaman kemiskinan sebesar 1.12 persen menurun pada tahun 2017 menjadi 0,99 persen yang artinya tingkat rata-rata kesenjangan penduduk Kota Bogor semakin menurun.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2014 indek keparahan kemiskinan di Kota Bogor sebesar 0,23 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 0,17 persen, yang artinya tingkat ketimpangan penduduk Kota Bogor semakin menurun.

Capaian Kinerja program dalam penanganan program prioritas kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Intervensi Bidang Pendidikan

- Bantuan hibah dana BOS diberikan ke SD Swasta /MI SMP swasta/MTs melalui belanja hibah.
- BOS Kota disalurkan secara berlanjut dari tahun 2014-2018 langsung kepada TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri dengan total anggaran sebesar Rp. Rp.187.059.820.500.
- Memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) khusus bagi warga Kota Bogor yang berasal dari keluarga tidak mampu pada tahun 2014-2018 sebanyak 21.782 orang dengan total anggaran sebesar Rp.270.023.000.000,-

2. Intervensi Bidang Kesehatan

- Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Luar Kuota Jamkesmas, dimana sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat miskin di Kota Bogor sebanyak 160.000 jiwa, berdasarkan SK Wali Kota Bogor Nomor 440.45- 164.2 Tahun 2018 .
- Jumlah kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di rumah Sakit sepanjang Tahun 2014-2018 yang dibiayai Pemerintah melalui fasilitas SKTM dan Jamkesda terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena bertambahnya peserta BPJS.

Tabel 8.2
Jumlah Kunjungan dan Pembiayaan Pengguna
Jaminan SKTM / Jamkesda di Rumah Sakit

Tahun	Jumlah Rawat Jalan	Jumlah Rawat Inap	Jumlah yang dibayarkan
2014	8.574	2340	15.650.862.449
2015	4753	1105	6.404.104.896
2016	358	208	1.789.325.194
2017	26	387	2.006.814.557
2018	18	918	4.992.841.854

- Penyediaan tempat tidur di RSUD Kota Bogor kelas III sebanyak 327 tempat tidur atau sekitar 81,05 % dari total 365 tempat tidur.
- Perluasan akses gakin terhadap layanan kesehatan yang tergambar dari jumlah pasien yang dilayani di RSUD Kota Bogor Tahun 2017 berjumlah 324.811 pasien, dengan rincian pasien BPJS berjumlah 301.574 pasien atau 92,85% dan Non BPJS berjumlah 23.237 pasien atau 7,15%. Jumlah pasien yang dilayani di RSUD Kota Bogor Tahun 2018 berjumlah 245.526 Pasien, dengan rincian pasien BPJS berjumlah 221.256 Pasien atau 90,11% dan Non BPJS berjumlah 24.270 Pasien atau 9,89%.

- pelayanan dan pemberian jaminan kepada pasien rawat jalan tahun 2016 sebanyak 3.223 orang/kasus dan rawat inap sebanyak 23 orang/kasus yang berkunjung ke 24 puskesmas di Kota Bogor, jumlah seluruh kunjungan 3.246 orang, dengan total biaya sebesar Rp. 31.457.000, tahun 2015 Jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 13.566 orang, dengan rawat inap sebanyak 79 orang.
- Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) sebagai payung hukum dan regulasi dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit bagi Penduduk Miskin Kota Bogor yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya

3) Intervensi Bidang Tenaga Kerja

- Berbagai pemberian pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi 1.122 pencaker, penganggur, dan warga miskin.
- Bursa Kerja Expo, yang diikuti oleh 35 Perusahaan yang menyediakan lowongan kerja sebanyak 1500 lowongan dengan jumlah pencaker yang diterima sebanyak 253 orang. Ditahun 2016 Bursa Kerja Expo diikuti oleh 40 perusahaan yang menyediakan lowongan kerja sebanyak 3.215 lowongan dan 282 orang yang diterima. Tahun 2018 BKE diikuti oleh 30 Perusahaan yang menyediakan lowongan kerja sebanyak 3.679 lowongan dan 60 orang yang diterima.
- Pemberian Kerja Sementara (Padat Karya), dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat miskin serta korban PHK di Kota Bogor dengan menyerap tenaga kerja tahun 2017 sebanyak 153 orang dan ditahun 2016 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 213 orang. Tahun 2018 menyerap sebanyak 40 orang

4) Intervensi Bidang Perumahan dan permukiman

- Penunjang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan lanjutan kegiatan P2KP. Telah dilaksanakan penataan kawasan kumuh, berupa perbaikan jalan setapak, drainase, septic tank komunal, dan gerobak sampah yang berlokasi di 5 kelurahan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari KOTAKU APBN berupa perbaikan Jalan, Drainase dan Pengadaan Gerobak Sampah yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Batu Tulis, Kelurahan Babakan Pasar, kelurahan Paledang, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Sempur, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Menteng, Kelurahan Cibogor, dan Kelurahan Gunung Batu.
- Penanganan pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha), bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Bogor, dengan melakukan penataan

kawasan di kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2018 Kegiatan ini berupa kegiatan fisik Konstruksi dan Konsultan Pengawasan dengan lokasi sebagai berikut:

- a. 4 titik lokasi di Kecamatan Bogor Tengah yang meliputi Kelurahan Sempur 1 lokasi, Kelurahan Ciwaringin 2 lokasi dan Kelurahan Gudang 1 lokasi
 - b. 4 titik lokasi di Kecamatan Bogor Selatan yang meliputi Kelurahan Kertamaya 3 lokasi dan Kelurahan Batutulis 1 lokasi
 - c. 2 titik lokasi di Kecamatan Bogor Utara yang meliputi Kelurahan Cimahpar 1 lokasi dan Kelurahan Cibuluh 1 lokasi
- Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata bertujuan menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan perumahan tidak tertata di seluruh Kota Bogor secara bertahap, meliputi pekerjaan jalan setapak, pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT), Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan saluran (drainase) permukiman di lokasi kawasan kumuh. Tahun 2018 Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata khususnya pekerjaan jalan setapak dengan hasil terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi baik seluas 385.827,63 m² dari target 100.000 m².

5) Intervensi Bidang Sosial

- Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 17.071 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 33.550.190.000,- Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 14.825 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 28.473.960.000,-. Ditahun 2016 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terbantu adalah sebanyak 9.823 KPM. dengan total bantuan sebesar Rp. 16.816.455.000,- tahun 2015 sebanyak 8.801 RTSM dengan total bantuan sebesar Rp. 15.346.354.542,- dan 2014 sebanyak 41.394 RTSM dengan total bantuan sebesar Rp. 15.678.883.000,-
- Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai sebesar Rp. 110.000,-/KPM per bulan yang sudah disalurkan selama 12 bulan kepada 37.940 KPM.
- Pembentukan 68 Koperasi dari Eks. UEK-SP KUBE GAKIN dan Koperasi UP2K PKK, yang telah menyalurkan jumlah penerima modal usaha bagi KK Miskin sebanyak 2.761 Kepala Keluarga, sedangkan ditahun 2016 penyaluran modal usaha bagi keluarga miskin diberikan kepada 2.196 KK dan tahun 2014 modal usaha bagi keluarga miskin diberikan kepada 3.734 KK
- Penyaluran Raskin kepada 39.002 Sasaran sebanyak 7.020.360 kg dengan capaian 100% dan tepat waktu.

- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi penanganan Anak Jalanan, Gepeng, dan PSK.
 - Penanganan bagi korban Narkotika dan HIV/AIDS, dan Eks Psikotik serta pembinaan korban tindak kekerasan dan Trafficking.
- 6) Intervensi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penanganan kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Bogor sebanyak 109 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 53 kasus.
 - Melayani home visit kepada korban kekerasan yaitu dengan memberikan motivasi serta penguatan kepada korban kekerasan.

8.2. Penataan Transportasi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2015-2019, pelaksanaan pembangunan transportasi tertuang dalam Misi Ketiga, yaitu menjadikan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan yang bertujuan mengembangkan transportasi kota dengan mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda.

Sasaran penanganan bidang prioritas penataan transportasi dan angkutan umum adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan;
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda; serta
- c. Berkurangnya kemacetan.

Perkembangan pembangunan daerah yang telah dicapai terkait penanganan Penataan Transportasi dan Angkutan Umum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan transportasi sepanjang tahun 2014-2018 diarahkan pada upaya melanjutkan proses tahapan pengalihan angkutan umum dari model angkutan umum berkapasitas terbatas menjadi angkutan bersifat massal. Langkah –langkah yang dilakukan diantaranya :
 - Langkah awalnya ditempuh dengan menata status badan hukum pengelola angkutan umum. Sampai dengan akhir tahun 2018 sudah terbentuk 25 Badan Hukum angkutan kota yang terdiri dari 14 Koperasi dan 11 Perusahaan dan melibatkan sebanyak 3.412 unit atau seluruh angkutan kota di Kota Bogor. Dengan demikian angkot yang terdata di Kota Bogor semuanya sebanyak 3.412 unit atau 100% sudah tergabung di dalam badan hukum - badan hukum tersebut.

- Melakukan *re-routing* angkutan kota melalui penataan jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang atau pengumpan (*feeder*). Penataan jaringan trayek angkutan perkotaan dilakukan dengan cara mengubah jarak dan lintasan trayek; menggabungkan trayek; dan mengembangkan trayek baru.
 - Penerapan lalu lintas Sistem Satu Arah (SSA) seputar Kebun Raya Bogor (KRB) diarahkan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang meliputi keselamatan, kemacetan dan pelayanan angkutan umum. Penerapan SSA – KRB telah menghasilkan beberapa hal sebagai berikut
 - a. Terjadi peningkatan kinerja pada 35 ruas jalan kawasan seputar KRB. Sebelumnya 18 ruas jalan pada kondisi kritis dan setelah diberlakukan SSA, ruas jalan yang kritis tinggal 9 ruas.
 - b. Terjadi penghematan waktu tempuh keliling KRB pada jam sibuk. Sebelum SSA waktu tempuh 17,41 menit dan menjadi 10,8 setelah SSA diberlakukan.
 - c. Kemacetan berkurang pada beberapa titik seperti Jalan Juanda, Simpang BTM, Simpang Tugu Kujang dan Simpang Pasar Bogor.
 - d. Hasil Survey mahasiswa IPB tentang dampak SSA menyatakan :
 - 76% pengendara mobil pribadi setuju dengan SSA
 - 72% warga pengguna angkot setuju dengan SSA
 - 14% supir angkot setuju dengan SSA
 - 38% responden menyatakan SSA bermanfaat mengurangi kemacetan
 - 21,13% responden menyatakan SSA membuat perjalanan lebih teratur dan tertib
 - 14,08% responden menyatakan SSA membuat perjalanan lebih lancar dan nyaman
- 2) Penataan jaringan trayek angkutan perkotaan pada tahun 2017 telah menghasilkan rencana pemetaan angkutan kota sebagai berikut :
- Angkutan masal yang saat ini hanya melayani 2 trayek dengan 28 armada bus sedang, kedepan akan dikembangkan menjadi 7 trayek dan akan dilayani oleh 210 unit bus ukuran sedang. Sedangkan untuk angkutan *feeder* akan dikembangkan menjadi 30 trayek dari 23 trayek yang ada sekarang dan dilayani oleh 2.563 unit angkutan kota.
 - Untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan penataan transportasi, sepanjang tahun 2017 telah disusun lima buah Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu meliputi : Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan di

Kota Bogor; Peraturan Walikota Persyaratan dan Tata Cara Pemasangan Reklame; Peraturan Walikota Persyaratan dan Identitas Kendaraan Umum; Peraturan Walikota Pelaksanaan Peremajaan Kendaraan Umum; dan Peraturan Walikota Tata Cara Pemindahan dan Penguncian Kendaraan Bermotor.

3) Prioritas penanganan transportasi juga menyentuh penanganan aspek pendukung lainnya yang ditujukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi diantaranya seperti peningkatan kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda yaitu :

- Pemasangan 148 buah tiang bollard dan pemasangan fasilitas jalur sepeda di Jalan Padjajaran mulai dari depan Gedung Lippo Kebun Raya sampai dengan Transpoint Trans Pakuan di Jalan Cidangi.
- Pemasangan 37 unit rambu-rambu, 13 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), 122 buah *water barrier*, 336 buah *traffic cone*, 38 unit pagar pengaman jalan serta pembangunan 4 pulau lalu lintas median jalan di Jalan Juanda, Jalan R. Saleh Bustaman, Jalan Kol. Achmad Syam, dan Jalan Kapten Muslihat.
- Pembangunan dua shelter Non BTS Trans Pakuan yang terletak di Jl. Dadali di depan SMPN 5 Kota Bogor dan Jl. Ahmad Yani di depan SMPN 8 Bogor serta peningkatan Shelter BTS Trans Pakuan di 13 titik lokasi sepanjang koridor 2.
- Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dalam tahun 2014-2018 telah dilaksanakan di 18 lokasi, yaitu di SD Negeri Semplak 1 dan Semplak 2 serta SMP Negeri 7 Kota Bogor, SDN Pabuaran pamoyanan, SDN Kertamaya, SDN Kedunghalang 1, SDN Sindangbarang 3, SDN Sindangbarang 4, SDN Cilendek 1, SDN Kertamaya, SDN Batutulis, Sekolah Almustarih, Sekolah Rimba Mulya, Sekolah Yapis, TK.Akbar, SMPN 2/SDN Pengadilan, SDN Kawung Luwuk, dan SD Mardi Waluya.
- Tahun 2018 telah dibangun 15 titik shelter angkutan umum yang berlokasi di Taman Kencana (Jalan Salak), Shelter Perempatan Lodaya, Shelter Jalan Cibuluh (Polsek Sukaraja), Shelter Mako Brimob, Shelter Mako Polres Bogor Kota, Shelter Talang (Karadenan), Shelter Jalan Mawar, Shelter RSUD Kota Bogor, Shelter Mall Jambu Dua, Shelter Dinas Pendidikan, Shelter Kantor Dinas Kesehatan, Shelter Kantor BPJS, Shelter Gedung Jamsostek/DPRD Kota Bogor, Shelter SMK 3 (Jalan Pajajaran) dan Shelter GOR Pajajaran (Jl. Pemuda).
- melakukan evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang. Evaluasi dilakukan terhadap 150 segmen jalan kategori Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota serta 54 persimpangan di Kota Bogor. Hasil evaluasi tersebut diperlukan sebagai

bahan serta informasi dalam penanganan kawasan rawan kemacetan dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan perhubungan di Kota Bogor.

- Dalam mendukung penerapan SSA-KRB, selama tahun 2016 telah dilakukan pemasangan 284 buah tiang bollard di jalur pedestrian serta pembangunan 5 titik median jalan dan pulau lalu lintas yang berlokasi di Simpang Tugu Kujang, Simpang Mal BTM, Simpang Bank BNI Juanda, Jalan Kapten Muslihat dan Simpang Denpom.
- Terealisasi pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada tahun anggaran 2015 yaitu Warning Light 3 buah, Cermin tikungan 28 unit, Delineator 125 buah, Perangkat Kendali APILL 1 set dan tiang octagonal galvanis 1 set, serta terealisasinya pemasangan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan yaitu Paku Marka Bulat sebanyak 500 buah.
- Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, sepanjang tahun 2018 telah dilaksanakan pengadaan dan pemeliharaan marka jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pemasangan 81 unit rambu-rambu, 13 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), 1.120 buah paku marka jalan, 45 unit pagar pengaman jalan, 220 buah *rubber speedbump*, 63 unit cermin tikungan, 149 buah *water barrier*, dan 949 unit *traffic cones* serta pemeliharaan median jalan di 4 titik yaitu Jalan Kol. Ahmad Syam, Jalan Pahlawan, Jalan KS. Tubun dan Jalan Ahmad Yani.
- Dalam mendukung peningkatan kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda, selama tahun 2018 telah dilakukan pemasangan 66 buah tiang bollard yang berlokasi di depan ADA Swalayan (Jalan Raya Pajajaran) dan pedestrian jalur SDN Bangka (Jalan Otista) serta pemeliharaan jalur pejalan kaki di sepanjang Jalan Kapten Muslihat sampai dengan Jalan Paledang (Pos Gatur Paledang).
- Tahun 2018 Telah dilaksanakan penataan lokasi parkir pada badan jalan di 7 titik (Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, Jl. Pengadilan, Jl. Dewi Sartika, Jl. MA Salmun, Jl. Mayor Oking, dan Jl. Nyi Raja Permas) untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir melalui pemasangan 35 unit rambu parkir dan 34 buah papan tambahan serta pengecatan marka parkir sepanjang 352m². Dan telah diluncurkan 18 unit Terminal Parkir Elektronik (TPE) "Parking Meter" di sepanjang Jalan Suryakencana (sebanyak 15 unit) dan sepanjang Jalan Otista (sebanyak 3 unit). Dalam pelaksanaannya, pembayaran retribusi parkir di TPE oleh masyarakat menggunakan *kartue-money* yang bekerjasama dengan Bank BJB dan Bank Mandiri.

- 4) Kondisi akhir di tahun 2018 rata-rata kecepatan laju kendaraan pada 150 ruas jalan yang ada di Kota Bogor adalah 34,84 km/jam pada hari kerja dan 36,75 km/jam pada hari libur bila dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat 4,78 km/jam yaitu 31,96 km/jam.
- 5) Dalam melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, upaya yang dilakukan adalah :
- Tahun 2016 telah dilaksanakan penataan, pengaturan dan pelayanan perparkiran terhadap 74 titik lokasi parkir di tepi jalan umum (*onstreet parking*) dan 3 lokasi Tempat Khusus Parkir (Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, dan Jl. Pengadilan) serta pemanfaatan *Smart Parking* untuk kemudahan dalam penerapan tarif progresif.
 - tahun 2017 telah dilaksanakan penataan lokasi parkir pada badan jalan di 7 titik. Masing-masing di Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, Jl. Pengadilan, Jl. Dewi Sartika, Jl. MA Salmun, Jl. Mayor Oking, dan Jl. Nyi Raja Permas. Juga telah dipasang 33 unit rambu parkir dan 24 buah papan tambahan serta pengecatan marka parkir sepanjang 479m².
 - Pada tahun 2018, telah dilaksanakan pembangunan pangkalan angkutan umum di Ciparigi sebagai bagian dari upaya mendukung penataan ulang (*rerouting*) angkutan umum Kota Bogor. Pangkalan tersebut juga dilengkapi dengan rambu petunjuk berupa rambu portal sebanyak 1 unit, rambu tiang F sebanyak 2 unit, rambu larangan masuk dan larangan belok kanan masing-masing sebanyak 1 unit, rambu petunjuk berputar sebanyak 4 unit, rambu larangan parker sebanyak 2 unit, rambu petunjuk arah sebanyak 2 unit, delineator sebanyak 15 buah dan marka sepanjang 24 m².
- 6) Untuk meningkatkan disiplin terhadap kendaraan dan pengguna kendaraan upaya yang dilakukan adalah :
- Tahun 2017 dilaksanakan 90 kali operasi penertiban gabungan terpadu dengan instansi terkait yang dilakukan terhadap angkutan umum dan angkutan barang. Dalam hal ini sebanyak 416 unit kendaraan dinyatakan telah melakukan pelanggaran. Tahun 2018 telah dilaksanakan operasi gabungan 40 kali operasi angkutan umum dengan jumlah pelanggaran sebanyak 320 kendaraan dan 40 kali operasi angkutan barang dengan jumlah pelanggaran sebanyak 360 kendaraan
 - telah dilaksanakan kegiatan uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dari tahun 2014-2018 yaitu :

Tabel 8.3

Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji	Lulus Uji	Tidak Lulus
2014	23.156	22.064	1.092
2015	22.925	22.262	673
2016	21.324	20.501	823
2017	21.963	21.386	577
2018	21.474	21.049	425

- Uji kelaikan kendaraan bermotor menggunakan referensi International Standard ISO 9001:2008, Quality Management System-Resquirements.
- 7) Pada tahun 2016, telah dilaksanakan kerjasama Optimalisasi Konverter Kit Angkutan Umum Pengguna Bahan Bakar Gas dengan CV. Saghina Anugerah Mas. Kerjasama dilakukan sebagai upaya pengembangan penggunaan Bahan Bakar Gas pada Angkutan Umum serta optimalisasi SPBG milik PT. PGN (Persero). Sampai dengan tahun 2018, angkutan kota yang sudah beroperasi dan beralih dari penggunaan BBM ke BBG sebanyak 450 kendaraan.
 - 8) Dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan angkutan Sampai dengan tahun 2017 telah direalisasikan pengoperasian 3 koridor Trans Pakuan dan pengurangan becak sebanyak 680 unit.
 - 9) Pada tahun 2018 telah dilakukan studi kelayakan penyelenggaraan angkutan sekolah dengan lokasi acuan di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membenahan bidang transportasi dan angkutan umum telah menghasilkan penghargaan berupa:

- Wahana Tata Nugraha untuk kategori angkutan umum, manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dari Kementerian Perhubungan
- Indonesia Road Safety Award (IRSA) yang merupakan penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang berkomitmen dengan manajemen keselamatan jalan.

8.3. Penataan Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2015 – 2019, strategi secara umum dalam penataan Pedagang Kaki Lima (sektor informal) adalah mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan strategi yaitu menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional. Penataan PKL dilaksanakan melalui :

1. Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan
2. Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal
3. Membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang
4. Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal
5. Mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor informal
6. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal
7. Mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang bagi kegiatan sektor informal.

Sedangkan strategi yang ditempuh dalam penanganan PKL tahun 2015-2019 difokuskan pada :

1. Penataan Lokasi PKL
 - a. Penegasan titik lokasi PKL, berikut dengan pengaturan jenis komoditas, model desain berjualan, dan waktu berjualan.
 - b. Pendataan registrasi PKL untuk pengendalian jumlah PKL, dengan memberikan tanda khusus resmi
2. Pemberdayaan PKL
 - a. Pembinaan dan penyuluhan peningkatan disiplin PKL
 - b. Pembinaan dan pemantauan kebersihan, keamanan dari komoditas yang dijual PKL dengan target 356 PKL di Zona

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima sepanjang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

8.3.1. Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan tahun 2018 adalah :

1. Revitalisasi zona PKL yang berlokasi di Jalan Binamarga dengan paket pekerjaan diantaranya:
 - a. Perbaikan bangunan yang meliputi perbaikan atap, rangka baja ringan, plafon, pengecatan
 - b. Pembuatan Turap Penahan Tanah seluas 99.20 M¹
 - c. Revitalisasi Saluran Air seluas 52.40 M¹
 - d. Revitalisasi Ruang Ibadah (Musholla) 1 unit

- e. Pemasangan Conblock untuk Lahan Parkir seluas 141.61 M²
2. Pemeliharaan zona PKL di 5 lokasi diantaranya :
 - a. Zona PKL Jalan Pengadilan sebanyak 17 Unit /los
 - b. Zona PKL Jalan Papandayan sebanyak 18 unit/los
 - c. Zona PKL Bunga Potong Jalan Binamarga sebanyak 13 unit/los
 - d. Zona PKL Jalan Sukasari III sebanyak 23 unit/los, dan
 - e. Zona PKL Jalan Siliwangi sebanyak 20 unit/los.
- 2) Tahun 2018 dilaksanakan Penertiban PKL di 30 kawasan dengan tindakan berupa pengosongan trotoar dan bahu jalan dari aktivitas PKL serta sebagian dilakukan relokasi terhadap PKL tersebut. Adapun kawasan yang ditertibkan adalah : Jalan Suryakencana, Jalan M.A Salmun, Jalan Sudirman, Jalan Sawojajar, Jalan Mayor Oking, Jalan Raya Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan Sempur dan Taman Kencana, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Dewi Sartika, Jalan Juanda, Jalan Tentara Pelajar , Jalan Pengadilan , Jalan R3, Jalan RE Marta Dinata, Jalan Bangka, Jalan Tajur, Jalan R.Ahmad Adnawidjaja, Jalan Pasir Kuda, Jalan Pemuda, Jalan Pedati, Jalan Salak, Jalan Jalak Harupat, Jalan Empang, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan Pengadilan, Jalan Otista , Jalan Roda dan Jalan Abdulah Bin Nuh
- 3) Selama tahun 2017, telah dilakukan beberapa langkah dalam penataan Pedagang Kaki Lima untuk mendorong terciptanya ruang publik yang lebih dan pemberdayaan ekonomi yaitu;
 - Pembangunan Zona PKL Ciremai Ujung untuk menampung PKL sebanyak 50 los
 - Pembangunan Zona PKL Jl. Siliwangi untuk menampung PKL sebanyak 44 los
 - Revitalisasi Zona PKL Jl. Pejagalan untuk PKL sebanyak 32 los
 - Mengelola destinasi penunjang wisata Puncak (Sentra Kuliner) di Jl. Bina marga
- 4) Penataan Pedagang Kaki lima yang dilaksanakan tahun 2016 adalah:
 - Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL Zona Cidangiang berupa bangunan fisik yang terdiri dari 14 los/lapak PKL
 - Relokasi zona PKL Tanaman Hias Jalan. Otista ke R-3, oleh karena lokasi Jalan. Otista dijadikan SSA
 - Merelokasi PKL dari Taman Kencana ke Ciremai Ujung sebanyak 50 PKL
 - Merelokasi PKL Tanaman Hias di Jalan. Pajajaran ke R.3
 - Merelokasi PKL Tanaman Hias di Jalan Sukasari ke Jalan. R-3 sebanyak 9 PKL
 - Mereloksi PKL Tanaman Hias yang ada di Jalan Bina marga yang tempatnya digunakan untuk relokasi PKL bunga potong ke Jl.R-3
 - Penataan PKL kawasan Pasar anyar (Jalan M.A Salmun Jalan Dewi Sartika. Jalan. Nyi Raja Permas dan Jalan. Sawojajar)

- Penataan PKL kawasan Pasar Bogor, Jalan. Otista, Jalan. Suryakencana, Jalan. Pedati, Jalan Pemuda, Jalan. Lawangsaketeng, dan Tanjakan Empang Depan BTM.
 - Melaksanakan pendataan PKL didalam dan diluar zona serta penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi 393 PKL di lokasi zona PKL.
- 5) Pelaksanaan program penataan PKL di Kota Bogor selama tahun 2015 antara lain :
- Merelokasi PKL Tanaman Hias yang berada di sisi Jalan Ahmad Yani, di Jalan Dadali, di Jalan Sukasari, di Jalan Bina Marga, ke sisi jalan R-3.
 - Melakukan relokasi PKL di Jalan Veteran ke Jalan Dewi Sartika.
 - Membangun Sentra Makanan Jajanan di Gang Selot dan Jl. Bina Marga
 - Penataan PKL kawasan Pasar anyar (Jl/M.a salmun,Jl.dewi sartika.Jl. Nyi Raja Permas dan Jl. Sawojajar)
- 6) Kegiatan penataan PKL yang dilakukan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- Relokasi sementara PKL Jl. Dewi Sartika terbagii menjadi 2 Kelompok PKL yakni pedagang pagi-siang 211 PKL dan pedagang sore 106 PKL
 - Relokasi PKL dari Jl. Achmad Yani ke Jl. R3 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur.
 - Pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jl. MA Salmun ke Pasar Warung Jambu.

8.4. Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau

Program Prioritas Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lainnya, berkaitan dengan misi ketiga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019, yaitu: Menjadikan Bogor Kota yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut adalah: meningkatkan kualitas penataan ruang dan mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda.

Dalam program prioritas ini, ruang yang disasar adalah ruang sepanjang sungai (bantaran), sepanjang jalan, aset-aset milik daerah atau pihak lainnya yang bisa dioptimalkan menjadi RTH, dan ruang privat (pekarangan rumah).

Berikut ini capaian kinerja dalam penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau yang dihasilkan tahun 2014-2017 :

- 1) Capaian penambahan dan perbaikan Ruang Terbuka Hijau publik di tahun 2017 terdiri dari lima unit taman skala lingkungan yang baru dengan total luasan 3.160,72 m² dan dua unit taman lingkungan yang ditingkatkan kualitasnya dengan total luasan 3.622, m², satu unit taman jalur hijau baru dengan luasan 230.22 m², satu unit taman sudut

baru dengan luas 168,45 m², dua unit taman lereng, dan satu unit taman pulau jalan (TPJ) yang ditingkatkan kualitasnya dengan luas 3.058,87 m². Tahun 2018 penambahan total luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya sebesar 7.302,39 m² dan taman jalur, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang tertata menjadi 418.651,41 m².

- 2) Potensi RTH dari ruang privat di pekarangan rumah mencapai 52% yang terdiri dari Kecamatan Bogor Utara RTH privat mencapai 50,96%, di Kecamatan Bogor Selatan mencapai 48,38%, Kecamatan Bogor Timur mencapai 57,73%, Kecamatan Bogor Barat mencapai 55,56%, Kecamatan Bogor Tengah mencapai 51,65%, dan Kecamatan Tanah Sareal mencapai 48,03%. Ini adalah salah satu pekerjaan rumah untuk terus mendorong kesadaran dari pemilik lahan untuk menjadikan RTH privat menjadi RTH yang fungsional.
- 3) Tahun 2018 hasil pendataan RTH di 2 Kecamatan adalah luas ruang terbuka hijau di PSU perumahan tersebut seluas **33.29 Ha** yang terdiri dari jalur hijau, median jalan, lapangan, pulau jalan, taman dan taman sudut.
- 4) Terbangunnya taman yang memenuhi kriteria ramah anak, lansia, dan difabel sampai dengan tahun 2018 mencapai 418.651 m² dari target 433.328 m² atau tercapai 96,61 persen. Ditahun yang sama telah dibangun 4 taman tematik di Kecamatan Bogor Utara, dan Bogor Tengah yaitu Taman Matematika dan Taman Calincing di Kelurahan Tegal Gundil, Taman Sempur dan Taman Kaulinan di kelurahan Sempur.
- 5) Dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penyediaan ruang public, pembangunan prasarana pedestrian dan pesepeda menjadi salah satu indikator keberhasilan. Tahun 2017 panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya melalui pelebaran prasarana pedestrian mencapai 15,3039 km atau meningkat 4,854 km dari target 15,107 km. Sedangkan panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun mencapai 258,307 km atau sebesar 99,06% dari target 260,762 km. Tahun 2016 Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian), dari target 4,854 km tercapai 8,231 km atau sebesar 169,57% dari target. Sedangkan panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun mencapai 4,734 km dari target 4,672 km atau sebesar 101,33% dari target. Ditahun 2015 panjang pedestrian yang kapasitasnya telah ditingkatkan dengan pelebaran mencapai 6.854 km dan pedestrian yang terbangun di jalan utama sepanjang 2.932 Km.
- 6) Capaian ini antara lain didukung perbaikan pedestrian pejalan kaki Jl. Pemuda, peningkatan Trotoar Jl. Dadali-Ahmad Yani-Warung Jambu, pembangunan trotoar Jl. Kapten Yusuf Kelurahan Cikaret, pembangunan trotoar Jl. Siliwangi, perbaikan pedestrian pejalan kaki Jl. RE. Abdulah, perbaikan pedestrian pejalan kaki Jl. Aria

Suryalaga, dan peningkatan trotoar Kawasan Seputar Kebun Raya; Peningkatan Trotoar Jalan Heulang dan Jalan Ahmad Sobana; Peningkatan Trotoar Pulo Empang; Perbaikan Trotoar Seputar Alun-alun Empang dan Jalan Cikaret; Peningkatan Trotoar Jalan Saleh Danasasmita; Perbaikan Trotoar Jalan Aria Suryawinata; serta Peningkatan Trotoar Jalan Malabar, Jalan Brigjen Saptaji, Jalan Sudirman dan seputar Sempur, pelebaran jalan Raya Pemda-Batas kota, pembangunan trotoar di jalan Sindang barang Loji, Jl. Bangka, Jl. KS. Tubun, perbaikan jalan Batu tulis NV Sidik, dan Jalan Salak.

- 7) Sampai dengan tahun 2018 panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya sepanjang 16.0119 km dari target 19.961 km atau mencapai 80,22%. Hal ini didukung dengan pelaksanaan di 3 ruas trotoar dan didukung adanya kegiatan DED Peningkatan Trotoar Jl. Sudirman – Jl. A. Yani – Jl. Pemuda – Jl. Dadali.
- 8) Sampai dengan tahun 2018 panjang prasarana pedestrian jalan utama yang terbangun adalah 259,288 km meningkat 0,9805 km dibanding tahun 2017 mencapai 97,26% dari target 266.592 km. Hal ini didukung pembangunan di 2 ruas trotoar yaitu di Jalan M. A. Salmun dan Jalan Jend. Sudirman.

8.5. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, penanganan persampahan dan kebersihan kota tertuang dalam Misi-3, yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan, yang bertujuan menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019:

- a. Meningkatnya pelayanan persampahan;
- b. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle); dan
- c. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat.

Terwujudnya pelayanan persampahan dan kebersihan kota didukung melalui program sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
- c. Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional, dan Pemeliharaan Fungsi TPA
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Capaian kinerja penanganan pelayanan persampahan dan kebersihan kota sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2018 jumlah timbunan sampah Kota Bogor mencapai 648,61 ton/hari dengan dan total sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 492 ton/hari.

- 2) Pada tahun 2017, timbulan sampah Kota Bogor mencapai 2.939 m³ per hari, menurun sebesar 845,39 m³ per hari atau 22,34% dari tahun 2016 yaitu sebesar 3.784,39 m³ per hari dan pelayanan persampahan berdasarkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA Galuga adalah sebesar 2.782 m³ per hari, mengalami peningkatan sebesar 322,15 m³ per hari atau 13,09 % dari tahun 2016 yaitu 2.459,85 m³ per hari. Data timbulan sampah Kota Bogor pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 2.680 m³/hari, meningkat sebesar 7 m³/hari atau 0,26 % dari tahun 2014 yaitu sebesar 2.673 m³/hari dan pelayanan persampahan berdasarkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA Galuga adalah sebesar 1.936 m³/hari, meningkat sebesar 52 m³/hari atau 2,76% dari tahun 2014 yaitu 1.884 m³/hari.
- 3) tingkat pelayanan persampahan di Kota Bogor Tahun 2018 meningkat 1,47% dibanding tahun 2017 atau sebesar 75,85%. Tingkat pelayanan persampahan di Kota Bogor tahun 2017 mencapai 74,38% dengan luasan cakupan wilayah pelayanan persampahan seluas 8.814,03 Ha dari luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha. Merujuk pada kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan prosentase pelayanan persampahan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2016 sekitar 74% atau 8.769 Ha, serta melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2017 yaitu 73,37%. Tahun 2015 Berdasarkan volume sampah terangkut tingkat pelayanan persampahan di Kota Bogor mencapai 72,20% dengan luasan cakupan wilayah pelayanan persampahan seluas 8.558,07Ha dari luas wilayah Kota Bogor 11.850 Ha. Hal ini berarti Pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan prosentase pelayanan persampahan sebesar 1,72% atau 20,38 Ha dibandingkan tahun 2014 (70,48 % atau 8.351,88 Ha), serta melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 yaitu 71,37%
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dalam mendukung pencapaian kinerja pelayanan sampah sampai dengan tahun 2018 didukung oleh 92 unit Dump Truck, 30 unit Arm Rol, 4 unit Dump Compactor, 1 unit Hoakloader Compacter, 2 unit Sweeper, 6 unit alat berat, 3 unit Pick Up, 66 unit motor sampah, 200 unit gerobak sampah, 200 buah tong sampah, 13 unit container, 110 unit bak container, 969 unit TPS, termasuk didalamnya transfer depo di 4 lokasi dan 26 unit TPS 3R.
- 5) Sampai dengan tahun 2018 telah dibentuk 253 Bank Sampah dan 26 TPS 3R yang tersebar di 6 kecamatan se-Kota Bogor. Jumlah bank sampah ini bertambah 181 unit dibandingkan tahun 2016 yang hanya terdapat 72 unit bank sampah. Dengan adanya pengelolaan sampah berbasis 3R ini mampu mereduksi sampah sebesar 6,26% % dari

total sampah Kota Bogor, artinya sudah sesuai dengan target reduksi sampah melalui TPS 3R berbasis masyarakat yaitu 4,4% ditahun 2018.

- 6) Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan, pemerintah Kota Bogor melaksanakan Lomba Kebersihan dalam bentuk Lomba Mulung Sampah Ciliwung dengan tema, “Sehat, Indah, Hijau, Tanggung Jawab, Mandiri, Peduli” yang diikuti oleh 13 (tiga belas) kelurahan di Kota Bogor. Selain itu, telah pula dilaksanakan Lomba Pengelolaan Sampah dengan Program 3 R melalui Bank Sampah Tingkat Kota Bogor yang diikuti oleh 13 Bank Sampah dari 12 kelurahan di Kota Bogor.
- 7) Melaksanakan Gerakan Bogorku Bersih Jilid 2 Tahun 2017 yang meliputi Lomba Kebersihan untuk kategori Komplek Perumahan Teratur, Komplek Pemukiman Swadaya, Perumahan Tepi Sungai, Sekolah, dan Pasar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 154 RT, 126 sekolah, dan 6 unit pasar di Kota Bogor.
- 8) Tahun 2018 dilakukan kerjasama dengan Harian Umum Radar Bogor untuk melaksanakan Bogorku Bersih Jilid III Tahun 2018 yang meliputi Lomba Kebersihan untuk kategori Perumahan Tepi Sungai dan Kategori Perumahan Swadaya.
- 9) Upaya- upaya yang dilakukan di tahun 2015, 2016 dan 2017 dalam penanganan persampahan dan kebersihan kota, Kota Bogor berhasil meraih Sertifikat Adipura. Sertifikat adipura ini diberikan atas peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan perkotaan selama 2014-2015, dan merupakan pencapaian terbaik setelah hampir 27 tahun terakhir.

8.6. Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi

Program Prioritas Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan dua misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019. Misi-misi tersebut adalah misi pertama yaitu: Menjadikan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan misi kelima yaitu: Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam misi-misi tersebut adalah: meningkatkan implementasi *e-government* dan mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas (misi pertama), serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (misi kedua).

Pencapaian Kinerja penanganan program Prioritas Transformasi Budaya dan reformasi Birokrasi Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik telah dilaksanakan kegiatan :
 - Survey kepuasan masyarakat tahun 2018 dilakukan terhadap pelaksanaan 6 Program prioritas dan 10 Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Pehubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Bogor Timur, RSUD dan UPTD Rumah Potong Hewan dengan rata-rata indeks kepuasan sebesar 3,32 atau dapat dikategorikan “BAIK”.
 - Tahun 2017 survey kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 6 program prioritas Kota Bogor dan 1 layanan kesehatan dengan rata-rata indeks kepuasan sebesar 3,21 atau dapat dikategorikan “BAIK”
 - Tahun 2016 survey kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 6 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas pempapatan Daerah dan UPTD RPH terpadu dengan rata-rata indeks kepuasan sebesar 3,20 atau dapat dikategorikan “BAIK”
 - Melaksanakan evaluasi SOP terhadap 10 Perangkat Daerah. Tahun 2018 hasil evaluasi bahwa terdapat 3 SOP yang akan diberlakukan untuk seluruh Perangkat Daerah yaitu SOP Pengelolaan Arsip Dinamis (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan), serta SOP Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi BISA (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian).
- 2) Perolehan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 mencapai B dengan nilai 67,43 meningkat 4,99 point dibanding Tahun 2017 dengan nilai 62,44 (B).
- 3) Dalam rangka pengembangan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan melalui Lomba Kecamatan dengan raihan Kecamatan Bogor Tengah berhasil meraih Juara Harapan III Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- 4) Dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang berbasis system informasi dan ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK, pada tahun 2017 telah dibangun 2 SIM yaitu Aplikasi Walikota Menyapa dan Aplikasi SIM Kesetaraan serta telah dilakukan pengembangan terhadap 9 (sembilan) SIM yang telah ada, yaitu: SIM e-Surat, SIM e-Wilayah, aplikasi SISKUM, SIM PATEN, Data Warehouse, Aspirasi Pengaduan, dan Website Kota Bogor.
- 5) Pada tahun 2018 telah mengintegrasikan sebanyak 4 (empat) SIM yaitu:
 - SMART Perizinan, terintegrasi dengan SIMATA dan Host to host BJB;
 - SIM PATEN, terintegrasi dengan SIM WILAYAH dan SITANDUK;
 - SIM DISPENDA (SIM PBB), terintegrasi dengan SIMATA; dan

- SIMATA, terintegrasi dengan Datawarehouse.
- 6) Tahun 2018 Pengaduan masyarakat disampaikan melalui Aspirasi Pengaduan Masyarakat Call Center melalui 5 kanal media yaitu SMS Center, email, website aspirasi, call center, dan media sosial. Mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 telah masuk 559 pengaduan, Dari 559 pengaduan, sebanyak 448 Pengaduan sudah ditindaklanjuti atau sebesar 80,14% dan sebanyak 111 Pengaduan belum ditindaklanjuti atau sebesar 19,86%. Pada tahun 2017 telah ditindak lanjuti sebanyak 391 pengaduan (67,41%) dari 580 pengaduan. Tahun 2016 pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 688 (79,45%) dari 866 pengaduan. data jumlah pengaduan pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi namun mengalami peningkatan dalam penanganan/jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

BAB IX

EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

9.1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Perumda BPR Bank Kota Bogor) adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (PD BPR Bank Pasar Kota Bogor) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.

Adapun tujuan pendirian Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bidang jasa perbankan kepada masyarakat (PNS, Karyawan, Pensiunan, UMKM) yang berada di wilayah Kota Bogor, selain itu memiliki tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menunjang pembangunan daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor saat ini telah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik, Secara garis besar dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9.1

Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor

(dalam Ribuan Rupiah)

Perkiraan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018*
Volume Usaha	82.889.690	94.888.643	122.787.108	140.636.496	162.127.586
Kredit yang Diberikan	67.702.464	73.398.753	88.524.475	105.050.527	108.749.807
Saldo Tabungan	15.593.143	18.450.369	24.801.825	33.696.929	37.901.882
Saldo Deposito Berjangka	8.153.500	12.957.000	25.307.800	23.306.100	43.688.842
Saldo Antar Bank Pasiva	750.000	1.250.000	4.200.000	4.500.000	500.000
Modal disetor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	39.300.000	39.300.000
Pinjaman yang Diterima	13.344.444	14.068.819	15.788.983	13.041.674	9.750.000
Pendapatan Operasional	18.203.942	21.863.052	25.702.822	29.053.264	34.034.053
Beban Operasional	9.699.276	13.320.624	15.978.497	18.385.083	22.797.561
Pendapatan Non Operasional	150.290	179.335	169.106	147.768	145.872
Beban Non Operasional	67.056	90.471	114.068	138.623	399.069
Laba Sebelum Pajak	8.587.900	8.631.292	9.779.364	10.677.325	10.983.296
Taksiran Pajak Badan Ps. 25	1.867.609	1.960.465	2.311.117	2.547.692	2.553.021
Laba Setelah Pajak	6.720.291	6.670.828	7.468.246	8.129.633	8.430.274
Bagian Laba Pemda	1.213.971	2.688.117	2.668.331	3.734.123	4.064.817

Perumda BPR Bank Kota Bogor pada tahun buku 2018 telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik “Richard Risambessy & Rekan”. Pada Audit atas laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perumda BPR Bank Kota Bogor, Kantor Akuntan Publik memberikan hasil opini ***Wajar Tanpa Pengecualian***.

Perumda BPR Bank Kota Bogor telah menerbitkan produk tabungan dengan nama Tabungan BERSERI berhadiah yang diundi setiap 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan khusus oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor pada setiap bulan November. Pada tanggal 26 November 2018, telah dilaksanakan pengundian hadiah Tabungan BERSERI untuk periode yang kelima.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak lain, yaitu :

- 1) Kerjasama dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam rangka penunjukan Perumda BPR Bank Kota Bogor sebagai tempat pembayaran (*payment point*) rekening air minum bulanan dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 695/SP.18-PDAM/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang berlaku hingga tahun 2018.
- 2) Kerjasama antara Perumda BPR Bank Kota Bogor dengan PT BPR Karya Jatnika Sadaya (BPR KS) Bandung dalam rangka penunjukan Bank Kota Bogor sebagai tempat pembayaran (*Payment Point*) rekening listrik PLN dan rekening telepon PT. TELKOM secara online, dan sampai dengan saat ini telah dilakukan penambahan 2 (dua) terminal layanan melalui *Internet Banking* untuk pelayanan di Kantor Pusat Jl. R.E. Martadinata No. 45 dan Kantor Kas, Jl. Sawojajar No. 8 Bogor.
- 3) Perumda BPR Bank Kota Bogor juga telah bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengenai Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bogor melalui Bank Kota Bogor.
- 4) Untuk menjamin keamanan finansial dan mengurangi risiko kerugian bagi penyaluran kredit kepada nasabah, telah dilaksanakan pula perjanjian kerjasama dengan pihak Asuransi Jiwa melalui program pertanggung jawaban asuransi jiwa yakni dengan, PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), PT. HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA dan PT. JAMKRIDA JABAR.
- 5) Kerjasama dengan Notaris dan PPAT Rosliah, SH. yang beralamat di Jl. Kresna Raya No. 62 Perumahan Indraprasta 1 Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, dalam rangka penguatan aspek legal terhadap perjanjian kredit dan pengikatan agunan milik debitur.

Di samping itu, Perumda BPR Bank Kota Bogor juga mendapatkan penghargaan-penghargaan di antara nya ;

- 1) Pada tahun 2018 Perumda BPR Bank Kota Bogor untuk yang kedelapan kalinya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 481 BPR terbaik pada golongan BPR ber-asset Rp. 100 Miliar sampai dengan Rp. 250 Miliar dari total 1.619 BPR yang ada di seluruh Indonesia versi majalah infobank dan sehubungan
- 2) Perumda BPR Bank Kota Bogor juga mendapatkan penghargaan TOP 100 BPR 2018 sebagai BPR berpredikat Bintang Lima (☆☆☆☆☆) Kategori aset Rp. 100 miliar keatas yang tumbuh pesat selama 3 (tiga) tahun versi *The Finance*.

Sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja keuangan, disajikan dalam bentuk data Rasio Tingkat Kesehatan Bank. Dengan memperhatikan target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, maka pencapaian Rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.2
Tingkat Kesehatan Bank

RASIO	Satuan	Standar BI	Target 2018	Realisasi 2018
CAR	%	≥ 8	92,93	51,37
KAP	%	≤ 10,35	0,95	1,94
PPAP	%	≥ 81,0	100,00	100,00
ROA	%	≥ 1,215	7,38	7,39
BOPO	%	≤ 93,52	66,11	66,98
LDR	%	≤ 94,75	88,39	72,84
<i>Cash Ratio</i>	%	≥ 4,05	27,12	38,26
Non Performing Loan (Gross)	%	-	1,98	2,38
Non Performing Loan (Net)	%	-	0,93	1,18

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam ambang batas standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian secara keseluruhan tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam predikat “SEHAT”.

Pada setiap tahunnya, Perumda BPR Bank Kota Bogor selalu mengalokasikan dana yang diambil dari keuntungan tahun sebelumnya untuk melaksanakan program CSR. Selama tahun 2018 dana bantuan yang disalurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9.3**Realisasi Penyaluran Dana CSR Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2018**

No.	Kegiatan	Tahun 2018*
1	Santunan Anak Yatim-Piatu dan Dhuafa	37.650.000
2	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-
3	Bantuan Permodalan UP2K	29.000.000
4	Penyaluran Hewan Kurban	25.500.000
5	Kegiatan Sosial Lainnya	92.750.000
JUMLAH		184.900.000

Pemenuhan kewajiban atas modal dasar untuk Perumda BPR Bank Kota Bogor dari Pemerintah Kota Bogor sampai dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9.4**Target dan Realisasi Pemenuhan Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2018**

Penambahan Modal	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018*	% Realisasi
A. Modal Disetor Pemerintah Kota Bogor	48.000.000.000	39.300.000.000	81,88%
B. Modal Lainnya			
~ Modal Pinjaman	-	-	-
~ Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Jumlah	48.000.000.000	39.300.000.000	81,88%

9.2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor adalah salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Beberapa peraturan yang mendasari pembentukan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977, diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; dan
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor.

Potensi pengembangan yang dapat dikelola dan yang telah dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, diantaranya :

1. Kapasitas Air Baku

Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas Produksi adalah sungai Cisadane.

2. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, terdapat wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan jumlah layanan mencapai 15.186 SL atau 91.116 jiwa. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sereal dengan jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 159.290 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga dan Industri.

Sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah mampu mengaliri ke zona-zona pelayanan air minum, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 9.5

Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2018

No.	Sumber	Lokasi	Tahun	Kapasitas (Liter/detik)			Keterangan
				Terpasang Awal	Terpasang Saat Ini	Produksi	
1	Mata Air	Kota Batu	1918	70	69,00	67,36	
2	Mata Air	Bantar Kambing	1969	170	152	152,09	
3	Mata Air	Tangkil	1974	170	114	113,64	

No.	Sumber	Lokasi	Tahun	Kapasitas (Liter/detik)			Keterangan
				Terpasang Awal	Terpasang Saat Ini	Produksi	
4	IPA	Cipaku 1 & 2	1988	120			
		Cipaku 3	1995	60	280	282,44	Mengoptimalkan IPA
		Cipaku 4	2003	60			
5	IPA	Dekeng 1	1997	600			
		Dekeng 1	2005	Up-Rating	1.000	831,89	
		Dekeng 1	2011	2 Unit Filter			
6	IPA	Dekeng II	2013	400	800	763,36	Mengoptimalkan IPA
7	Mata Air	Palasari	2008	30	13	12,81	
8	IPA	Palasari	2008	20	20	18,60	
9	IPA	Cikereteg	2015	40	40	20,00	
	Jumlah			1.740	2.486	2.262,19	

Tabel 9.6

Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kec. Bogor Utara	20.632	22.345	28.465	25.019	26.081
2	Kec. Bogor Selatan	24.145	26.150	16.141	30.030	30.838
3	Kec. Bogor Barat	22.880	25.015	20.200	27.950	29.256
4	Kec. Bogor Timur	13.996	15.246	23.521	16.975	17.257
5	Kec. Tanah Sareal	25.060	27.658	26.443	30.751	32.150
6	Kec. Bogor Tengah	19.727	20.052	29.377	20.458	20.627
7	Kab. Bogor	2.872	2.946	2.947	2.949	2.955
Jumlah Pelanggan Per Kecamatan		129.312	139.412	147.094	154.132	159.290

Tabel 9.7

Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif

No.	Jenis Golongan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
a.	Pelanggan Domestik				
	Rumah Tangga :				
	Rumah Tangga R1	1.526	1.498	1.472	186
	Rumah Tangga R2	17.190	21.239	23.814	22.727
	Rumah Tangga R3	41.700	43.188	44.113	46.357
	Rumah Tangga R4	27.235	28.051	30.020	32.691
	Rumah Tangga R5	20.529	21.088	21.728	23.047
	Rumah Tangga R6	15.486	16.187	16.957	17.867
	Rumah Tangga R7	4.928	4.959	5.062	5.360
	Rumah Tangga R8	2.495	2.495	2.499	2.508
	Sub Jumlah Pelanggan Domestik	131.089	138.705	145.665	150.743
b.	Pelanggan Non Domestik				
	Sosial Umum / S1	1.277	1.263	1.274	1.299
	Sosial Umum / S2	807	849	883	842
	Instansi Pemerintah	364	368	367	376
	Niaga Kecil N1	1.586	1.579	1.595	1.673
	Niaga Kecil N2	3.680	3.719	3.753	3.811
	Niaga Besar N3	530	532	516	466
	Niaga Besar N4	70	70	70	72
	Industri / I-1	3	3	3	2
	Industri / I-2	6	6	6	6
	Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik	8.323	8.389	8.467	8.547
	Jumlah	139.412	147.094	154.132	159.290

Tabel 9.8**Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pelanggan	129.312	139.412	147.094	154.132	159.290
2	Cakupan Pelayanan	78,41%	82,79%	85,85%	88,73%	91,44%

Dalam upaya membantu peningkatan kinerja pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, pihak Pemerintah Kota Bogor telah memberikan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 9.9**Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak**

No	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak	Pembagian Laba Bersih	Penyertaan Modal
1	2014	35.983.297.589,45	19.790.814.000,00	31.073.447.956,00
2	2015	45.815.256.978,42	25.198.391.000,00	10.921.110.161,00
3	2016	39.891.073.742,43	21.940.091.000,00	52.898.242.000,00
4	2017	33.325.544.280,00	18.329.049.400,00	10.934.000.000,00
5	s/d Nopember 2018	60.704.745.896,84		
	Jumlah	215.719.918.487,14	85.258.345.400,00	105.826.800.117,00

Tabel 9.10**Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018**

No.	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak dan Audit
1	2014 Audit	Rp. 35.983.297.589,45
2	2015 Audit	Rp. 45.815.256.978,42
3	2016 Audit	Rp. 39.891.073.742,43
4	2017 Audit	Rp. 33.325.544.280,00
5	s/d Nopember 2018 (Un Audit dan Sebelum pajak)	Rp. 60.704.745.896,84
	Jumlah	Rp. 215.719.918.487,14

Prestasi/Penghargaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor:

1. PDAM Terbaik berdasarkan Survei Indeks Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi (WSSI) yang diselenggarakan BPPSPAM dan Kementerian PUPR tahun 2017.

2. PDAM terbaik II Aspek Operasional dengan Masyarakat di atas 500.000 jiwa dari Perpamsi tahun 2017.
3. Penghargaan Debitur Lancar dalam Pembayaran Bank Dunia dari Kementerian Keuangan RI tahun 2017.
4. Penghargaan PDAM Terbaik Kategori lebih dari 100.000 samabungan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2018.

9.3. PD. Pasar Pakuan Jaya

PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih dan teratur, mendorong perekonomian daerah, menunjang pembangunan daerah, meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Pasar Pakuan Jaya dibentuk pada tanggal 7 Juli 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Sampai dengan tahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mengelola 11 pasar yang tersebar di beberapa tempat yaitu Pasar Gunung Batu, Sukasari, Taman Kencana, Kebon Kembang (Blok A, B, B1, F & G), Padasuka, Devries, Jambu Dua, Baru Bogor, Merdeka, Pamoyanan dan Tanah Baru. Pasar-pasar tersebut telah diserahkan kepada PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Selain itu PD Pasar Pakuan Jaya juga mengelola satu pasar tambahan yaitu Plaza Bogor sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya Sebagai Pengelola Pasar Di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

PD Pasar Pakuan Jaya telah mengelola sebanyak 6.738 Kios dan Los, yang terdiri atas 5.598 Kios dan 1.140 Los. Dari total 6.738 kios dan los tersebut baru sebanyak 3.500 kios dan los atau 51.94% saja dari total kios dan los yang aktif/buka.

Tabel 9.11
Jumlah Kios dan Los

No.	Pasar	Kios			Los		
		Buka	Tutup	Juml	Buka	Tutup	Juml
1	Gunung Batu	109	22	131	66	32	98
2	Sukasari	132	28	160	29	2	31
3	Taman Kencana	18	-	18	-	-	-
4	Kebon Kembang	1.233	904	2137	26	51	77
5	Padasuka	91	64	155	-	-	-
6	Devries	16	27	43	8	5	13
7	Jambu Dua	1	13	14	114	606	720
8	Baru Bogor	957	1.087	2.044	59	142	201
9	Merdeka	278	214	492	-	-	-
10	Pamoyanan	-	-	-	-	-	-
11	Tanah Baru	-	-	-	-	-	-
12	Plaza Bogor	379	43	422	-	-	-
Jumlah		3.196	2.402	5.598	302	838	1.140

Selama tahun 2018, Direksi PD Pasar Pakuan Jaya telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD Pasar Pakuan Jaya kepada masyarakat diantaranya :

1. Melakukan berbagai pelatihan kepada para pedagang untuk mencegah pasar dari kebakaran, bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk membantu pedagang dalam hal pembayaran sewa kepemilikan kios/los, dan pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Bogor, dan memonitor pasokan dan harga komoditas pangan.
2. Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka melindungi konsumen dari kualitas mutu bahan pangan, ketersediaan jumlah bahan pangan, dan dari bahaya racun bahan pangan. Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dan Badan Metrologi Kota Bogor melakukan tera ulang timbangan pedagang untuk menjamin tepat ukur timbangan.
3. Sejak tahun 2012 PD Pasar Pakuan Jaya telah melakukan pembangunan pasar baik yang menggunakan dana Penyerahan Modal Pemerintah (PMP) maupun bekerjasama dengan pihak pengembang, diantaranya adalah :
 - a. Revitalisasi Pasar Baru Bogor
 - b. Pembangunan Pasar Kebon Kembang
 - c. Pembangunan Pasar Devries
 - d. Revitalisasi Pasar Taman Kencana
 - e. Pembangunan Pasar Gunung Batu
 - f. Revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang
 - g. Revitalisasi Blok G Pasar Kebon Kembang.

4. Ditahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya sedang melaksanakan proses revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang, sudah memasuki tahapan persiapan pembangunan. Proses revitalisasi Blok G pasar Kebon Kembang sudah memasuki tahap pembangunan..
5. Pada tahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Investor pemenang *Beauty Contest* yaitu PT Fortunindo Arta Perkasa untuk melakukan Revitalisasi Blok G Pasar Kebon Kembang.
6. Dalam rangka melindungi konsumen pasar dari bahaya formalin dan zat beracun pada makanan, PDPPJ kerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Bogor melakukan sosialisasi penanganan mutu ikan segar kepada para pedagang.
7. Sepanjang tahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya telah menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.948.822.899,- atas laba tahun 2017 PD Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp.1.725.132.543,-. Selain setoran PAD, PD Pasar Pakuan Jaya juga telah menyetorkan pajak parkir tahun 2018 kepada kas daerah Kota Bogor sebesar Rp.265.973.275,- dari total pendapatan tariff parkir sebesar Rp. 1.063.893.100,-

Tabel 9.12
Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
Sampai dengan Tahun 2018

	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
<u>I.Penerimaan</u>		
	A. Penerimaan PMP Tahun 2010	5,000,000,000
	B. Penerimaan PMP Tahun 2012	7,500,000,000
	C. Penerimaan PMP Tahun 2013	5,000,000,000
	D. Penerimaan PMP Tahun 2014	15,000,000,000
	E. Penerimaan PMP Tahun 2016	7,500,000,000
	F. Penerimaan PMP Tahun 2017	5,000,000,000
<u>II.Realisasi Penggunaan</u>		
		27,534,155,405
Tahun 2010	A.Biaya Pra Operasional Selama Tahun 2010	5,000,000,000
31 Des 2013	B.Pembiayaan Revitalisasi	20,920,578,250
	Total Pusat	187,474,500
	Total PSR BB	13,179,745,000
	Total PSR KKB	98,810,000
	Total PSR SKR	380,921,000
	Total PSR GNB	4,897,180,750
	Total PSR JD	74,507,000

9.4. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT)

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 12 April 2007 tentang “Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor” yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008.

Modal Dasar Perusahaan Daerah JasaTransportasi (PDJT) Kota Bogor menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang telah terealisasi seluruhnya hingga 31 Desember 2014. Dan berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor diberikan penyertaan modal sebesar Rp 5.519.390.000,- (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2015 tentang “Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor.

Pada tahun 2015 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Organisasi PD jasa Transportasi dari 3 direksi menjadi 1 Pjs. Direktur sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-112 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penunjukan Sdr. Suharto, ATD., MM jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Jasa Transportasi Kota Bogor dan hasilnya telah ditetapkan Saudara Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Nomor 18/BP-PDJT/01/2016 perihal Penyampaian usulan nama Calon Direktur PDJT Periode 2016-2020 tanggal 22 Januari 2016. Dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-11 tahun 2016 tentang “Pengangkatan Saudara Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Periode (2016-2020)” tanggal 27 Januari 2016. Masa jabatan Bpk. Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si hanya berjalan kurang lebih 1 tahun hal ini dikarenakan Bpk. Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si mengundurkan diri pada tanggal 5 Mei 2017, dan jabatan Direksi dilanjutkan oleh plt Direktur Ibu Dra. Rakhmawati, M. Si. yang bertugas sejak bulan Juni 2017 – Februari 2018 dan dilanjutkan oleh Plt Direktur Bpk. H. Bambang Budianto, SH., M.Si. yang bertugas sejak bulan Maret – September 2018, yang kemudian digantikan lagi dengan Plt Direktur Bpk. H. Endang Suherman, SE., M.Si. yang bertugas sejak bulan September 2018 – saat ini.

Operasional bus Trans Pakuan pada tahun 2017 tidak berjalan secara optimal, hal ini dimulai sejak awal tahun atau bulan Januari 2017 pada saat posisi keuangan perusahaan sudah tidak stabil dimana antara kas dan pendapatan operasional tidak lagi mampu menutupi semua biaya operasional termasuk pemabayaran gaji pegawai. Selama bulan Januari dan Februari Trans pakuan masih melakukan operasi khususnya pada jalur 1 & 2 Bubulak – Baranangsiang dan Baranangsiang – Bellanova, namun operasional tidak berjalan secara optimal dikarena ada kekecewaan dari karyawan yang disebabkan belum menerima

pembayaran gaji secara optimal, hingga pada akhirnya karyawan melakukan mogok operasional secara total pada tanggal 28 Februari 2017.

Selama masa mogok operasional sempat diadakan pertemuan intern antara karyawan dan manajemen untuk mencari solusi awal penanganan kondisi perusahaan, sempat terjadi kesepakatan antara karyawan dan manajemen untuk beroperasi kembali pada minggu kedua bulan Maret 2017 dengan kesepakatan bagi hasil atau persentase dari hasil pendapatan operasional setiap harinya. Dan kembali lagi operasional pun tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan;

1. Karyawan sudah enggan melakukan operasi karena hasil yang diperoleh dari operasional belum bisa menutupi kebutuhan karyawan.
2. Kondisi kendaraan yang semakin memburuk dikarenakan tidak ada perbaikan kendaraan khususnya kerusakan yang memerlukan pembiayaan besar dan tidak ada pembelanjaan spare part mengingat posisi keuangan yang tidak stabil.
3. Masih belum jelasnya kapan proses pembayaran gaji dilakukan.
4. Isu-isu yang berkembang terkait pembubaran perusahaan (likuidasi), yang membuat suasana diperusahaan semakin tidak kondusif.

Semua hal-hal tersebut berujung pada demo karyawan kepada Walikota Bogor, dengan beberapa permintaan diantaranya tidak ada pembubaran perusahaan (likuidasi), dan permintaan kepada Direktur PDJT untuk mengundurkan diri dari jabatan karena dinilai tidak mampu untuk mengelola perusahaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses pembayaran gaji karyawan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 05 Mei 2017 secara resmi Direktur PDJT Bapak Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si, mengundurkan diri dari jabatannya.

Koridor Barangsiang (Cidangiang) – Bellanova (Sentul City) merupakan jalur yang masih eksis sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampe dengan saat ini. Koridor ini merupakan jalur potensial yang dilayani oleh bus Trans Pakuan, mengingat tidak ada angkutan pesaing yang melayani operasional pada koridor ini. Berikut rekapitulasi kegiatan operasional bus Trans Pakuan periode tahun 2018.

Tabel 9.13

**Rekapitulasi Pendapatan Operasional Transpakuan
Koridor Baranangsiang – Bellanova (Sentul City) Periode Tahun 2018**

No.	Bulan	Total Penumpang (Orang)	Total Pendapatan	Rata-rata Penumpang/hari (Orang)	Rata-rata Pendapatan/hari
1	Jan	14.315	Rp 143.150.000	462	Rp 4.617.742
2	Feb	13.185	Rp 131.850.000	471	Rp. 4.708.929
3	Mar	16.303	Rp 163.030.000	526	Rp 5.259.032
4	Apr	16.022	Rp 160.220.000	534	Rp 5.340.667
5	Mei	15.507	Rp 155.070.000	500	Rp 5.002.258
6	Jun	13.170	Rp 131.700.000	439	Rp 4.390.000
7	Jul	16.722	Rp 167.220.000	539	Rp 5.394.194
8	Agust	16.760	Rp 167.600.000	541	Rp 5.406.452
9	Sep	17.521	Rp 175.210.000	584	Rp 5.840.333
10	Okt	18.509	Rp 185.090.000	597	Rp 5.970.645
11	Nop	18.254	Rp 182.540.000	608	Rp 6.084.667
12	Des	17.707	Rp 177.070.000	571	Rp 5.711.935
Total		193.975	Rp. 1.939.750.000	531	Rp 5.310.571

Koridor Bubulak – Baranangsiang merupakan koridor perintis yang pernah dioperasikan oleh PD. Jasa Transportasi Kota Bogor. Pada tahun 2018 Koridor Bubulak - Baranangsiang hanya mampu beroperasi selama kurang lebih 2 bulan, hal ini disebabkan karena tingginya biaya operasional kendaraan yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Tabel 9.14

**Rekapitulasi Pendapatan Operasional Transpakuan
Koridor Bubulak – Baranangsiang Periode Tahun 2018**

No.	Bulan	Total Penumpang (Orang)	Total Pendapatan	Rata-rata Penumpang/hari (Orang)	Rata-rata Pendapatan/hari
1	Sep	1.266	Rp 7.596.000	55	Rp 330.261
2	Okt	1.036	Rp 6.216.000	35	Rp 207.200
Total		2.302	Rp 13.812.000	45	Rp 268.730

Keuangan Perusahaan saat ini tidak bersumber dari Anggaran Pemerintah (PMP), semua sumber dana yang dimiliki bersumber dari pendapatan operasional bus Trans Pakuan pada Koridor Baranangsiang – Bellanova (Sentul City) yang dikelola untuk semua pembiayaan baik operasional kendaraan, penggajian atau honor pegawai dan pembiayaan lain perusahaan.

BAB X

PENUTUP

Evaluasi RPJMD dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode RPJMD selanjutnya. Evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015– 2019 dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian target setiap indikator sasaran pada setiap misi. Selain mengevaluasi ketercapaian target yang telah ditentukan, dilakukan juga identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian setiap indikator sasaran yang ada. Evaluasi juga dilakukan dengan menilai apakah setiap indikator sasaran telah tepat menjadi indikator .

Hasil evaluasi pencapaian target setiap indikator sasaran pada setiap misi, didapatkan bahwa sebagian besar indikator pada seluruh misi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mungkin juga terjadi karena evaluasi ketercapaian dinilai hingga tahun 2018 sementara target yang telah ditentukan ialah target di akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2019. Akan tetapi, dari hasil evaluasi yang ada dapat dilihat gap kondisi terakhir pencapaian target terhadap target di akhir tahun RPJMD. Gap tersebut dapat menjadi masukan terhadap Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Hasil identifikasi permasalahan pencapaian target yang telah dilakukan menunjukkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketidaktercapaian target dan faktor-faktor apa yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai. Hasil identifikasi permasalahan dalam pencapaian target ini dapat menjadi masukan dalam menentukan solusi-solusi pemecahan masalah agar target setiap indikator dapat tercapai. Sementara itu, dilihat dari hasil identifikasi permasalahan, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target namun tetap memiliki masalah dalam pencapaiannya. Hasil ini dapat juga dapat menjadi masukan dalam pemecahan masalah agar pencapaian target lebih maksimal.

Sedangkan dari evaluasi indikator, hampir 90% indikator pada seluruh misi dinilai tidak tepat sebagai indikator sasaran karena masih bersifat output. Indikator yang telah ditetapkan merupakan indikator program atau indikator kegiatan. Selain itu, dari hasil penilaian didapatkan bahwa terdapat juga beberapa indikator yang tidak terkait dengan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut direkomendasikan untuk menjadi indikator pada sasaran. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menentukan indikator-indikator sesuai tingkatannya pada penyusunan RPJMD periode selanjutnya.

Selain itu, ditemukan beberapa hal berikut dalam pelaksanaan evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 - 2019 :

1. Terdapat inkosistensi penetapan sasaran dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019
2. Beberapa data ketercapaian indikator tidak didapatkan, sehingga sulit dilakukan evaluasi ketercapaian
3. Tidak jelasnya definisi dan metode perhitungan atau pengukuran setiap indikator sehingga sulit untuk menentukan data dan pengukurannya

